

**PERANAN PGRI SEBAGAI KELOMPOK  
KEPENTINGAN (*INTEREST GROUPS*)  
DALAM MEMPERJUANGKAN  
KESEJAHTERAAN GURU**

**(Studi Kasus Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah  
masa bakti 2004 s/d 2009)**



**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Magister Ilmu Politik pada program Pascasarjana  
Universitas Diponegoro**

**Oleh :**

**BUDIARTO  
D4B007012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK**

## **PENGESAHAN TESIS**

**Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa draf tesis berjudul :**

### **PERANAN PGRI SEBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN (INTEREST GROUPS) DALAM MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN GURU**

**(Studi Kasus Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2004 s/d 2009)**

Yang disusun oleh Budiarto, NIM. D4B007012

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Desember 2009

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Penguji

Anggota Penguji I

Drs.Hamid Widodo,M.Pd  
Sekretaris Penguji

Drs.Turtiantoro,M.Si  
Anggota Penguji II

Dr.Reni Windiani,MS

Drs.Muhammad Adnan,M.A

Semarang, 16 Desember 2009  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro  
Program Studi Magister Ilmu Politik  
Ketua Program

Drs. Purwoko,MS

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**



Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Budiarto menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada program Magister Ilmu Politik ini ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya di pundak saya.

Semarang, 16 Desember 2009

**BUDIARTO**  
NIM. D4B007012

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Allah)”*

*Qur'an, Surat. Ar-Ra'd 13 :11*

*Dengan satu titi nada, tak akan tercipta tangga lagu; dengan satu warna, tak ada gambar yang bermakna; dengan satu rasa, tak ada makanan lezat; dengan hanya satu, takkan dapat melakukan perbandingan. perbedaan adalah sumber keindahan; Kesempurnaan menuntut segala upaya yang mampu kita perbuat.*

----- Adam Sia : The Chinese Art of Excelence -----

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- **Istri dan anak-anakku, atas ijin dan kerelaannya. Terima kasih atas doa, cinta, dan motivasinya agar aku selalu menjadi lebih baik.**
- **Kedua orang tuaku, syukur dan terima kasih telah mengantarkan diriku pada kedewasaan**

## **KATA PENGANTAR**

Doa puji syukur, penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan berkat dan kasihNya sehingga dapat menyusun Tesis dengan judul:

### **PERANAN PGRI SEBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN (*INTEREST GROUPS*) DALAM MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN GURU (Studi Kasus Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2004 s/d 2009)**

yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan kelulusan dalam Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tugas belajar saya, terutama kepada :

1. Kepala Departemen Pendidikan Nasional dan seluruh staf, selaku pemberi beasiswa yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas mulai saat seleksi sampai dengan akhir studi.
2. Pemerintah kota Salatiga yang telah memberikan tugas belajar dan dukungan untuk melaksanakan studi.
3. Drs Purwoko,MS, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
4. Drs. Hamid Widodo, M.Pd,selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan hingga tesis ini selesai tersusun.
5. Dr.Reni Windiani,MS, selaku Pembimbing Pendamping yang juga telah banyak membantu dalam proses bimbingan hingga tersusunnya tesis ini.
6. Drs. Turtiantoro, M.Si selaku dosen pembahas/penguji I dan Drs. Muhammad Adnan, MA selaku dosen penguji II atas masukan dan saran-saran perbaikan demi penyempurnaan tesis ini.

7. Pengurus PGRI Jawa Tengah yang telah memberi kesempatan, masukan dalam penyelesaian penelitian ini.
8. Seluruh staf pengajar MIP UNDIP yang telah menyampaikan pengetahuan ilmu .
9. Bagian administrasi MIP UNDIP atas bantuan dan peransertanya yang begitu besar
10. Istri dan anak-anakku, atas kerelaan, motivasi, dan dukungan doanya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan hingga selesainya tesis ini disusun.

Ingin penulis sampaikan bahwa tesis ini belumlah sempurna karena keterbatasan waktu, tenaga, dan kemampuan sumber daya penulis. Namun demikian semoga tesis ini tetap dapat bermanfaat sebagaimana harapan penulis.

Semarang, 16 Desember 2009  
Penulis

BUDIARTO

### **ABSTRAK**

Guru berperan dalam pengembangan sumber daya manusia ironisnya merasa terabaikan kesejahteraannya. Guru lebih sebagai obyek politik, administratif dan birokratis. Keberdayaannya merasa terpasung, kurang diperhatikan dan tidak berkem bang. Inovasi pendidikan telah dilakukan tetapi belum menyentuh upaya perbaiki kesejahteraan secara ideal. Memahami keterbatasan, ketidakberdayaan dalam mengartikulasi kebijakan politik pemerintah, guru membentuk organisasi yang dapat menampung kepentingannya dengan nama; "Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)". PGRI diharapkan menjadi kelompok kepentingan dan penekan bagi guru, Tempat menyalurkan aspirasi kepentingan guru, alat perjuangan menuntut kesejah teraan dan mampu memberikan advokasi hukum. Kini PGRI telah populer, jaringannya luas dan anggotanya banyak, Namun sayang, pengembangan visi dan misi PGRI tidak sebanding lurus dengan kuantitas anggotanya. Lebih ironi lagi banyak Pengurus PGRI yang hanya mengekor program kerja pengurus terdahulu dan tidak

mempunyai inovatif sama sekali. PGRI dinilai kurang produktif ,responsif dan dipandang kurang berperan. Melalui permasalahan itu selanjutnya timbul pertanyaan penelitian : Apa program kerja pengurus PGRI Jawa Tengah sebagai kelompok kepentingan (*Interst groups*) dalam memperjuangkan kesejahteraan guru ?Bagaimana aktivitas/implementasinya dalam memperjuangkan kesejahteraan guru? Dan apa manfaat yang telah diperoleh guru dari hasil perjuangan PGRI?

Tujuan penelitian ini mengetahui program kerja, aktivitas/implementasi pengurus PGRI propinsi Jawa Tengah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru dan manfaat yang diperoleh dari perjuangan PGRI. Dengan berlandaskan pada teori sistem politik, Fungsi Partai politik , Kelompok kepentingan dan penekan saya menganalisis cara penyampaian aspirasi yang dilakukan pengurus PGRI Jawa Tengah. Metode penelitiannya adalah kualitatif diskriptif dengan sumber data pengurus PGRI Jawa Tengah , hasil pustaka dan literatur yang ada pada pengurus PGRI Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan nonprobability sampling dengan teknik purposif dan snowball kepada pengurus PGRI Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisa data dengan menelaah data, mereduksi, mengkategorikan dan validitasi data. Dalam mengecek tingkat validitasnya dilakukan triangulasi sumber dan teknik selanjutnya dilakukan pengujian data dengan cara kredibilitas, keteralihan, kebergantungan dan kepastian

Penelitian ini menunjukkan bahwa PGRI provinsi Jawa Tengah merupakan Kelompok Kepentingan dan penekan bagi para guru yang berjuang mendapatkan perhatian pengembangan profesionalisme dan kesejahteraan dari pemerintah. Dalam memperjuangkan kebijakan PGRI tidak menyalurkan lewat Partai politik namun langsung ke pemerintah, DPR,DPD dan DPRD. PGRI punya pengurus,sekretais bidang, anak lembaga dan badan khusus. PGRI merupakan organisasi yang kuat bisa dilihat dari kekuatan organisasinya, SDM, keuangan dan jumlah anggotanya serta strategi perjuangannya. Hasil perjuangan PGRI sebagian telah bisa dinikmati seperti: pengangkatan CPNS mengutamakan tenaga honorer, pemberian uang makan/TPP, realisasi anggaran pendidikan 20% dari APBN, diterbitkannya UUGD,PP No.74 tahun 2008 yang berdampak pada sertifikasi guru dan bermuara pada kesejahteraan guru walaupun ada yang menyangsikan bahwa kebijakan itu buah karya PGRI. Selanjutnya untuk meningkatkan peran Pengurus PGRI provinsi Jawa Tengah kedepan perlu direkomendasikan bahwa (1)Pengurus PGRI harus pro aktif mensosialisasikan program kegiatannya kepada



para guru, agar mereka tahu bahwa PGRI memang betul bekerja untuk mereka. (2)Pengurus PGRI harus kompak dan diperlukan partisipasi yang aktif antara anggota, pengurus ranting, pengurus cabang dan pengurus daerah. (3)PGRI supaya lebih aktif menjalin komunikasi politik dengan lembaga-lembaga pengambil kebijakan (Pemerintah, DPRD,DPR,DPD, Partai politik maupun lembaga Yudikatif) agar misi perjuangannya dapat tercapai. karena bagaimanapun tanpa adanya komunikasi politik tujuan mulia memperjuangkan kesejahteraan guru tersebut mustahil terwujud.(4) Perlunya partisipasi anggota dalam membesarkan organisasi, hal ini sudah dibuktikan dengan banyaknya iuran yang masuk, namun sampai saat ini masih kurang adanya transparansi manajemen pengelolaan. Untuk itu PGRI Jawa Tengah perlu melakukan pelaporan auditor kepada publik. Keterbatasan penelitian ini.

Kata kunci : PGRI Jawa Tengah, Kelompok kepetingan dan Penekan,  
kesejahteraan Guru

## ABSTRACT

Teachers role to develop human resources, but ironically they are still alienated of wealthy. Teachers are only as politically, administratively and birocratically objects. Their effort is cut lessened of attention and not increasing. Education inovation has been done but it doesn't touch with the ideal growing of wealth. Understanding the limitation weakness in articulation of government's political wisdom. Teachers created the organization to hold the needs name Indonesian teachers unit. PGRI is helped to be the unit for the needs of the teachers. The place for offering the needs of teacher's aspiration, the struggle for reaching the wealth and able to give advocation of low. Now PGRI is populer has large nets for many members. Unfortunately the vision's development and the motivation\mission of PGRI isn't balanced with the amount of the members. Ironically there are many PGRI's members only follow to the seniors without any motivation. PGRI is lessened of productivity, responsive and unrolled.Trough this problem will be performed question about expedation: Is the PGRI's work schedule in central java as interest groups for struggling the wealth of teachers?. How is the activities\implementation in reaching the wealth of teachers. What's the benefit that's got by the teachers from PGRI' s struggle?

The purpose of this expedation is to know the job's schedule \ program, activity / implementation of PGRI's members in central java to reach the wealth of teachers and the benefit that's gotten from the sruggle of PGRI. With the basic in political system, the function of politic party. The needs of unit and the pression of analyses the way to offer the aspiration done by PGRI's members in central java

The expedation's method is discriptive quality wiyh the source data of PGRI's members in central java, the library result and the literature that handled by themembers of PGRI in central java. Getting the sample done by Snow baall for the PGRI commite in central java. Collecting of data done by doing observation, interview and document study. Data analysis with studying data, reduction to classify and data validation. In checking the gradeof validity done by

3 sources and the further technique will be giving the data examining with moving, depending and perfect credibilities.

The expedition shows that PGRI in central java province is as special group and stressing for the teachers who struggled to get the attention of professional development and the wealth from the government. To struggle the wisdom PGRI doesn't do from the politic party but directly done to government, DPR, DPD and DPRD. PGRI has committee, secretary, branch and special body. PGRI is a strong organization that's proved from the power of the organization, SDM, the finance and the amount of organization and the struggle strategy. The result of the PGRI's struggle has been enjoyed a part as : performing the CPNS, specializing the part timer workers. Giving the meal fee / TPP, to realize education cost 20 % from APBN, performing UUGD \ PP No. 74 in the year 2008 that effected in certificating teachers that's sourced from the wealth of teachers though doubted that the wisdom is the job of PGRI. For increasing the role of PGRI's committee in central java in front \ for the future it's necessary to be recommended that ( 1 ) The committee of PGRI have to be pro active for socializing the activities for the teachers in order to know that PGRI is really working for them. ( 2 ) The committee of PGRI have to be united and needing the active participation between members, branch committee and the committee for the region. ( 3 ) PGRI has to be active to communicate with the politic party and with the wisdom picker body ( government, DPRD, DPR, DPD, Politic party or yudicative body) so that the aim of the struggle mission is achieved. because without politic communication the hollymain of the struggle for the well teachers whelp is impossible to reach. ( 4 ) It is very important to participate the member in large the organization it has been proved with the input's fee but up to now there is still lessen of management transparation, done for PGRI in central java it is very important to report auditor to the sociate about the limitation of expedition.

Key words : PGRI in central java the special group and presers teacher whealth.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB     Pendahuluan .....</b>	 <b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1

I	1.1.1 Kesenjangan Guru .....	3
	1.1.2 PGRI sebagai organisasi perjuangan bagi guru .....	4
	1.2. Perumusan Masalah .....	8
	1.3 Tujuan Penelitian .....	9
	1.4. Kegunaan Penelitian.....	10
	1.5. Kerangka Pemikiran.....	10
	1.6. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II</b>	<b>TELAAH PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
II		
	2.1. Sistem Politik .....	15
	28	20
	28	23
	2.2. Kelompok Kepentingan ( <i>Interest Groups</i> ).....	25
	34	31
	2.3. Kelompok Penekan ( <i>Pressure Groups</i> ) .....	31
	40	33
	2.4. Partai Politik .....	37
	51	40
	2.5. Tinjauan tentang PGRI.....	42
	2.5.1 Profil singkat PGRI.....	
	2.5.2 Visi dan Misi PGRI.....	
	2.5.3 PGRI sebagai Serikat Pekerja.....	
	2.5.4 PGRI dalam memperjuangkan kesejahteraan guru....	
	2.6. Definisi Konsep.....	
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
	3.1. Pendekatan Penelitian.....	44
	3.2. Lokasi/Tempat Penelitian.....	45
	3.3. Jenis dan Sumber Data.....	45
	3.4. Populasi dan Sampel Penelitian .....	46
	3.4.1. Populasi .....	46
	3.4.2. Sampel Penelitian .....	46
	3.4.3. Teknik Pengambilan sampel .....	47
	3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	49
	3.6. Teknik Analisa Data .....	51
	3.7. Teknik Pemeriksaan Validitas Data.....	52

<b>BAB IV PERAN PENGURUS PGRI JAWA TENGAH DALAM</b>	<b>55</b>
<b>MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN GURU</b>	
4.1.Kondisi umum pengurus PGRI Propinsi Jawa Tengah masa bhakti XIX (2004-2009)	55
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Pengurus PGRI Jawa Tengah .....	55
4.1.2. Perangkat kelengkapan dan susunan organisasi PGRI Jawa Tengah .....	57
4.1.3. Sumber Keuangan PGRI Jawa tengah dan cara mendapatkannya .....	61
4.2.Anak lembaga PGRI Jawa Tengah .....	63
4.2.1. Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan (YPLP) Dikdasmen PGRI Jawa Tengah .....	63
4.2.2. Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI (YPLP PT PGRI) Jawa Tengah.....	76
4.2.3. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI cabang Jawa Tengah .....	81
4.2.4. Koperasi PGRI Jawa Tengah .....	83
4.2.5. Badan Khusus PGRI Jawa Tengah .....	83
4.3. Program kerja dan kegiatan pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah periode 2004 s/d 2009 .....	89
4.3.1. Program kerja dan aktivitas sekretariat bidang Organisasi dan Kaderisasi .....	90
4.3.2. Program kerja dan aktivitas sekretariat bidang kesejahteraan .....	93
4.3.3. Program kerja ketenagakerjaan .....	95
4.3.4. Program sekretariat bidang Pengembangan karier dan profesi tahun .....	97
4.3.5. Program kerja dan kegiatan sekretariat bidang Pendidikan .....	99
4.3.6. Program kerja dan kegiatan sekretariat bidang Kerokhanian .....	101
4.3.7. Program kerja dan kegiatan sekretaris bidang : Advokasi dan Perlindungan hukum .....	102

4.3.8.	Program kerja dan kegiatan sekretariat bidang Pemberdayaan perempuan .....	106
4.3.9.	Program kerja dan kegiatan sekretariat bidang Pembinaan Kesenian dan Olahraga .....	108
4.3.10.	Program kerja dan kegiatan sekretariat bidang Informasi dan Komunikasi .....	112
4.3.11.	Program kerja dan kegiatan anak lembaga dan badan khusus PGRI Provinsi Jawa Tengah .....	115
4.4.	Hasil – hasil Penelitian .....	119
4.4.1.	PGRI sebagai Kelompok Kepentingan ( <i>Interest Groups</i> ) dan Kelompok Penekan ( <i>Pressure Groups</i> )..	133
4.4.2.	Mekanisme penyampaian aspirasi dan tuntutan kesejahteraan guru yang dilakukan oleh pengurus PGRI Jawa Tengah.....	137
4.4.3.	Hasil-hasil yang dicapai Pengurus PGRI Jawa Tengah dalam memperjuangkan anggotanya .....	143
4.5.	Analisis Hasil Penelitian .....	148
4.5.1.	PGRI merupakan Kelompok Kepentingan ( <i>Interest Groups</i> ) dan Kelompok Penekan ( <i>Pressure Groups</i> )..	148
4.5.2.	PGRI merupakan organisasi yang kuat .....	152
4.5.3.	Tantangan Pengurus PGRI Jawa Tengah di era Reformasi dan sikap politiknya .....	158
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>165</b>
5.1.	Kesimpulan .....	165
	120 .....	168
5.2.	Rekomendasi .....	169
5.3.	Keterbatasan Penelitian .....	170
5.4.	Agenda Penelitian yang akan datang .....	

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Kode Tabel:	Nama Tabel	Hal
Tabel IV.1 :	Daftar nama karyawan di lembaga PGRI Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 .....	59
Tabel IV.2 :	Jumlah sekolah dan murid di bawah naungan YPLP Dikdas men PGRI Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2005 s/d 2008 ....	65
Tabel IV.3 :	Jumlah tenaga kependidikan di bawah naungan YPLP Dikdas men PGRI Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2005 s/d 2008 ....	67
Tabel IV.4 :	Keadaan sekolah YPLP PGRI Jawa Tengah tahun 2008/2009 (status kepemilikan tanah, bangunan, gedung dan murid, guru)	69
Tabel IV-5 :	Rekapitulasi Keadaan sekolah YPLP PGRI Jawa Tengah (status kepemilikan tanah, bangunan, gedung dan murid, guru)	75
Tabel IV-6 :	Daftar fakultas dan jurusan pada IKIP PGRI Semarang di bawah pengelolaan YPLP PT PGRI Jawa Tengah tahun 1990...	78
Tabel IV-7 :	Daftar fakultas dan jurusan pada IKIP PGRI Semarang di bawah pengelolaan YPLP PT PGRI Jawa Tengah tahun 2009 .	79
Tabel IV-8 :	Jumlah dosen, karyawan dan mahasiswa IKIP PGRI Semarang	



	tahun 2009 .....	80
Tabel IV-9 :	Jumlah mahasiswa IKIP PGRI Semarang dari tahun 2004 s/d 2009 .....	80
Tabel IV-10 :	Besar dana duka bagi anggota PGRI yang meninggal .....	84
Tabel IV.11 :	Besar dana pensiun/ pesangon bagi anggota PGRI berdasarkan usia pensiun.....	85
Tabel IV.12 :	Besar dana pensiun/ pesangon bagi anggota PGRI yang masa keanggotaannya kurang dari 10 tahun .....	85
Tabel IV.13 :	Ringkasan Program kerja dan kegiatan pengurus PGRI Jawa Tengah tahun 2006 s/d 2009.....	121
Tabel IV-14 :	Jalinan kerjasama dengan lembaga lain yang dilakukan PGRI Jawa Tengah .....	131
Tabel IV-15 :	Bagan PGRI sebagai Kelompok Kepentingan .....	134
Tabel IV-16 :	Alur kegiatan pengurus PGRI Jawa Tengah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru .....	140

## DAFTAR GAMBAR

Kode	Nama Gambar	Hal
Gambar 1.1.	Tiga jalur perjuangan PGRI Jawa Tengah .....	11
Gambar 1.2	Kerangka Analisis Peranan PGRI Jawa Tengah dalam memperjuangkan Kesejahteraan Guru .....	12
Gambar 2.1	Bagan Sistem Politik menurut pendekatan Easton dan Almond.	17
Gambar 2.2	Mekanisme penyampaian aspirasi guru oleh PGRI kepada Pemerin tah.....	19

Gambar 2.3	Bagan Organisasi Guru pada tingkat Internasional .....	39
Gambar IV-1	Foto PGRI memainkan peran sebagai Kelompok Penekan ( Demo PGRI menuntut disahkannya UUGD.	150
	Foto PGRI memainkan peran sebagai Kelompok Penekan ( Demo PGRI menuntut realisasi anggaran pendidikan sebesar 20%dari APBN/APBD.	151
	Foto PGRI memainkan peran sebagai Kelompok Penekan ( Demo PGRI menuntut disahkannya UUGD.	151
	Foto kunjungan Presiden SBY ke PGRI Jawa Tengah pada Hari Guru Nasional 2009	157
	Foto kunjungan gubernur Jawa Tengah ke PGRI Jawa Tengah pada Hari Guru Nasional 2009	157

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Kode</b>	<b>Nama Lampiran</b>	<b>Hal</b>
Lampiran 1	Hasil Wawancara dengan ketua umum PGRI	174
Lampiran 2	Hasil Wawancara dengan Sekretaris PGRI	190
Lampiran 3	Hasil Wawancara dengan Pengurus PGRI	196

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang Penelitian**

”Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia(Allah)”<sup>1</sup>

Petuah yang sangat bijak yang sering kita dengar, oleh karena itu sama halnya dengan nasib para kaum guru, bila para guru tidak mau berjuang untuk mengubah nasibnya yang lebih baik dalam hal memperjuangkan kesejahteraan annya, mana mungkin akan datang kesejahteraan itu dengan tiba-tiba.

Satu fenomena yang cukup mengejutkan akhir-akhir ini adanya sejumlah guru melakukan aksi/demonstrasi baik di ibu kota maupun daerah – daerah dalam rangka menuntut pembayaran rapel kenaikan gaji, rapel pembayaran fungsional, pembayaran hasil sertifikasi guru, tuntutan anggaran pendidikan sebesar 20% sampai tuntutan untuk diangkat menjadi CPNS karena merasa masa wiyata bhaktinya sudah sangat lama. Belum lagi berbagai permasalahan yang menyelimuti para oknum-oknum guru yang tersandung berbagai kasus hukum yang sangat

---

<sup>1</sup>*Qur'an, Surat. Ar-Ra'd* 13 :11, Dep. Agama Republik Indonesia

memerlukan upaya pembelaan (advokasi ). Komentarpun bermunculan dalam berbagai ragam, corak yang bersifat mendukung, menyesalkan, ada yang sinis dan acuh tak acuh, atau mungkin menilai dengan bermacam-macam tudingan seperti; ditunggangi, dikendalikan oleh sekelompok elit politik, untuk mendukung kekuatan partai tertentu dan sebagainya.

Terhadap berbagai wacana tersebut memang merupakan hak semua orang yang berkomentar menurut versinya masing – masing tetapi paling tidak semua kegiatan itu merupakan bentuk perjuangan untuk menuntut nasibnya agar diperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintah.

Guru melakukan aksi/demonstrasi sangat kurang tepat, sebab hal itu tidak sesuai dengan tuntutan kepribadian atau jatidiri guru. Jatidiri guru adalah guru sebagai figur panutan yang harus selalu bersikap ramah, penuh kasih sayang, penyabar, tempat menimba ilmu dan sumber nilai-nilai normatif. Dilihat dari sisi itu, memang demikian seharusnya, tetapi disisi lain perbuatan itu sebagai suatu kewajiban. Guru adalah manusia biasa dengan segala tuntutan kehidupan seperti layaknya. Justru apa yang diperjuangkan sesungguhnya untuk mewujudkan fungsinya sebagai tenaga yang profesional, sebagai manusia manakala harga dirinya tersentuh, mendapatkan perlakuan yang kurang adil siapapun akan bangkit

dalam bentuk tindakan-tindakan yang kadang-kadang dinilai kontradiktif dari fungsinya.

Guru beraksi merupakan upaya memperjuangkan keadilan untuk membela hak dan martabatnya dan meningkatkan derajat kaumnya. Sesungguhnya apa yang nampak itu hanyalah sebagian kecil permasalahan dari suatu permasalahan besar yang telah dirasakan para guru. Permasalahan besar itu adalah kondisi kekecewaan yang telah terpendam dalam kurun waktu yang lama.

#### **1.1.1 Kesenjangan Guru**

Keadilan dan kesejahteraan guru dalam arti; imbal jasa, rasa aman, kondisi kerja dan kepastian karir masih terasa dalam suasana kesenjangan. Ada sejumlah kesenjangan yang mereka rasakan sebagai perlakuan diskriminatif, antara lain: Kesenjangan antara guru dengan birokratnya, dimana para birokrat memperoleh tunjangan struktural dan fasilitas lainnya sedangkan guru tidak ada fasilitas lain. Kadangkala birokratnya memperlakukan guru sebagai bawahan dengan jarak yang kaku dan harus tunduk segala-galanya.

Kesenjangan antara guru dengan dosen, karena dosen memperoleh tunjangan fungsional yang begitu lumayan dan kesempatan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang begitu mudah sedangkan guru hanya mendapatkan

sekedar tunjangan tenaga kependidikan dan minimnya fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan SDM-nya. Hal ini bisa dibuktikan dengan minimnya ketersediaan dan kesempatan memperoleh beasiswa pendidikan studi lanjut. Kesenjangan antara guru yang digaji negara dengan guru yang digaji swasta/guru honorer dengan guru pegawai tetap, pada hal tuntutan dan beban mengajar tidak kalah berbeda. Kesenjangan antara guru yang mengajar di kota dan yang mengajar di desa, terutama dalam hal pendapatan, fasilitas, dan kesempatan mengembangkan diri.

Bentuk kesenjangan lainnya yaitu minimnya penghasilan yang diterima guru dibandingkan tuntutan kerja dan harapan ideal watak kepribadian seorang guru yang harus pandai-pandai membawa diri di lingkungan kerjanya membuat guru tidak berdaya, sehingga sering terjadi keputusasaan dan rentan terjadinya penyimpangan perilaku. Akibat banyaknya kesenjangan, perasaan diskriminatif yang terakumulasi tentu dapat menambah timbunan kekesalan emosional, sehingga menimbulkan frustrasi dan stres bagi guru itu sendiri. Walaupun sudah ada program sertifikasi bagi guru yang diharapkan dapat menambah penghasilan kesejahteraan, namun pada kenyataannya program sertifikasi tersebut banyak sekali hambatan, sehingga program tersebut sangat lambat.

Siapapun sependapat bahwa guru memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, namun dalam kenyataannya guru tetap terabaikan dalam perwujudan keberdayaannya sebagai insan pendidikan. Guru lebih banyak diperlakukan sebagai obyek administratif dan birokratis, sehingga keberdayaannya sebagai insan pendidikan selalu terpasung dan tidak berkembang. Berbagai upaya inovasi pendidikan telah banyak dilakukan melalui perbaikan sarana prasarana, peraturan, kurikulum, dan sebagainya, tetapi belum menyentuh upaya perbaikan kesejahteraan guru sebagai pelaksana di tingkat instruksional.<sup>2</sup>

### **1.1.2 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi perjuangan bagi guru**

Memahami keterbatasan dan ketidakberdayaan guru dalam mengartikulasi setiap kebijakan politik dari pemerintah, guru memandang perlu untuk membentuk suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi kepentingannya. Organisasi yang dibentuk oleh guru tersebut bernama; "Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)". PGRI lahir seratus hari setelah proklamasi kemerdekaan

---

<sup>2</sup> Muhamad Suryo, *Percikan Perjuangan Guru ;( Guru ; Dalam Kenyataan )*, Semarang: CV.Aneka Ilmu, 2003, hlm.239.

Republik Indonesia, di Surakarta, 25 November 1945. Tujuan utama PGRI adalah membela dan mempertahankan Republik Indonesia (organisasi perjuangan), memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasar kerakyatan (organisasi profesi) karena pendirian PGRI berdasar prinsip pelayanan dan perjuangan sesuai prinsip "*Education as public service, not commodity*", membela hak kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi kaum buruh pada umumnya dan nasib guru pada khususnya (organisasi ketenagakerjaan).<sup>3</sup> Tentunya tujuan tersebut merupakan hal yang sangat mulia namun seiring perjalanan waktu dan perkembangan zaman keinginan mulia tersebut tidak dapat semuanya dicapai.

Sebagai organisasi perjuangan, PGRI merupakan tempat bagi guru dalam memperoleh, mempertahankan, meningkatkan dan membela hak asasinya baik sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat maupun sebagai warga negara. PGRI diharapkan konsisten dalam memperjuangkan kesejahteraan lahir batin baik materi maupun non materi sehingga para guru mendapatkan kepuasan kerja, imbalan jasa yang memadai, rasa aman dalam bekerja, lingkungan kerja yang kondusif.

Sebagai organisasi profesi, PGRI sebagai tempat kebersamaan dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan profesinya, menetapkan standar

---

<sup>3</sup> Tri Hayat Aribowo, "*PGRI di Tahun Baru*", [aryasadewa@yahoo.com](mailto:aryasadewa@yahoo.com) .down load, 26 Januari 2009.



perilaku profesional, melindungi anggotanya, meningkatkan kualitas kesejahteraan, mengembangkan kualitas pribadi dan profesi.

Sebagai organisasi ketenagakerjaan, PGRI merupakan wadah perjuangan hak-hak asasi guru sebagai pekerja. Guru sebagai tenaga profesional memerlukan jaminan kepastian kesejahteraan dan perlakuan hukum. Kesejahteraan mengandung arti kondisi kehidupan yang utuh, seimbang dan wajar dalam hal imbalan jasa, rasa aman, hubungan antar pribadi, kondisi kerja dan kesempatan mengembangkan karir.<sup>4</sup>

Catatan sejarah menunjukkan, bahwa perjalanan organisasi PGRI selama masa orde baru diperalat oleh kaum birokrat. PGRI terjerumus dalam arena politik praktis (masuk dalam perangkat lingkaran politik Golkar) menjadikannya tidak lagi konsentrasi dalam bidang pendidikan.

Sehingga pada tahun 2003 diadakan kongres di Semarang dengan harapan bahwa PGRI akan kembali ke khitahnya. Terutama untuk kembali menampilkan sifat organisasinya sebagai organisasi perjuangan, ketenagakerjaan dan organisasi profesi yang bersifat unitaristik dan nonpolitik praktis.

Semangat kongres di Semarang adalah harapan baik bagi kemajuan PGRI Jawa Tengah, namun dalam perjalanan akhir-akhir ini patut dipertanyakan sifat

---

<sup>4</sup> M.Rusli Yunus, *Perjalanan PGRI 1945-2003*, Jakarta : PB PGRI bekerja sama Direktorat Pend. Dasar dan Menengah, 2003, hlm.100.

Non politik praktisnya, karena elit pimpinan PGRI Jawa Tengah selalu ikut pertarungan dalam kancah perebutan jabatan politis di Pemerintahan. Sebut saja misalnya Sudharto (Ketua umum PGRI Jawa Tengah) telah berhasil menduduki kursi DPD mewakili Jawa Tengah periode 2004 s/d 2009.

Kini kedudukan DPD digantikan oleh generasi penerusnya Sulistyo yang tiada lain sebagai Sekretaris PGRI Jawa Tengah juga. Keberhasilan yang di capai elit PGRI Jawa Tengah tersebut diakui atau tidak merupakan dukungan kuat dari para anggotanya. Keberhasilan yang dicapai para elit pimpinan PGRI Jawa Tengah tersebut rupanya masih ingin diulang oleh Sudharto untuk maju sebagai kandidat Wakil Gubernur yang berpasangan dengan Sukawi Sutarif yang diusung oleh Partai Demokrat di tahun 2008. Alasan yang dikemukakan oleh Sudharto dalam pencalonan, bahwa mereka maju sebagai kandidat bukan atas kemauannya sendiri, namun dilamar oleh Partai PKS selanjutnya meminta dukungan dari PGRI Jawa Tengah. Berikut bukti alasan Sudharto maju sebagai kandidat wakil Gubernur ;

”SETELAH terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah Sudharto, kini melangkah ke ajang Pemilihan Gubernur Jateng. Sudharto yang didukung Partai Keadilan Sejahtera, berpasangan dengan Sukawi Sutarip, Ketua DPD Partai Demokrat Jateng. Berbekal pengalaman organisasinya yang cukup banyak, Sudharto maju sebagai wakil gubernur. Ia mengaku bukan kekuasaan maupun harta yang mendorongnya maju dalam Pilgub Jateng 2008. Berikut hasil wawancara dengan Sudharto beberapa waktu lalu.

Apa yang mendorong Anda ikut maju ke Pilgub Jateng?

Jawab :

Ini keputusan organisasi. Sejak 2005, kami (PGRI) mengambil model perjuangan yang baru, mengambil peran politik. Saya ditugasi organisasi masuk ke model perjuangan ini. Ini bukan politik praktis. Dalam AD/ART kami, makna politik praktis jika menjadi anggota partai politik, terikat. Kami tidak terikat dengan partai dalam arti ikatan permanen.

Apa alasan utama Anda memilih Sukawi Sutarip?

Jawab:

Di sekian banyak orang (calon) yang mendekati kami, yang pasti dicalonkan partai dan kemudian mau memenuhi keinginan-keinginan organisasi yang diputuskan sejak tahun 2005 di Konferensi Kerja PGRI di Purwokerto, adalah Pak Sukawi. Oleh karena itu, organisasi memutuskan saya berpasangan dengan Pak Sukawi.

Misi PGRI sangat besar, sementara peran wakil gubernur terbatas. Apa ada perjanjian khusus Anda dengan Sukawi jika terpilih nanti?

Jawab :Saya ingin, dan saya sudah ada kesepakatan dengan Pak Sukawi, masalah-masalah pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan sebagainya, telaahannya saya yang menangani. Tentu pengambilan keputusan ada pada beliau.<sup>5</sup>.....

Dengan alasan yang diplomatis tersebut rupanya Sudharto berharap ingin mengulang sukses seperti ketika maju sebagai kandidat DPD tahun 2004 lalu, namun sayang impiannya kandas, rupanya anggota PGRI sudah sangat cerdas dalam menentukan pilihan. Anggota PGRI memahami betul mana yang patut didukung dan mana yang tidak perlu didukung. Sebenarnya ada sebuah harapan yang patut didukung oleh semua anggota dan *stakeholder* adalah harapan dan kepercayaan yang disematkan kepada Pengururs PGRI untuk terus berjuang demi kesejahteraan guru.

## 1.2 PERUMUSAN MASALAH

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sdr. Sudharto dengan IKA IKIP PGRI, Semarang, Juli 2008, [www.PGRI.Co.Id](http://www.PGRI.Co.Id)

Sebagai wadah persatuan guru, PGRI diharapkan menjadi pemersatu guru, sebagai wadah penyalur aspirasi kepentingan guru, sebagai alat perjuangan dalam menuntut kesejahteraan dan sebagai lembaga yang diharapkan mampu melindungi kepentingan guru dalam ranah advokasi hukum diseluruh tanah air Indonesia. Dengan adanya undang - undang sistem pendidikan nasional dan undang – undang guru dan dosen setidaknya semakin menguatkan peran organisasi ini dari mulai tingkat nasional, propinsi, kabupaten, dan kecamatan.

Dengan jaringannya yang begitu luas dan banyak, menjadikan organisasi PGRI mengakar di Indonesia. Namun sayang, pengembangan visi dan misi PGRI tidak sebanding lurus dengan kuantitas anggotanya. Lebih ironi lagi banyak PGRI yang hanya mengekor program kerja pengurus terdahulu ataupun bahkan tidak mempunyai inovatif sama sekali. Inilah yang menjadi tantangan kedepan bagi PGRI.

Pertanyaan yang sering muncul, “Apa yang diketahui oleh guru tentang program kerja PGRI?” Apa yang di dapatkan guru bila menjadi anggota PGRI?. Para guru sering menggerutu dengan pertanyaan itu, karena guru tidak pernah tahu program kerja PGRI atau mungkin belum tahu keberadaan PGRI atau kemungkinan juga tidak mau tahu tentang program – program kerja PGRI karena

merasa tidak mendapatkan sesuatu secara langsung dari PGRI, ironisnya gaji mereka selalu dipotong demi iuran PGRI.

Dalam hal pembelaan (advokasi) hukum, guru-guru merasa belum pernah atau tidak pernah diperjuangkan. Ini menunjukkan banyak guru yang menjadi anggota PGRI merasa belum diperjuangkan kepentingannya atau mungkin tidak terakomodir kepentingan mereka. Berdasarkan asumsi-asumsi diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa program kerja pengurus PGRI Jawa Tengah sebagai kelompok kepentingan (*Interst groups*) dalam memperjuangkan kesejahteraan guru ?
2. Bagaimana aktivitas/implementasi pengurus PGRI Jawa Tengah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru?
3. Apa manfaat yang telah diperoleh guru dari hasil perjuangan PGRI?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- (1) Mengetahui program kerja pengurus PGRI propinsi Jawa Tengah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru.
- (2) Mengetahui aktivitas/implementasi pengurus PGRI propinsi Jawa Tengah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru.

(3) Mengetahui manfaat yang telah diperoleh guru dari hasil perjuangan PGRI.

#### **1.4 KEGUNAAN PENELITIAN**

Hasil penelitian dan kajian ini di harapkan :

(1) Secara praktis penelitian ini memberikan masukan bagi pengurus PGRI propinsi Jawa Tengah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru-guru di lingkungan kerjanya.

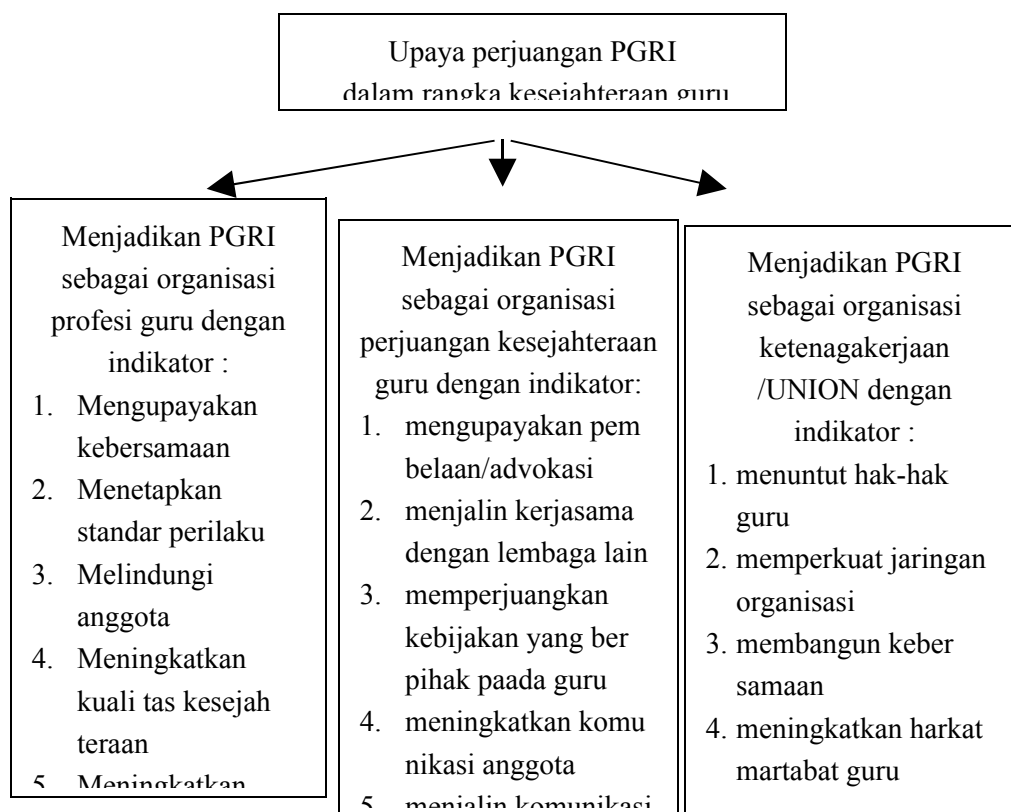
(2) Secara akademis, penelitian diharapkan memberikan gambaran kepada pembaca umumnya dan para guru khususnya tentang : (1) program kerja pengurus PGRI propinsi Jawa Tengah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru (2) ktivitas/implementasi pengurus PGRI propinsi Jawa Tengah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru.(3) manfaat yang telah diperoleh guru dari hasil perjuangan PGRI.

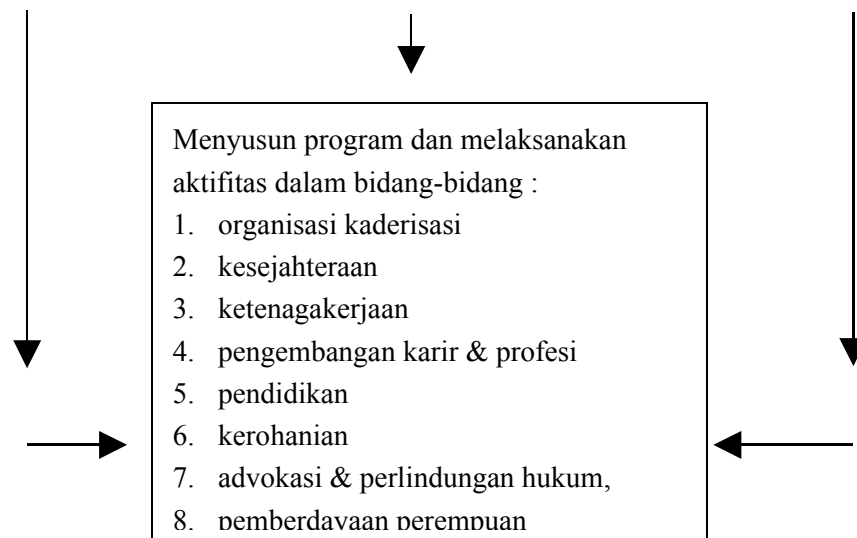
#### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Lahirnya kebijakan yang berdampak pada kepentingan dunia pendidikan pada umumnya dan kesejahteraan guru pada khususnya dibutuhkan sistem politik dan lembaga/wadah organisasi yang memperjuangkan kepentingannya. Memahami keterbatasan dan ketidakberdayaan guru dalam mengartikulasi setiap kebijakan politik pemerintah, guru memandang perlu membentuk organisasi yang

dapat menampung aspirasi kepentingannya. Organisasi yang dibentuk guru tersebut bernama; "Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)". Keberadaan PGRI dapat diasumsikan sebagai Kelompok Kepentingan dari guru-guru dan dunia pendidikan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tetapi dalam upaya memperjuangkan sebuah kebijakan, PGRI terkadang memposisikan sebagai kelompok penekan pula. Program kerja dan kegiatan pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah dapat dianalisa melalui bagan alur sebagai berikut :

Gambar : 1.1  
Tiga jalur perjuangan PGRI Jawa Tengah





Sumber : Visi dan misi PGRI

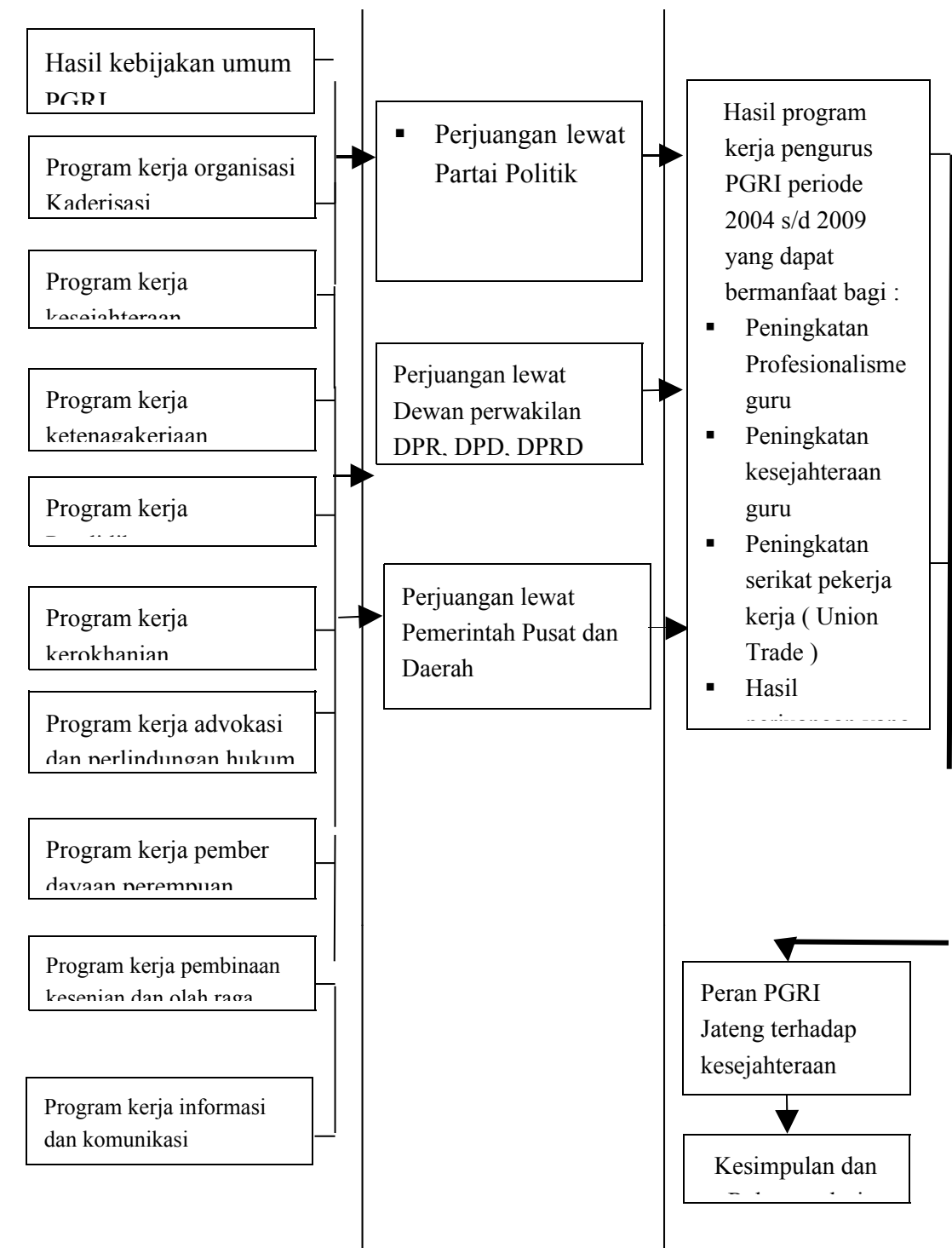
Pengelompokan tiga misi perjuangan tersebut diperjuangkan agar menjadi kebijakan yang memihak guru dengan alur sebagai berikut :

**Gambar : 1.2**

Kerangka analisis : Peranan PGRI Jawa Tengah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru

INPUT	PROSES	OUTPUT
-------	--------	--------





Sumber : Hasil analisis peneliti



## **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam tesis ini dipaparkan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan latar belakang permasalahan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi / kegunaan penelitian, Kerangka pikir dan outline tesis.

### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menjabarkan tentang landasan teori yang memuat sistem politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, partai politik. Tinjauan tentang PGRI menjabarkan profil singkat PGRI, Visi dan misinya, PGRI sebagai serikat pekerja dan PGRI dalam memperjuangkan kesejahteraan guru serta definisi operasional dari penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menyajikan tentang metode penelitian yang berisi tentang lokasi/tempat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV PERAN PENGURUS PGRI JAWA TENGAH DALAM MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN GURU**

Bab ini menguraikan hasil analisis data. Hasil analisa data memuat kondisi umum obyek penelitian yang berisi sejarah dan perkembangan pengurus PGRI Propinsi Jawa Tengah. Perangkat kelengkapan dan susunan organisasi PGRI Propinsi Jawa Tengah. Sumber keuangan PGRI Jawa Tengah dan cara mendapatkannya. Anak Lembaga PGRI Jawa Tengah berisikan YPLP Dikdasmen PGRI Jawa Tengah, YPLP PT PGRI Jawa Tengah, LKBH PGRI provinsi Jawa Tengah, Koperasi PGRI Jawa Tengah. Badan Khusus PGRI Jawa Tengah terdiri dari Forum Komunikasi dan Pengembangan Profesi Guru, Badan Penerbitan PGRI Jawa Tengah. Program Kerja dan Kegiatan Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah periode 2004 s/d 2009. Hasil-hasil Penelitian meliputi PGRI sebagai Kelompok Kepentingan (*Interest Groups*) dan Kelompok Penekan (*Pressure groups*), Mekanisme penyampaian dan tuntutan kesejahteraan guru yang dilakukan PGRI Jawa Tengah, Hasil yang di capai Pengurus PGRI Jawa Tengah. Analisis hasil Penelitian berisi PGRI merupakan Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan, PGRI merupakan Organisasi yang kuat, Tantangan Pengurus PGRI Jawa Tengah di era reformasi dan sikap politiknya.

## **BAB V    PENUTUP**

Pada bab ini dirumuskan kesimpulan hasil penelitian yang didasarkan pada hasil temuan dan analisis. Rekomendasi yang merupakan usulan tindak lanjut atas peranan PGRI sebagai kelompok kepentingan (*interest groups*) dalam memperjuangkan kesejahteraan guru (studi kasus pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah periode 2004 s/d 2009), Keterbatasan Penelitian dan Harapan Penelitian yang akan datang.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Sistem Politik**

Sistem politik ialah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit / kesatuan, kesatuan tersebut bisa diartikan masyarakat / negara.<sup>6</sup> Sedangkan Gabriel A. Almond menyatakan bahwa sistem

---

<sup>6</sup> Rusadi Kantaprawira, *Sistem politik Indonesia*, dalam Dep. Pend. Nasional, *Materi PKn SMP*, Jakarta: 2005, hlm ; 31.

politik merupakan organisasi melalui mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka.<sup>7</sup>

Dewasa ini dalam mempelajari sistem politik ada dua perwujudan pendekatan sistem, yakni ; teori analisis sistem yang di kembangkan oleh David Easton dan teori struktural-fungsional yang dikembangkan oleh Gabriel Almond.<sup>8</sup> Teori analisis sistem berasumsi bahwa setiap sistem memiliki sifat (1) terdiri dari banyak bagian-bagian; (2) bagian-bagian saling berinteraksi dan ketergantungan ; (3) sistem itu mempunyai perbatasan yang memisahkannya dari lingkungan yang terdiri dari sistem-sistem lainnya juga.

Selanjutnya Easton memberikan definisi sistem politik adalah bagian dari sistem sosial yang menjalankan (a) alokasi nilai-nilai (berbentuk keputusan-keputusan/kebijakan-kebijakan), (b) dialokasikan dengan kekuasaan yang sah, selanjutnya c) mengikat seluruh masyarakat.

Dalam masyarakat modern, otorita/kekuasaan yang sah tadi memiliki wewenang yang sah untuk menggunakan kekuasaan dan paksaan berbentuk negara. Teori struktural-fungsional yang dikembangkan oleh Gabriel Almond

---

<sup>7</sup> Gabriel A. Almond ,1978.*Comparative Politic*.dalam Mohtar Mas' oed, *Perbandingan system politik*, Yogyakarta : Gajah Mada University pres, 2006, hlm.23

<sup>8</sup> Mohtar Mas' oed, *ibid*,hlm.xii

berasumsi bahwa setiap sistem politik harus terdapat fungsi-fungsi demi berlangsungnya sistem politik itu sendiri.

Secara umum, ciri yang dimiliki sistem politik ialah adanya fungsi-fungsi politik dan struktur politik. Fungsi-fungsi politik dalam sistem politik dibagi dalam dua bagian, yakni; fungsi input berupa ; artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik dan rekrutmen politik , fungsi output, yaitu ; pembuatan, penerapan dan penghakiman kebijakan. Struktur politik diartikan suatu interaksi yang dianggap sah, tujuannya mempertahankan dan memelihara tata masyarakat.<sup>9</sup>

Sistem politik dilaksanakan melalui struktur politik/ lembaga politik. Lembaga politik dibedakan antara supra-struktur politik dan infra-struktur politik. Supra- struktur politik merupakan lembaga politik yang berfungsi menjalankan mesin politik secara formal / lembaga-lembaga resmi pemerintahan negara.

Supra-struktur politik berupa (badan legislatif, eksekutif dan badan peradilan.). Supra-struktur politik di Indonesia pelaksanaannya bisa melibatkan lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah. Infrastruktur politik berperan sebagai mesin politik informal . Sumbernya dari

---

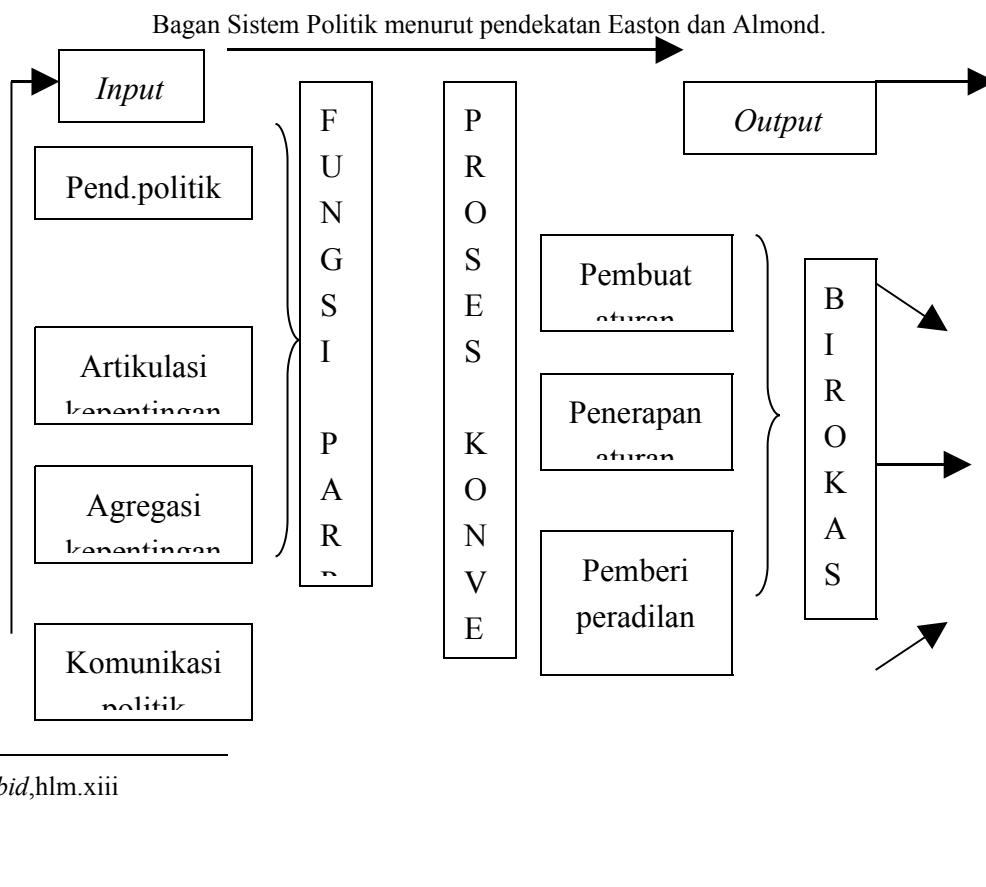
<sup>9</sup> Mohtar Mas'ood, *ibid*, hlm. xiii

kekuatan riil masyarakat yang meliputi ; partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, lembaga swadaya (LSM) dan media massa .

Proses politik dalam sistem politik menurut pendekatan yang dikembangkan oleh Easton dan Almond dapat dijelaskan sebagai berikut :

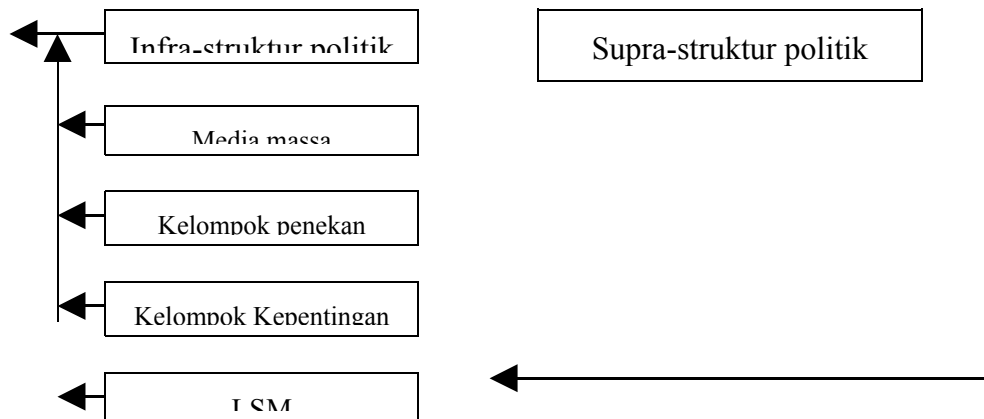
”Proses politik berawal dari masukan input yang berupa ; kepentingan yang diartikulasikan / dinyatakan oleh kelompok kepentingan, diagregasikan, dipadukan oleh partai politik sehingga menjadi suatu kebijakan yang bersifat umum, selanjutnya dimasukkan dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif. Input tadi diubah menjadi output berupa kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan oleh birokrasi, kesungguhan pelaksanaan ini di jamin dan diawasi oleh fungsi penghakiman yang dijalankan oleh fungsi peradilan. Demikian proses tersebut berjalan, dari input berupa tuntutan kepentingan diubah menjadi output, dan memulai proses baru lagi menjadi input.”<sup>10</sup>

Gambar 2. 1



<sup>10</sup> Ibid, hlm. xiii





Sumber: Rusadi Kantaprawira, "Sistem Politik Indonesia".

Keterangan :

Proses politik berawal masuknya *input* yang diperankan oleh infra-struktur politik. Proses konversi berlangsung di dalam lembaga politik / struktur politik yang berkedudukan sebagai supra-struktur politik. *Output* dari sistem politik berwujud peraturan ( perundang-undangan ) yang dilengkapi sanksinya. Pelaksanaan *output* di jalankan oleh birokrasi pemerintahan. *Output* politik akan diterima masyarakat sebagai umpan balik, dan selanjutnya menjadi *input* lagi.

Mengacu pada bagan sistem politik diatas, penulis berasumsi bahwa PGRI sebagai kelompok kepentingan dari guru-guru dan dunia pendidikan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut :

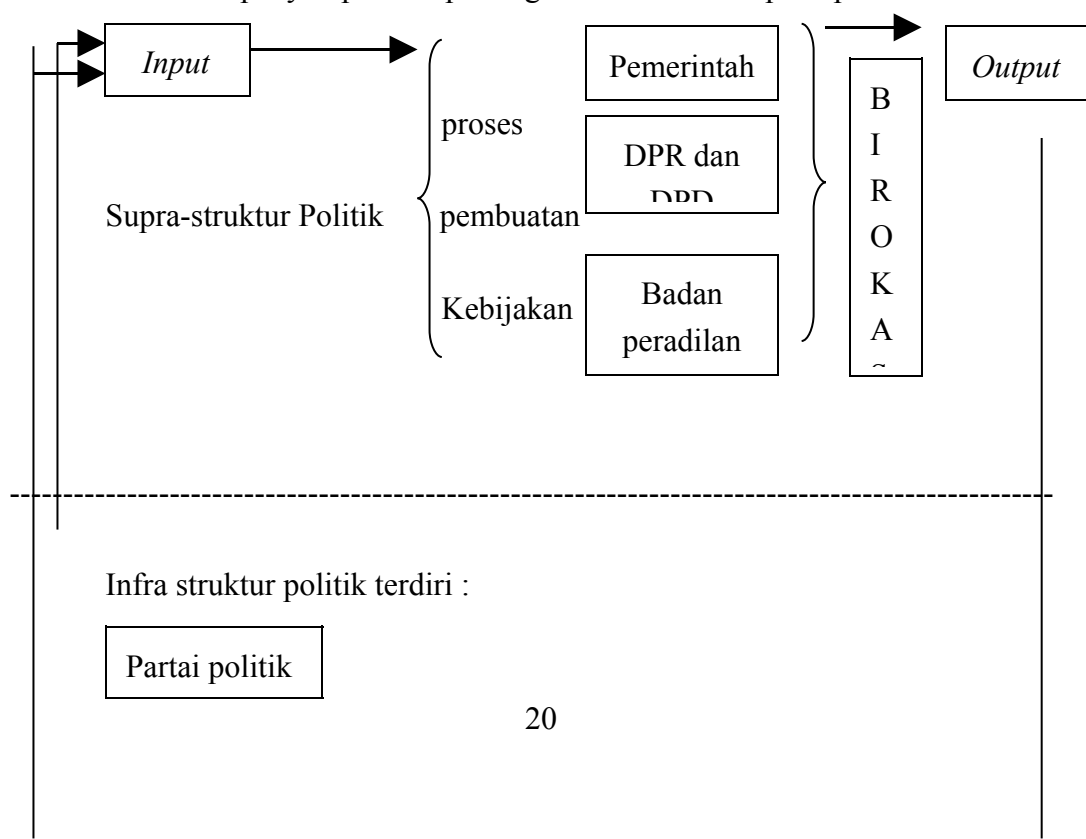
Keinginan, harapan, keluhan dan semua permasalahan yang di hadapi guru dan dunia pendidikan dirumuskan sebagai masukan (*input*) yang diartikulasikan

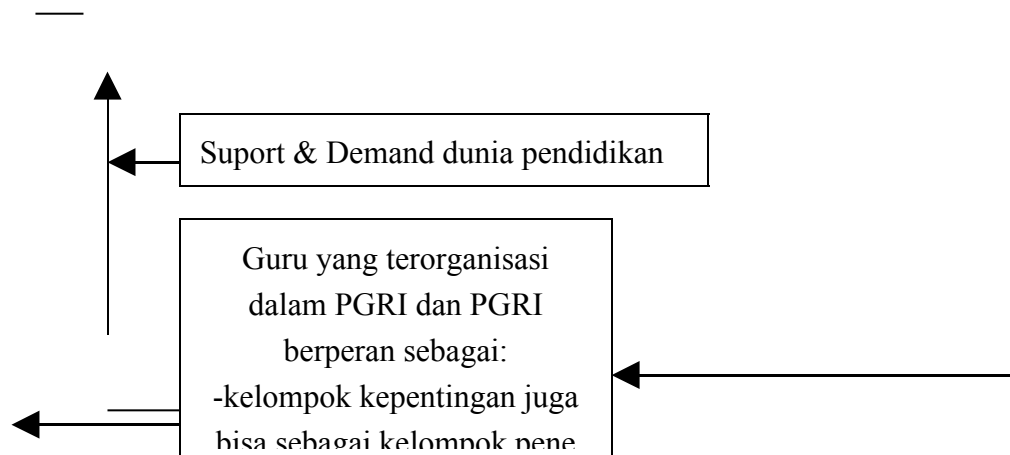
atau dinyatakan oleh kelompok kepentingan (PGRI) kemudian diintegrasikan, dipadukan oleh partai politik sehingga menjadi suatu kebijakan yang bersifat umum, selanjutnya dimasukkan dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden).

Input tadi diubah menjadi output berupa kebijakan yang berpihak pada kepentingan guru dan dunia pendidikan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan oleh birokrasi, kesungguhan pelaksanaan ini dijamin dan diawasi oleh fungsi penghakiman yang dijalankan oleh fungsi peradilan. Demikian proses tersebut berjalan, dari input berupa tuntutan kepentingan guru dan dunia pendidikan diubah menjadi output berupa kebijakan yang berpihak pada kepentingan guru dan dunia pendidikan dan memulai proses baru lagi menjadi input.

Gambar 2. 2

Mekanisme penyampaian aspirasi guru oleh PGRI kepada pemerintah .





Keterangan :

Usulan pemikiran dari guru sebagai anggota masyarakat berupa permintaan dan dukungan disampaikan oleh PGRI sebagai kelompok kepentingan kepada partai politik, atau bisa langsung ke DPR dan DPD. Usulan berupa input kebijakan tersebut oleh wakil partai politik diproses didalam DPR / dewan bersama pemerintah dan akhirnya disetujui presiden selaku pemerintah keluarlah sebagai output / kebijakan pemerintah. Output berupa kebijakan pemerintah dilaksanakan oleh birokrasi. Pelaksanaan kebijaksanaan tersebut diawasi oleh fungsi penghakiman yang dijalankan oleh fungsi peradilan

## 2.2. Kelompok Kepentingan (*Interest Groups*)

Istilah kelompok kepentingan muncul pertama kali pada awal abad ke – 19. Kelompok kepentingan lebih bebas dibandingkan partai politik, karena tidak berjuang mencari kursi di parlemen. Kelompok kepentingan (*Interest groups*)

mengandung arti sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan.<sup>11</sup> . Kelompok kepentingan juga diartikan organisasi yang berusaha mempengaruhi suatu kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya<sup>12</sup> .

Kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada upaya mengartikulasikan kepentingan tertentu yang ditujukan kepada pemerintah. Mereka berharap pemerintah menyusun kebijakan yang memihak kelompoknya. Keanggotaannya berasal dari golongan-golongan yang merasa tertindas atau terpinggirkan atas kebijakan-kebijakan dari elit politik. Mereka punya tujuan utama ingin memperbaiki nasib mereka , terutama bidang ekonomi. Contohnya PGRI, PWI, IDI dan sebagainya. Dasar perjuangan dari kelompok kepentingan adalah protes dan sikap kritis terhadap cara-cara berpolitik dari para politisi dan pejabat. Hal ini dilandasi perasaan terasingkan atau terpinggirkan.

Kelompok kepentingan menginginkan desentralisasi dari kekuasaan dan partisipasi dalam peningkatan swadaya masyarakat. Kelompok ini selalu berinteraksi dengan badan eksekutif namun tetap memposisikan kedudukannya

---

<sup>11</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 1992, hlm. 109

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.,2008, hlm. 383

sebagai organisasi yang otonom terhadap negara. Cara kerja kelompok kepentingan tidak menggunakan tekanan-tekanan atau paksaan, tetapi melalui hubungan ke dalam (*lobbying*) serta jaringan kerja (*net working*) yang intensif tetapi persuasif.

Bila cara-cara diatas tidak berhasil kadangkala juga menggunakan cara-cara lebih keras seperti ; demonstrasi, unjuk rasa dan pemogokan kerja. Kalau cara-cara kekerasan ini ditempuh maka tidak bisa lagi dinamakan kelompok kepentingan, namun lebih tepat disebut kelompok penekan. Ciri lain organisasi ini punya jaringan luas, tidak hanya di dalam negeri bisa juga di luar negeri. Di lain pihak organisasi ini dapat dimanfaatkan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat serta dijadikan alat kontrol dan penyalur aspirasi selain lewat partai politik.

Klasifikasi kelompok kepentingan terdapat berbagai tipe, antara lain sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan jenis kegiatannya.

Dilihat dari jenis kegiatannya dikenal bermacam-macam kelompok kepentingan seperti kelompok profesi, okupasi, kepemudaan, kelompok kewanitaan, kelompok pecinta lingkungan hidup.

- 2) Berdasarkan lingkungan kepentingan yang diartikulasikan dikenal kelompok

Kepentingan yang memperjuangkan kepentingan kalangan terbatas, seperti ; petani dengan wadah organisasinya HKTI, organisasi guru terhimpun dalam PGRI, organisasi bagi anggota pegawai negeri terakomodasi dalam KORPRI, organisasi profesi dokter menghimpun dalam IDI dan masih banyak organisasi profesi lainnya. Ada pula kelompok kepentingan yang berlingkup luas. Anggotanya tidak terbatas bagi golongan tertentu saja, contohnya ; lembaga bantuan hukum (LBH), lembaga perlindungan konsumen (YLKI).

- 3) Berdasarkan gaya, metode dan cara mengajukan kepentingannya.

Berdasar gaya, metode dan cara mengajukan kepentingan, Gabriel A.Almound membedakan kelompok kepentingan menjadi empat bentuk , antara lain

- a. Kelompok kepentingan anomik (kelompok yang identitasnya kurang jelas). Kelompok yang mengajukan kepentingannya secara spontan dan berorientasi pada tindakan segera. Cara-cara yang dipakai untuk memperjuangkan kepentingannya dilakukan dengan demonstrasi, pemogokan atau hura-hura.

b. Kelompok kepentingan non-asosiasi.

Kelompok kepentingan yang terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan untuk diperjuangkan (kegiatan yang bersifat temporer) sehingga begitu selesai memperjuangkan kepentingannya secara bersama-sama, kelompok ini akan bubar dengan sendirinya.

Contoh : suku, ras, kedaerahan. Dalam memperjuangkan kepentingannya, dilakukan pendekatan informal.

c. Kelompok kepentingan institusional

Kelompok kepentingan yang muncul dalam lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Fungsinya bukan mengartikulasikan kepentingan secara umum. Kelompok ini menduduki posisi-posisi yang sangat penting sehingga punya pengaruh yang sangat besar terhadap pengambilan suatu kebijakan.

Kelompok ini juga cenderung melayani kepentingannya sendiri.

Contoh : kelompok-kelompok dalam tubuh angkatan bersenjata, birokrasi dan partai politik.

d. Kelompok kepentingan asosiasional.

Kelompok kepentingan yang berfungsi mengartikulasikan kepentingan kelompoknya. Kelompok ini terorganisasi dengan baik, menjalin hubungan dengan anggota-anggotanya secara terus menerus dan menjalin hubungan antar-anggota dan hubungan dengan pemerintah. Contohnya ; kamar dagang dan industri (Kadin), serikat pekerja (SPSI), serikat pekerja guru (PGRI), himpunan petani (HKTI), ikatan dokter indonesia (IDI).<sup>13</sup>

### **2.3 Kelompok Penekan (*Pressure Groups*)**

Kelompok penekan adalah kelompok yang melakukan tekanan / kritikan atas kekuasaan yang sedang berjalan. Kelompok ini bertindak untuk mempengaruhi kekuasaan, tetapi tidak langsung mengambil bagian dalam kekuasaan tersebut.<sup>14</sup> Perbedaan kelompok penekan dengan kelompok kepentingan terletak pada cara dan sasaran, yakni caranya dengan memberikan tekanan kalau perlu paksaan sedangkan sasarannya ialah tuntutannya harus terpenuhi.<sup>15</sup>

Kelompok penekan (*Pressure Groups*) dapat digolongkan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Gabriel A. Almond. 1978. *Comparative Politics*. dalam Mohtar Mas' oed, *loc.cit.*, hlm. 55.

<sup>14</sup> Duverger, Maurice. *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, Jakarta , 1984, Bina Aksara.

<sup>15</sup> Ramlan Surbakti, *op.cit.*, hlm. 109.



- a. Kelompok penekan eksklusif dan kelompok penekan parsial.

Kelompok penekan eksklusif hanya mengambil tindakan dalam bidang politik dengan cara memberikan tekanan atas kekuasaan politik. Sedangkan kelompok penekan parsial menganggap kegiatan politik merupakan bagian dari kegiatan keseluruhan.

- a. Kelompok penekan swasta dan kelompok penekan resmi.

Kelompok penekan swasta adalah kelompok penekan yang berada di luar pemerintahan. Sedangkan kelompok penekan resmi berada di lingkungan pemerintahan. Kelompok penekan resmi dibentuk dengan tujuan agar selalu diperhatikan keberadaannya.

- b. Kelompok penekan asing.

Kelompok penekan yang berasal dari luar negeri yang ikut memberikan tekanan tertentu pada suatu pemerintahan negara tertentu.<sup>16</sup>

## **2.4 Partai Politik**

---

<sup>16</sup> Duverger, Maurice.*op.cit.*, hlm.122-128.

Menurut pasal (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang dimaksud dengan partai politik adalah :

”Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”<sup>17</sup>

Secara umum pengertian partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara-cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka.

Dalam negara yang demokratis partai politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam hal ini partai politik akan menggabungkan beberapa kepentingan di masyarakat (*interest aggregation*), setelah akumulasi kepentingan ini tergabung maka akan di

---

<sup>17</sup> Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik

proses dalam perumusan kepentingan (*interest articulation*) sehingga akan melahirkan suatu kebijakan umum (*public policy*). Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Sebaliknya pemerintah dapat memanfaatkan partai politik untuk menyampaikan kebijaksanaan kepada masyarakat.

b. Sebagai sarana sosialisasi politik

Partai politik punya peranan sebagai sarana mensosialisasikan politik dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Sosialisasi politik dilakukan oleh partai politik berupa pengenalan program-program partai kepada masyarakat dengan harapan dalam pemilihan umum anggota masyarakat yang telah memenuhi syarat hak pilih dapat memilihnya.

c. Sebagai sarana perekrutan politik

Artinya partai politik akan selalu mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk ikut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik (*political recruitment*). Caranya melalui kontak pribadi, kampanye dan sosialisasi program-program.

d. Sebagai artikulator kepentingan (*Interest Articulation*)

Partai politik berfungsi merumuskan, membuat dan menyampaikan tuntutan-tuntutan dari masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok penekan untuk disampaikan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijaksanaan.

e. Sebagai Agregasi kepentingan ( *Interest Aggregation* )

Agregasi kepentingan adalah penggabungan dari beberapa tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok kepentingan maupun kelompok-kelompok penekan yang berbeda sehingga menjadi alternatif -alternatif kebijaksanaan yang diusulkan kepada pemerintah agar menjadi kebijaksanaan. Partai politik punya peran menggabungkan beberapa macam tuntutan dan keinginan dari berbagai macam kelompok kepentingan yang ada di masyarakat untuk diusulkan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijaksanaan.

f. Sebagai sarana pengatur konflik ( *Conflict Management* )

Pada era demokrasi persaingan dan beda pendapat adalah hal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya, meskipun dalam partai politikpun sarat dengan konflik atau sumber terjadinya konflik.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. 405-409

Keberadaan partai politik sebagai kekuatan infrastuktur politik tidak dapat dilepaskan dari kekuatan-kekuatan infrastruktur yang lain. Infrastruktur politik yang berkembang di masyarakat dapat berupa Kelompok kepentingan (*Interest groups*), Kelompok penekan (*Pressure groups*), Media massa dan Lembaga swadaya masyarakat (*LSM*).

Dari uraian tentang kelompok kepentingan (*Interest groups*), kelompok penekan (*Pressure groups*) dan partai politik diatas dapat digambarkan perbedaannya, yaitu :

<b>Kelompok kepentingan</b> <i>(Interest groups)</i>	<b>Kelompok penekan</b> <i>(Pressure groups)</i>	<b>Partai politik</b> <i>(Political party)</i>
---	---	---

<p>1. Memusatkan perhatian pada bagaimana meng-artikulasikan kepentingan tertentu kepada pemerintah sehingga pemerintah dalam menyusun kebijaksanaan dapat menampung kepentingannya.</p> <p>2. Lebih berorientasi kepada proses perumusan kebijakan umum yang di buat pemerintah.</p> <p>3. Kelompok yang ter-organisasi dengan baik, punya anggota yang jelas, memiliki pola kepemimpinan , punya sumber keuangan yang jelas dan pola komunikasi yang baik ke dalam maupun ke luar organisasi.</p>	<p>1. Secara sengaja mengelompokkan diri untuk mencapai suatu tujuan khusus setelah itu bubar.</p> <p>2. Secara khusus berusaha mempengaruhi dan menekan para pejabat pemerintah untuk menyetujui tuntutananya</p> <p>3. Dalam memperjuangkan kepentingannya dilakukan dengan cara lebih keras seperti Demonstrasi, Unjuk rasa dan Pemogokan kerja.</p>	<p>1. Berfungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilu dan cara-cara lain yang sah.</p> <p>2. Sebagai sarana memperjuangkan alternatif kebijaksanaan umum menjadi kebijaksanaan politik.</p> <p>3. Memadukan berbagai kepentingan menjadi beberapa alternatif kebijakkan umum selanjutnya menjadi keputusan politik.</p>
---	---	---

--	--	--

Lanjutan.

<b>Kelompok kepentingan</b> <i>(Interest groups)</i>	<b>Kelompok penekan</b> <i>(Pressure groups)</i>	<b>Partai politik</b> <i>(Political party)</i>
4. Memusatkan perhatian	4. Secara sengaja menge-	4. Berfungsi mencari

<p>pada bagaimana meng-artikulasikan kepentingan tertentu kepada pemerintah sehingga pemerintah dalam menyusun kebijaksanaan dapat menampung kepentingannya.</p>	<p>lompokkan diri untuk mencapai suatu tujuan khusus setelah itu bubar.</p>	<p>dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilu dan cara-cara lain yang sah.</p>
<p>5. Lebih berorientasi kepada proses perumusan kebijakan umum yang di buat pemerintah.</p>	<p>5. Secara khusus berusaha mempengaruhi dan menekan para pejabat pemerintah untuk menyetujui tuntutanannya</p>	<p>5. Sebagai sarana memperjuangkan alternatif kebijaksanaan umum menjadi kebijaksanaan politik.</p>
<p>6. Kelompok yang terorganisasi dengan baik, punya anggota yang jelas, memiliki pola kepemimpinan, punya sumber keuangan yang jelas dan pola komunikasi yang baik ke dalam maupun ke luar organisasi.</p>	<p>6. Dalam memperjuangkan kepentingannya dilakukan dengan cara lebih keras seperti Demonstrasi, Unjuk rasa dan Pemogokan kerja.</p>	<p>6. Memadukan berbagai kepentingan menjadi beberapa alternatif kebijakan umum selanjutnya menjadi keputusan politik.</p>



--	--	--

Kalau kita lihat perbedaan diatas, antara kelompok kepentingan (*Interest groups*) dan kelompok penekan (*Pressure groups*) sebenarnya terletak pada cara dan sasaran dalam memperjuangkan suatu kepentingan. Pada kenyataannya kelompok kepentingan (*Interest groups*) kadang-kadang juga menggunakan cara-cara keras jika cara-cara *lobbying* serta *net working* yang intensif dan persuasif tidak berhasil .

Dengan demikian kelompok kepentingan dan kelompok penekan menjadi faktor partisipasi politik dalam masyarakat demokratis. Fenomena ini dinamakan "Demokrasi arus bawah ".<sup>19</sup> Mereka bertindak sebagai mediator antara kepentingan masyarakat dan pemerintah, terutama di tingkat akar rumput (*grass roots*) dengan memberikan masukan (*input*) kepada pembuat keputusan. Mereka juga bisa memengaruhi eksekutif dan anggota parlemen agar lebih respon terhadap masyarakat. Fenomena ini juga bisa kita lihat pada bagan teori sistem politik.

---

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, *op.cit.*.

## **2.5 TINJAUAN TENTANG PGRI**

### **2.5.1 Profil singkat PGRI**

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah sebuah organisasi perjuangan, profesi dan ketenagakerjaan bersekala nasional yang anggotanya terdiri dari para guru dan tenaga kependidikan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 Nopember 1945 dalam acara kongres guru Indonesia pertama di Surakarta, Jawa Tengah. Organisasi PGRI berasaskan Pancasila dan UUD 1945, terdaftar di Departemen Kehakiman berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman tanggal 20 September 1954, Nomor : 1.A.5/82/12.

PGRI adalah organisasi guru bersekala nasional mempunyai punya sifat :

- a. Unitaristik artinya anggota PGRI tidak memandang pangkat dan jabatan, tempat bekerja, jenis kelamin , dan agama.
- b. Independen mengandung makna berlandaskan prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai pihak.
- c. Non-politik praktis, berarti PGRI tidak terikat dan atau tidak mengikatkan diri pada kekuatan organisasi tertentu atau partai politik apapun.<sup>20</sup>

Berdasarkan pasal (2) dan pasal (6) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi PGRI mempunyai tujuan :

- 1. Mewujudkan cita-cita proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- 2. Berperan aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya.
- 3. Berperan serta mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional.
- 4. Mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya

---

<sup>20</sup> Muhammad Surya, *PGRI Pada Era Reformasi* ,dalam M.Rusli Yunus,dkk..*Perjalanan PGRI (1945-2003)*.Jakarta: 2003, PB PGRI,hal.95

5. Menjaga, memelihara, membela , serta meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan anggota serta kesetiakawanan organisasi.<sup>21</sup>

Kepengurusan tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara. Jenjang kepengurusannya meliputi pengurus besar, pengurus daerah tingkat satu, pengurus daerah tingkat dua, pengurus cabang dan pengurus ranting. Anggotanya para guru dan tenaga kependidikan lainnya yang secara sukarela menjadi anggota.

Ada tiga macam keanggotaan PGRI yaitu anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan. Untuk menunjang kinerjanya PGRI memiliki sejumlah lembaga, yaitu :<sup>22</sup>

- a. YPLP (Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan) Yayasan yang membina lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan PGRI.
- b. LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) lembaga yang memberikan layanan bantuan hukum bagi anggota PGRI.
- c. BP-GGI (Badan pengelola Gedung Guru Indonesia) bertugas mengelola dan merawat Gedung Guru.
- d. PT Harapan masa; badan usaha milik PGRI yang menunjang kinerja PGRI.

---

<sup>21</sup> Pengurus besar PGRI, 2003, *AD/ART PGRI*, Jakarta : [info@pgri.co.id](mailto:info@pgri.co.id), down load, 26 januari 2009

<sup>22</sup> M.Rusli Yunus,dkk.2003, *loc.cit*.hlm.96.

e. Koperasi PGRI dan Majalah "Suara Guru".

PGRI juga menjalin kerjasama dengan persatuan guru di luar negeri baik secara internasional, bilateral, maupun regional. Bahkan PGRI menjadi anggota dalam ACT (*Asean Council of Teachers*) sedangkan di tingkat internasional PGRI menjadi anggota EI (*Education of International*).

### **2.5.2 Visi dan Misi PGRI**

Dalam perjalanannya sejak berdiri setengah abad yang lalu, PGRI telah membuktikan dirinya sebagai organisasi yang masih tetap lestari hingga kini dan tentunya hingga masa datang. Dalam menghadapi tantangan di era global, PGRI harus tetap konsisten terhadap jatidirinya yang bersumber pada visi dan misinya.

#### **A. Visi PGRI Jawa Tengah**

Terwujudnya PGRI sebagai Organisasi Perjuangan, Profesi dan Ketenaga kerjaan yang Mandiri dan Non Partisan.

1. Makna dari terwujudnya PGRI sebagai Organisasi Perjuangan :
  - a. Wahana mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  - b. Wahana untuk membela, mempertahankan, dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Wahana untuk meningkatkan integritas bangsa dalam menjamin terpeliharanya keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa.
- d. Berperan aktif memperjuangkan tercapainya tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
- e. Wadah bagi para guru dalam memperoleh, mempertahankan, meningkatkan, dan membela hak asasinya baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan pemangku profesi kependidikan.
- f. Wahana untuk memberikan perlindungan dan membela kepentingan guru dan tenaga kependidikan yang berhubungan dengan persoalan-persoalan hukum.

2. Makna dari terwujudnya PGRI sebagai Organisasi Profesi :

- a. Wahana memperjuangkan peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi guru.
- b. Wahana mempertinggi kesadaran dan sikap guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu profesi dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Wahana menegakkan dan melaksanakan kode etik dan ikrar guru Indonesia.
- d. Wahana untuk melakukan evaluasi pelaksanaan sertifikasi, lisensi, dan akreditasi bagi pengukuhan kompetensi profesi guru.
- e. Wahana pembinaan bagi Himpunan Profesi dan Keahlian Sejenis di bidang pendidikan yang menyatakan diri bergabung atau bermitra dengan PGRI.

- f. Wahana untuk mempersatukan semua guru dan tenaga kependidikan di semua jenis, jenjang, dan satuan pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan peran serta dalam pembangunan nasional.
  - g. Wahana untuk mewujudkan pengabdian secara nyata melalui anak lembaga dan badan khusus.
  - h. Wahana untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, dan atau organisasi kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan.
3. Makna dari terwujudnya PGRI sebagai Organisasi Ketenagakerjaan :
- a. Wahana untuk memperjuangkan terwujudnya hak-hak guru dan tenaga kependidikan.
  - b. Wahana untuk memperjuangkan kesejahteraan guru yang berupa: imbal jasa, rasa aman, hubungan pribadi, kondisi kerja dan kepastian karier.
  - c. Wahana untuk mewujudkan prinsip dan pendekatan ketenagakerjaan dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan anggota.
  - d. Wahana untuk memperkuat kedudukan, wibawa dan martabat guru serta kesetiakawanan organisasi.
  - e. Wahana untuk membela dan melindungi guru sebagai pekerja.
  - f. Wahana untuk membina dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi ketenagakerjaan baik lokal, regional maupun global..

4. Makna dari terwujudnya PGRI sebagai Organisasi yang Mandiri :
  - a. Menjalin kerjasama dengan semua pihak atas dasar kemitrasejajaran, saling menghormati dan berdiri di atas semua golongan.
  - b. Menggali dan mengembangkan potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan dan sumber daya organisasi lainnya yang tidak tergantung dari pihak manapun.
  - c. Membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi dengan menempatkan iuran anggota sebagai sumber utama pembiayaan organisasi.
5. Makna dari terwujudnya PGRI sebagai Organisasi yang Non Partisan :
  - a. PGRI tidak menjadi bagian dari partai politik manapun dan tidak berafiliasi dengan partai manapun.
  - b. PGRI memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menentukan pilihan politiknya secara merdeka.
  - c. PGRI selalu menjalin hubungan baik dengan seluruh partai dan komponen masyarakat dalam memajukan pendidikan nasional.

A. Misi PGRI Jawa Tengah

- (1) Menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.



- (2) Berperan aktif dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan yang berlandaskan asas demokrasi, keterbukaan, pengakuan terhadap hak asasi manusia, keberpihakan pada rakyat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kesejahteraan anggota.
- (4) Melaksanakan, mengamalkan, mempertahankan dan menjunjung tinggi kode etik profesi guru Indonesia.
- (5) Membangun sikap kritis terhadap kebijakan pendidikan yang tidak memihak kepada kepentingan masyarakat.
- (6) Melaksanakan dan mengelola organisasi berdasarkan tata kelola yang baik (*good governance*).
- (7) Memperjuangkan perlindungan hukum, profesi, dan kesejahteraan anggota PGRI.
- (8) Mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi yang mempunyai kewenangan akreditasi, sertifikasi, dan lisensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (9) Memperkuat solidaritas, soliditas, demokratisasi, dan kemandirian organisasi di semua level/tingkatan.
- (10) Menyamakan persepsi, visi, dan misi para guru/pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pilar utama pembangunan pendidikan nasional.
- (11) Mewujudkan PGRI sebagai organisasi yang memiliki kekuatan penekan (*pressure group*), pemikir (*thinker*), dan pengendali (*control*)

### **2.5.3 PGRI sebagai serikat pekerja**

Ada anggapan bahwa guru bukan pekerja tetapi tenaga profesional yang menekankan pada prinsip pengabdian dan panggilan hati, sehingga diasumsikan merasa bahagia walaupun dengan penghasilan yang kecil. Akan tetapi sekarang jaman sudah berubah, tuntutan hidup makin kompetitif, kesejahteraan perlu diperjuangkan sehingga asumsi itu kini berubah bahwa guru adalah pekerja dan sudah sewajarnya untuk berjuang mengorganisasikan diri / menghimpun dalam satu wadah organisasi pekerja yang berjuang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Organisasi pekerja guru tersebut terhimpun dalam wadah yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ).

Menurut UU No.13 Tahun 2003, serikat pekerja / serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja / buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela , melindungi hak dan kepentingan pekerja / buruh serta meningkatkan kesejahteraannya. Titik berat perjuangan serikat pekerja adalah mengupayakan kesejahteraan anggota dan mengatur hubungan kerja pekerja dengan majikannya.

Gerakan serikat pekerja merupakan manifestasi bentuk solidaritas yang memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, demokrasi, martabat dan hak-hak asasi

manusia. Begitu halnya dengan PGRI dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kesejahteraan guru, hal yang dilakukan oleh PGRI sebagai organisasi serikat pekerja, diantaranya :

- a. Pada tahun 1990 PGRI telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja / Depnaker sebagai organisasi serikat pekerja dengan Surat Keputusan Menaker No. 197 / Men /1990 Tanggal 5 april 1990.
- b. PGRI mendaftarkan kembali sebagai organisasi serikat pekerja di Departemen Tenaga Kerja tanggal 10 Agustus 1999 dengan SK Menaker No. Kep 370/ M/BW/1999. Hal ini dilakukan karena pada tahun 1990 belum bisa melaksanakan ketentuan sebagai organisasi serikat pekerja karena kondisi politik yang belum memungkinkan saat itu.
- c. Sejak tahun 2000 PGRI telah menjadi salah satu anggota kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). KSPI merupakan konfederasi serikat pekerja Indonesia yang merupakan gabungan dari 11 Federasi serikat pekerja Indonesia yang beranggotakan sekitar 400 organisasi / serikat pekerja.<sup>23</sup>

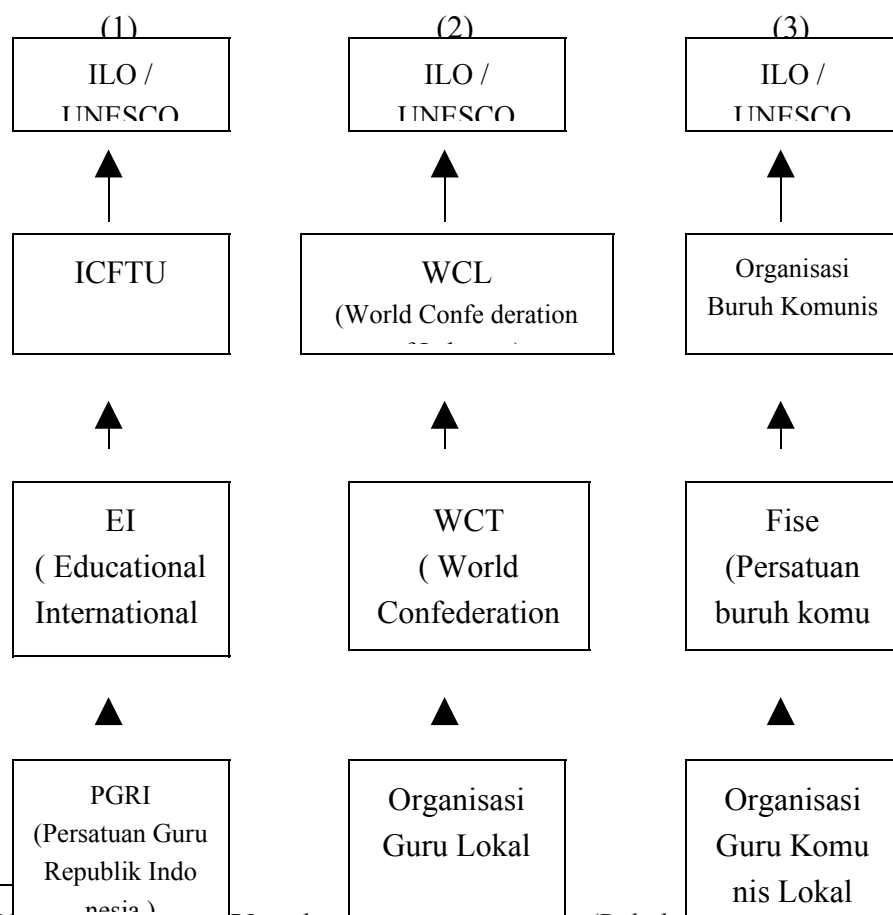
Untuk memperkuat posisinya, serikat pekerja dapat meminta bantuan kepada induk organisasinya di luar negeri. Misalnya PGRI dapat meminta bantuan ke *Educational International* (EI) atau bisa pula berhubungan dengan ILO dan

---

<sup>23</sup> M.Rusli Yunus,dkk,*op.cit.*,hlm. 89

UNESCO. Pada saat ini ada tiga jenis organisasi guru internasional yaitu: *Educational Internationala (EI)* , *World Confederation of Teachers* yang berinduk pada *World Confederation of Labours* dan Organisasi guru komunis international<sup>24</sup>

Gambar 2.3.  
Bagan organisasi guru pada tingkat Internasional



<sup>24</sup> HM. Kusnir, *PGRI sebagai serikat pekerja (Dulu-kini-yang akan datang)*;

Sumber : [info@pgri.co.id](mailto:info@pgri.co.id), PGRI sebagai serikat pekerja (Dulu-kini-yang akan datang) oleh; HM. Rusli Yunus.

#### **2.5.4 PGRI dalam memperjuangkan kesejahteraan guru**

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi profesi terbesar yang dimiliki oleh guru di Indonesia adalah organisasi yang sangat ideal dan tepat sebagai wadah untuk meningkatkan profesionalisme guru, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi para guru serta memperjuangkan nasib guru dan pendidikan pada umumnya. Agar guru dan tenaga kependidikan dapat berperan maksimal dalam menjalankan fungsinya, mereka perlu didukung, dibantu,

didorong dan diorganisasikan dalam suatu wadah yang dinamis, prospektif dan mampu menjawab tantangan masa depan. PGRI adalah organisasi yang tepat dan telah mampu melakukan hal itu. Sejarah telah membuktikan bahwa keuletan, kekompakan, kejuangan dan perjuangan PGRI selama ini telah menempatkan PGRI bukan saja menjadi organisasi guru dan tenaga kependidikan yang terbesar di Indonesia, tetapi juga merupakan bagian dari organisasi guru dunia yang tersebar di 158 negara di dunia yang anggotanya kini lebih dari 25 juta.

Dalam rangka reposisi peran guru dalam ranah pendidikan dan tuntutan keadilan, sesungguhnya ada agenda tersendiri yang ingin diperjuangkan oleh guru dengan aksi-aksinya. Melalui wadah kelompok kepentingan (*Interest Groups*) dalam hal ini PGRI sejak awal reformasi tahun 1999 ada enam paket tuntutan yaitu :

- a. Adanya tunjangan fungsional bagi guru yang wajar dan adil
- b. Perbaikan gaji guru dengan menerapkan suatu sistem penggajian khusus bagi guru / tunjangan Profesional.
- c. Perlunya peningkatan Anggaran pendidikan sebesar 20 % sampai 25 % dari besarnya APBN untuk tingkat nasional.

dan 20 % sampai 25 % dari besarnya APBD untuk tingkat daerah, yang harus diproteksi dalam pernyataan pasal dalam konstitusi negara demi pengamanannya, agar ada keharusan untuk dilaksanakan

- d. Pembenahan manajemen pendidikan nasional
- e. Terbentuknya Undang- undang perlindungan hukum bagi guru dan dosen.
- f. Perlunya sertifikasi pendidik agar mendapatkan mutu tenaga kependidikan yang baik dengan imbal jasa penghargaan yang wajar.<sup>25</sup>

Tuntutan itu hal yang wajar dan tidak berlebihan, namun susah untuk merealisasikan, apalagi menyangkut anggaran yang tidak sedikit. Untuk itu diperlukan perjuangan dari para guru itu sendiri. Disini dibutuhkan suatu kebersamaan, persatuan , menyatukan langkah, persepsi dengan membentuk wadah kelompok kepentingan dengan nama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk menekan para penguasa agar mengabulkan keinginan dan cita-citanya.

---

<sup>25</sup> Muhamad Suryo.Percikan perjuangan guru (Guru demo ;apa yang kau cari?),loc.cit.hlm.119

## 2.6 Definisi Konsep

Definisi adalah pernyataan yang dapat mengartikan atau memberi makna suatu istilah atau konsep tertentu atau suatu gambaran penuh isi dari arti yang dibawa oleh suatu istilah atau konsep tertentu. Sehingga definisi konsep ini adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan dan yang dapat diobservasi.<sup>26</sup>

Adapun konsep yang didefinisikan dari penulisan ini sebagai berikut :

No	Istilah	Definisi konsep
1	Peranan	Sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang peranan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Dari pengertian ini, penulis mengartikan yang dimaksud peranan yaitu sebagai penggerak/Motivator untuk melakukan aktifitas yang berguna / diperlukan bagi orang lain / kelompok.

---

<sup>26</sup> Ahmad Taufiq, *Modul Metode Penelitian Sosial*, Semarang : materi tidak diterbitkan Fisip UNDIP, 2006, Hal.III.9



2	<p>Kelompok Kepentingan</p> <p><i>Interest groups</i></p>	<p>Kelompok kepentingan (<i>Interest groups</i>) mengandung arti sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan atau tujuan, yang sepakat mengorbankan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Atau bisa diartikan suatu organisasi yang berusaha mempengaruhi suatu kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya.</p>
3	Kesejahteraan	<p>Bentuk imbalan yang diterima dalam hal materiil maupun spiritual yang berwujud imbal jasa, rasa aman, kondisi kerja, hubungan antar-pribadi dan kelembagaan serta kepastian karir.</p>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1 PENDEKATAN PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2000, Hlm.3

Pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian diskriptif. Penelitian diskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok masyarakat, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang. Tujuan penelitian diskriptif untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurasi fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>28</sup>

Dalam penelitian diskriptif kualitatif, berisikan gambaran keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan data dan menganalisa sehingga diperoleh analisis terhadap masalah. Untuk itu peneliti berupaya mendapatkan gambaran mengenai peranan PGRI. Dalam hal ini, pengurus PGRI Jawa Tengah sebagai kelompok kepentingan ( *Interst groups* ) dalam memperjuangkan kesejahteraan guru.

### **3.2 Lokasi / Tempat penelitian :**

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor pengurus PGRI propinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jl. Lontar no. 1 Semarang, Kota Semarang. Alasan penentuan lokasi ini karena para pengurus PGRI aktifitas kegiatannya di kota Semarang.

---

<sup>28</sup> Rahmad Jalaludin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung ; Remaja Rosda Karya. 2007, hlm. 24

Untuk memperkaya informasi dari guru, penulis juga mencari data di kota Salatiga. Alasan memilih kota Salatiga karena penulis mempunyai banyak relasi teman-teman guru sejawat, sekaligus menjadi anggota PGRI di wilayah tersebut.

### **3.3 Jenis dan Sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

(4) Data primer, diperoleh dari sumber yang akan diwawancarai yaitu:

- a. Pengurus propinsi PGRI Jawa Tengah meliputi Ketua / wakil, sekretaris dan bendahara atau pengurus lain yang ditunjuk oleh pengurus PGRI .
- b. Guru sebagai anggota PGRI dan praktisi atau pakar pendidikan berdasarkan pengembangan dari hasil wawancara terhadap pengurus PGRI.

(5) Data sekunder yaitu data yang diharapkan melengkapi dari hasil penelitian atau obyek yang diwawancarai. Dalam hal ini meliputi data hasil kajian kepustakaan, dokumentasi kegiatan, program kerja dan literatur lain yang relevan.

### **3.4 Populasi dan Sampel penelitian**

### 3.4.1 Populasi

Dalam penelitian kualitatif istilah polpulasi mengandung arti "wilayah generalisasi yang terdiri obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya".<sup>29</sup> Meminjam pengertian diatas maka akan lebih tepat manakala yang dimaksud populasi dalam penelitian kualitatif ini adalah situasi sosial yang di dalamnya terdiri dari (*aktor/orang, place/tempat dan activity/aktivitas*) yang lebih tepat dinamakan obyek penelitian. Sehingga dari pemaknaan ini yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para pengurus daerah PGRI Jawa Tengah, guru selaku anggota PGRI dan Praktisi atau pakar pendidikan berdasarkan pengembangan dari hasil wawancara dari pengurus PGRI

### 3.4.2 Sampel Penelitian

Ada beberapa pengertian sampel antara lain sampel mengandung arti "sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut".<sup>30</sup> Sampel juga berarti sebagian individu yang diselidiki.<sup>31</sup> Pemaknaan sampel disini dapat

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung ; Alfabeta, 2006, hlm.242

<sup>30</sup> Sugiyono, *op.cit.*.

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi dalam hermawan Wasito, Pengantar metodologi penelitian, Jakarta ; PT Gramedia Pustaka, 1993, hlm.51

disimpulkan sesuatu yang dipilih menjadi sumber informasi yang memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi sumber informasi (informan) maka perlu ditentukan teknik pengambilan sampelnya.

### 3.4.3 Teknik pengambilan sampel / Pengambilan informan

Dalam penelitian ini, Teknik pemilihan sampel untuk kelompok pengurus PGRI ini adalah *nonprobability sampling*. Yaitu "teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang dan kesempatan sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel"<sup>32</sup>. Teknik *nonprobability sampling* yang dipilih penulis menggunakan sistem *purposive*. Yaitu "suatu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu"<sup>33</sup>.

Penulis memilih ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sampel yang bersangkutan memiliki pemahaman dan menguasai tema yang di teliti. Sedangkan tambahan informasi lainnya akan ditentukan dengan teknik *Snowball*.

Sampel dari penelitian ini yang dianggap mengetahui/ memahami permasalahan adalah :

a. Pengurus propvinsi PGRI Jawa Tengah meliputi :

Ketua / wakil ketua : 1 orang

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm.246

<sup>33</sup> Ibid, ...

Sekretaris : 1 orang

Bendahara : 1 orang

- b. Pakar pendidikan atau praktisi pendidikan. Contoh : Kepala sekolah, penilik sekolah atau pegawai dinas pendidikan.
- c. Guru - guru yang terkait berdasarkan pengembangan hasil wawancara dari pengurus PGRI dan telah menjadi anggota PGRI.

Pengambilan sampel khusus untuk pakar pendidikan dan guru-guru menggunakan *Snowball Sampling*. Yaitu ”teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlah kecil, kemudian membesar dan meluas,”<sup>34</sup>. Penentuan sampel dengan teknik *Snowball Sampling* ini artinya pertama-tama memilih satu atau dua orang, karena belum cukup maka lewat petunjuk sampel pertama dan ke-dua tadi akan menunjuk sampel lainnya dan seterusnya sehingga sampai dianggap telah memadai.

Penghentian penelitian dilakukan apabila telah sampai kepada taraf jenuh atau sudah tidak memberikan informasi yang baru dan telah terkendala oleh

waktu dan biaya .<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm.247.

<sup>35</sup> Ibid, ...

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan empat tahap, yakni :

- 1) Pemilihan sampel awal, akan ditentukan apakah informan akan dibawa dalam situasi wawancara atau dalam situasi observasi.
- 2) Penentuan sampel lanjutan guna memperluas informasi dan melacak segenap variasi informasi yang mungkin ada.
- 3) Pemilihan sampel akan dikembangkan lagi dari obyek yang di amati atau di teliti secara langsung dengan mengadakan peninjauan data melalui penyebaran kuesioner.
- 4) Menghenti kan pemilihan sampel lanjutan sekiranya sudah tidak muncul informasi yang baru dibandingkan dengan informasi yang diperoleh sebelumnya.

### **3.5 Teknik Pengumpulan data**

Dilihat dari pengumpulan sumber datanya, penelitian ini menggunakan sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.



Dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen .

#### 1) Observasi

Observasi membantu kita untuk mengumpulkan data primer. Observasi merupakan suatu cara yang penuh tujuan, sistematis dan selektif dalam mengamati, mendengar interaksi ketika hal itu terjadi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi pasif yaitu peneliti datang ke tempat obyek penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Sebagaimana didasarkan pada pendapat Spradley dalam Sugiyono 2006 yang membagi observasi menjadi empat, yaitu:<sup>36</sup>

- a) Observasi yang pasif ( peneliti datang ke tempat yang diteliti, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut).
- b) Observasi yang moderat ( peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam kegiatan, tetapi tidak ikut semuanya.
- c) Observasi yang aktif (peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh nara sumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap).
- d) Observasi yang lengkap (peneliti ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan nara sumber secara penuh.

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *op.cit.*.

## 2) Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Esterberg (2002) dalam bukunya Sugiyono mengemukakan macam-macam wawancara, yaitu:<sup>37</sup>

- a) Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dibuat menurut pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya yang sudah disiapkan secara urut.
- b) Wawancara semiterstruktur yaitu wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena orang yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya secara bebas.
- c) Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam kegiatan ini wawancara yang saya lakukan adalah wawancara semiterstruktur, yaitu wawancara yang mendalam dengan elit para pengurus PGRI. Tujuan wawancara ini agar ditemukan jawaban yang lebih terbuka, untuk itu pihak yang saya wawancarai saya minta pendapatnya, ide dan peristiwa yang mereka alami. Kelebihan wawancara elit ini adalah mereka dapat membantu

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *op.cit*

menginterpretasikan personalitas, menjelaskan aktivitas dan kegiatannya, memiliki informasi yang tidak dicatat atau mungkin dapat membantu membangun jaringan kontak dan akses ke elite lain.

### 3) Studi dokumentasi

Pencarian data juga dilakukan melalui studi dokumen, menggunakan sumber primer (AD /ART, Undang-undang,) serta sumber sekunder (buku, jurnal, laporan penelitian, media massa dan internet).

## **3.6 Teknik Analisis Data**

Bogdan dalam buku Sugiyono (2006:274) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan yang lain, sehingga mudah difahami dan hasil temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan disini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana-mana yang penting dan merumuskan kesimpulan.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif meliputi tahapan sebagai berikut :

(1) melakukan telaah data, yaitu penyajian hasil data secara menyeluruh, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi, (2) data *reduction*, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema kesesuaiannya, (3) Penyusunan ke dalam satuan-satuan, (4) Kategorisasi, (5) Pemeriksaan keabsahan data / validitas data.

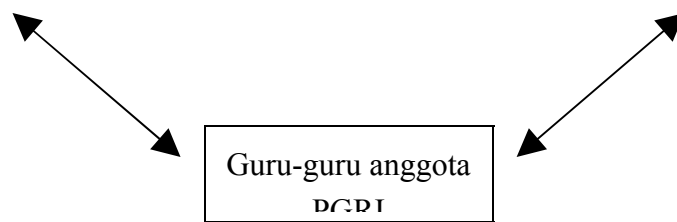
### 3.7 Teknik pemeriksaan validitas dan kredibilitas data

Dalam pemeriksaan validitas data ini penulis menggunakan triangulasi data, yakni peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mendapatkan data yang sejenis, sehingga didapatkan pemaknaan lintas data yang menyeluruh. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data<sup>38</sup>

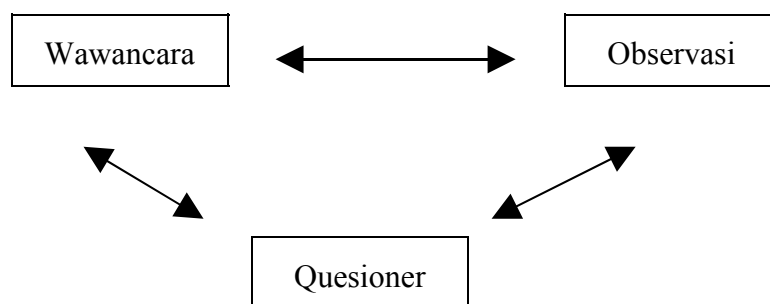
Triangulasi sumber untuk mengecek kebenaran yang diperoleh dari tiga sumber yaitu ;



<sup>38</sup> Sugiyono, 2006. *op.cit.* hal. 306.



Triangulasi teknik untuk mengecek kebenaran yang diperoleh dari sumber yang sama dengan tiga cara yaitu ; data hasil wawancara, Observasi dan Studi dokumentasi.



Untuk menguji keabsahan data, ada 4 cara yang digunakan yaitu :

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas ini berfungsi untuk melakukan penelaahan data secara akurat agar tingkat kepercayaan penanya dapat dicapai. Teknik untuk menentukan kredibilitas penelitian ini dilakukan dengan cara-cara memperpanjang masa

observasi, pengamatan terus menerus, triangulasi, membicarakan dengan orang lain, menggunakan referensi lain.

## 2. Keteralihan(*Transferability*)

Transferability merupakan pengganti dari validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan/dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Di dalam penelitian kualitatif ini nilai transferability berkenaan dengan pertanyaan yang disusun harus memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis dan dapat dipercaya.

## 3. Kebergantungan(*Dependability*)

Kebergantungan merupakan pengganti dari konsep reliability dalam penelitian kuantitatif. Kebergantungan (Reliability dalam kuantitatif) dapat tercapai bila alat ukur yang digunakan secara berulang-ulang menunjukkan hasilnya selalu sama. Dalam penelitian kualitatif ini alat ukurnya bukanlah benda melainkan manusia/si-peneliti itu sendiri. Untuk mencapai kebenaran itu maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan cara pengumpulan data sebanyak-banyaknya yang selanjutnya melakukan auditing yaitu pemeriksaan data yang sudah dipolakan.

## 0. Kepastian(*Obyektivitas*)

Konsep ini merupakan pengganti dari konsep obyektifitas dalam penelitian kuantitatif. Penelitian dikatakan obyektif bila hasilnya disepakati banyak orang dan benar adanya. Pada penelitian kualitatif ini diakui juga memiliki pengalaman subyektif karena juga dipengaruhi si peneliti itu sendiri, namun pelaksanaan penelitian ini telah berusaha semaksimal mungkin dilakukan dengan cara-cara proses penelitian yang benar.

Langkah terakhir dalam analisa data kualitatif adalah kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan dianggap telah benar (dapat dipertanggungjawabkan)<sup>39</sup>

## **BAB IV**

### **PERAN PENGURUS PGRI JAWA TENGAH**

### **DALAM MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN GURU**

---

<sup>39</sup> Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono,2006. *ibid*, hlm.276.

#### **4.1.Kondisi umum pengurus PGRI Propinsi Jawa Tengah masa bhakti XIX (2004-2009)**

##### **4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Pengurus PGRI Jawa Tengah**

Pengurus PGRI Propinsi Jawa Tengah mulai ada pada tahun 1948 diketuai oleh Soenarto. Keberadaannya pada waktu itu masih sangat rentan sehingga mudah terjadi perpecahan. Hal ini terjadi tidak lepas dari situasi dan kondisi politik nasional pada saat itu dan banyaknya kepentingan yang sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya PGRI itu sendiri.

Pada 17 Juni 1964 PGRI Jawa Tengah mengadakan konferensi daerah untuk memilih pengurus baru. Dalam suasana yang tegang terwujudlah pengurus baru dengan ketua Lamingoen Hadi Soesastro. Kepengurusan ini ternyata diwarnai paham komunisme karena terlibat dalam G 30 S PKI dengan menamakan diri sebagai PGRI Non Vaak sentral (PGRI NV / PKI). Dalam kepengurusan juga terjadi beda pendapat diantara faksi-faksi yang ingin memperjuangkan kepentingannya sendiri. Untuk menghindari ketegangan dan konflik organisasi maka diadakan Konferda I PGRI Jawa Tengah masa bhakti XII di Surakarta.

Dalam Konferda I masa bhakti XII di Surakarta menghasilkan ketua pengurus yang baru. Sesuai dengan Surat Keputusan pengurus besar PGRI tanggal 22 September 1969 ditetapkan kepengurusan PGRI Propinsi diketuai oleh



Drs.Suhardi. Kepengurusan ini kemudian mendapat kegoncangan lagi berupa adanya pengurus yang masuk anggota legislatif pemilu 1971. Para pengurus terbelah masuk ke dalam berbagai partai politik. Kepentingan partai mewarnai sikap pengurus sehingga situasi kepengurusan sangat labil dan nyaris bubar.

Konferensi kerja tahun ke-dua yang direncanakan pada 26-27 Agustus 1973 di Purwokerto tidak terlaksana karena tidak memenuhi quorum. Di akhir 1973 kepengurusan PGRI di ketuai Drs. Is Riwidigdo yang berlangsung dalam masa bhakti XIII sampai dengan Masa Bhakti XV tahun 1984. Pada tanggal 16 – 21 Juli 1984 diselenggarakan Konferda I PGRI Jawa Tengah Masa Bhakti XV yang menghasilkan pengurus baru dengan ketua Drs Karseno. Kepengurusan ini berlangsung sampai Masa Bhakti XVII tahun 1999.

Tanggal 14 – 16 Maret 1999 diselenggarakan Konferda I di Semarang dengan agenda pemilihan pengurus baru dan penyempurnaan AD / ART. Penyempurnaan AD/ART diperlukan karena sesuai dengan tuntutan reformasi saat itu. Dalam pemilihan kepengurusan baru terjadi pergantian kepemimpinan dari Drs Karseno kepada Drs. Sudharto,M.A. Masa kepemimpinannya berlaku untuk masa Bhakti XVIII ( 1999-2004).

Tanggal 7- 9 Januari 2005 diselenggarakan konferda I dengan agenda pemilihan pengurus baru untuk masa bhakti XIX (2004-2009). Dalam konferda

periode ini Sudharto,M.A terpilih kembali untuk melanjutkan program-program kerjanya namun ada pergeseran susunan personalia .

#### **4.1.2 Perangkat kelengkapan dan susunan organisasi PGRI Jawa Tengah**

Menurut anggaran dasar PGRI dalam Bab XI pasal 14 s/d pasal 20 perangkat kelengkapan dan susunan organisasi PGRI memiliki tata urutan organisasi dengan susunan: Kepengurusan tingkat nasional, Propinsi, Kabupaten / Kota, Cabang khusus dan tingkat ranting. Jenjang kepengurusan PGRI tersebut terdiri atas :<sup>40</sup>

- a. Pengurus Besar, untuk tingkat pusat, berkedudukan di Jakarta dan pengurusnya berjumlah 26 orang.
- b. Pengurus Daerah tingkat I, berkedudukan di Ibukota Propinsi, jumlah pengurus masing-masing 20 orang.
- c. Pengurus daerah tingkat II, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, sebanyak 350 buah, masing-masing 17 anggota pengurus
- d. Pengurus cabang, berkedudukan di Ibukota kecamatan atau Unit kerja, masing-masing beranggotakan 15 orang.

---

<sup>40</sup> PB PGRI,Kumpulan peraturan organisasi PGRI,Jakarta,2008

- e. Pengurus ranting, berkedudukan di unit kerja / desa, masing-masing beranggotakan 5 orang pengurus.

Organisasi PGRI Jawa Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi secara nasional. Kepengurusan PGRI mempunyai tata urutan organisasi secara hierarkis.

Berikut ini hasil wawancara dengan pengurus PGRI yakni Sdr. Drs. Ngasbun Egar, S.Pd.,M.Pd.:<sup>41</sup>

”PGRI di semua tingkatan memiliki tata urutan organisasi sebagai berikut; Pengurus Besar (PB), Pengurus Propinsi (PD I), Pengurus Kabupaten/Kota (PD II), Pengurus Cabang ditingkat kecamatan dan Pengurus Cabang Khusus di tingkat Perguruan Tinggi atau satuan unit kerja tertentu yang agak luas, Pengurus Ranting meliputi wilayah desa, kelurahan atau unit kerja pada satuan pendidikan sekolah. Sedangkan perangkat kelengkapan organisasi PGRI tingkat Propinsi itu meliputi; Pengurus PGRI Propinsi, Anak lembaga dan Badan Khusus, Himpunan atau asosiasi profesi, Forum Organisasi berupa konferensi PGRI Propinsi, Badan penasehat dan Dewan kehormatan organisasi serta Kode Etik Guru Indonesia”.

Selanjutnya menurut pernyataan Sdr.Dra.Suciati,M.Hum. selaku sekretaris PGRI Jawa Tengah susunan kepengurusan PGRI Jawa Tengah masa bhakti XIX (2004-2009) adalah sebagai berikut :<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Drs. Ngasbun Egar, S. Pd., M.Pd pada Jumat, 24 April 2009 pukul 09.00-10.30 wib. Di IKIP PGRI Semarang

<sup>42</sup> Wawancara dengan Dra.Suciati,M.Hum pada Rabu, 25 Maret 2009 pukul 09-11-00 wib. Di IKIP PGRI Semarang.

Ketua : Drs. Sudharto, M.A.  
 Wakil Ketua : Drs.H. Soebagyo Brotosejati, M.Pd.  
 Wakil Ketua : Taruna, S.H.  
 Wakil Ketua : H.N. Sakdani Darmopamudjo  
 Sekretaris : Drs. Sulistyo, M.Pd.  
 Wakil sekretaris : Dra. Sri Suciati, M.Hum  
 Bendahara : Amir Ambyah  
 Wakil Bendahara : H.Sakbani

Sekretariat Bidang meliputi :

Sek.Bid. Organisasi dan Kaderisasi : Drs. H. S. Hadi Sanyoto  
 Sek.Bid. Organisasi Kesejahteraan : Dra.Hj.TatikSuryo, M.M  
 Sek.Bid. Ketenagakerjaan : H.Widadi, S.H.  
 Sek.Bid. Pengembangan Karir & Profesi :Drs.Sardju Maheri,M.Pd  
 Sek.Bid. Pendidikan : Drs. Rustopo, S.H.,M.H.  
 Sek.Bid. Kerohanian : Dr.H. S. Hadi Sanyoto  
 Sek.Bid. Advokasi & Perlindungan Hukum : Muhdi, S.H., M.Hum.  
 Sek,Bid. Pemberdayaan Perempuan : Suliyem, Ama.Pd.  
 Sek.Bid. Pembinaan Kesenian & Olah Raga : Drs. Slamet Rahardjo  
 Sek.Bid. Infokom : Drs. Maryanto, M.Si.  
 Untuk memperlancar tugas dan tanggung jawab kepengurusan, PGRI

Jawa Tengah mempunyai 28 staf karyawan baik yang sifatnya pegawai tetap,  
 maupun honorer. Daftar nama-nama karyawan PGRI Propinsi Jawa Tengah  
 sebagai berikut:

Tabel IV.1  
 Daftar nama karyawan di lembaga PGRI  
 Provinsi Jawa Tengah tahun 2008

No	Nama	No	Nama
1	Agus Wismanto,B.Sc.,S.Pd,M.Pd	15	Sahidin

2	Arien Sri Lestari,S.E.	16	Shodik
3	Bayu aji Nugroho,S.Kom.	17	Sintha Indrayani,S.E.
4	Haryoto	18	Sri Mustika Rini H, S.E.
5	Lies Seniwati,A.Md	19	Suci Sukiptiyah
6	M.Rahmad Subagyo	20	Sunarti
7	Makno	21	Suwartoyo
8	Mulyono	22	Suyadi
9	Muntofik	23	Tuti Indah S
10	Nining Tri Winarti	24	Ulis Widjoretno,S.H.CN
11	Puji Rahayu Ningsih	25	Umi S
12	Purwanto,S.Pd	26	Widhi Utomo HP,S.H.
13	Riyanti	27	Witono,A.M.d.
14	S.Triwijayati	28	Yuniarto Budhi S.,S.Pd

Sumber : Kantor Staf tata usaha Yayasan PGRI Provinsi Jawa Tengah tahun 2009

Dari daftar karyawan tersebut diatas maka berdasarkan tingkat pendidikan nya dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Tingkat pendidikan	jumlah	prosentase
1	SMA/SLTA	18	64,29 %
2	Diploma	2	7,14 %
3	Sarjana	6	21,43 %
4	Pascasarjana	2	7,14 %

	Jumlah total	28	100 %
--	--------------	----	-------

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan (SDM) karyawan pengurus PGRI provinsi Jawa Tengah masih di dominasi dengan tingkat pendidikan SMA/SLTA,yaitu sebesar 64,29 %, untuk itu apabila PGRI Jawa Tengah ingin maju dan dapat berperan maksimal sudah sepantasnya meningkatkan kualitas SDM bagi karyawannya.

Bidang-bidang yang menjadi fokus perhatian PGRI Propinsi Jawa Tengah meliputi; Organisasi dan Kaderisasi, Kesejahteraan, Ketenagakerjaan, Pengembangan Karir & Profesi, Pendidikan, Kerohanian, Advokasi & Perlindungan Hukum, Pemberdayaan Perempuan, Pembinaan Kesenian & Olah Raga, Informasi dan Komunikasi.

Untuk mengelola bidang dan tugas tertentu dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersifat tetap dan jangka panjang dibentuk pula anak lembaga PGRI dan badan khusus meliputi :Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan (YPLP) Dikdasmen PGRI Jawa Tengah, Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan (YPLP) Perguruan Tinggi PGRI, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI cabang Jawa Tengah, Koperasi PGRI Jawa Tengah, Badan Khusus PGRI Jawa Tengah, meliputi : Yayasan Dana Setia Kawan

Pensiun PGRI Jawa Tengah, Forum Komunikasi Pengembangan Profesi Guru (FKPPG) PGRI Jawa Tengah dan Badan penerbitan PGRI Jawa Tengah.<sup>43</sup>

Jenis, susunan dan tugas anak lembaga tingkat propinsi dan pengurusnya ditetapkan oleh pengurus PGRI propinsi. Anak lembaga PGRI dikoordinasikan oleh badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya masing-masing. Masa bakti kepengurusan anak lembaga PGRI ditetapkan sama dengan masa bakti badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya.

#### **4.1.3 Sumber Keuangan PGRI Jawa Tengah dan cara mendapatkannya :**

Di dalam anggaran dasar bab XVIII pasal 31 disebutkan bahwa : sumber keuangan organisasi PGRI diperoleh dari :Uang pangkal anggota, sumbangan tetap bulanan, sumbangan lain yang tidak mengikat dan usaha-usaha sumber pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan AD/ART. Ketentuan tata cara pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi PGRI diatur dalam sebuah Anggaran Rumah Tangga, sebagai berikut (1)Setiap anggota baru membayar uang pangkal sebesar Rp 10.000 dan di setorkan lewat pengurus PGRI Kabupaten atau Kota.(2) Setiap anggota memberikan kontribusi iuran bulanan sebesar Rp 2000.

Penggunaan dana untuk kegiatan operasional sebagai berikut :

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Sudharto,MA, ketua PGRI Jawa Tengah ,Sabtu,4 April 2009,Pukul.09.00 s/d 11.00 wib.

- 1) Kegiatan operasional pengurus besar (PB) Rp 200,-
- 2) Kegiatan operasional pengurus PGRI Provinsi Rp 400,-
- 3) Kegiatan operasional pengurus PGRI Kab./ Kota Rp 600,-
- 4) Kegiatan operasional cabang dan ranting Rp 800,-

Adapun tatacara pengumpulan iuran anggota menurut ketentuan Anggaran

Rumah tangga PGRI dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan iuran untuk pengurus besar dan pengurus provinsi diberikan tugas dan tanggung jawab kepada pengurus PGRI Kabupaten/ Kota
- 2) Pengurus PGRI kabupaten /kota menyetorkan iuran untuk pengurus besar bersama dengan iuran untuk pengurus PGRI Provinsi kepada pengurus PGRI Provinsi
- 3) Setiap tiga bulan, semua pengurus di semua tingkatan wajib menyampaikan catatan penerimaan iuran anggota dan disampaikan kepada Badan Pimpinan Organisasi yang lebih tinggi kecuali Pengurus Besar yang akan menyampaikannya kepada seluruh pengurus PGRI Provinsi.
- 4) Setiap tahun kondisi keuangan akan diverifikasi oleh :



- a) Pengurus Besar (PB) PGRI diperiksa oleh badan verifikasi keuangan yang dibentuk oleh Konkernas oleh sebanyak-banyaknya 5 orang yang mewakili PGRI Provinsi.
  - b) Pengurus PGRI Provinsi oleh pengurus PGRI Provinsi.
  - c) Pengurus PGRI Kabupaten/Kota oleh pengurus PGRI Provinsi
  - d) Pengurus PGRI cabang oleh pengurus PGRI kabupaten/Kota
  - e) Pengurus PGRI ranting oleh pengurus PGRI cabang.
- 1) Biaya yang timbul dalam pemeriksaan keuangan organisasi ditanggung oleh masing-masing badan pimpinan organisasi yang diperiksa sesuai tingkatannya.

## **4.2 Anak lembaga PGRI Jawa Tengah**

### **4.2.1 Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan (YPLP) Dikdasmen PGRI Jawa Tengah.**

YPLP Dikdasmen PGRI Jawa Tengah sebagai anak lembaga PGRI Propinsi Jawa Tengah merupakan pembina lembaga pendidikan PGRI untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK di seluruh Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada visi, misi dan tujuan organisasi .

#### **a. Visi, Misi dan Tujuan YPLP Dikdasmen PGRI Jawa Tengah Tahun 2004-2009**

Visi YPLP Dikdasmen PGRI Jawa Tengah: Merupakan lembaga pendidikan yang kokoh, berwibawa, memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman, mandiri, berakhlak mulia, berbudi luhur, berkepribadian dan menjadi warga negara yang bertanggungjawab.

Misi YPLP Dikdasmen PGRI Jawa Tengah: Mewujudkan lembaga Pendidikan yang kokoh dan berwibawa, Memberikan pelayanan yang berkualitas, Menjadikan lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan bermutu mampu proaktif menjawab tantangan zaman, mandiri, berakhlak mulia, berbudi luhur, berkepribadian dan bertanggung jawab, Mencerdaskan dan memberantas keterbelakangan.

Tujuan YPLP Dikdasmen PGRI Jawa Tengah: Melaksanakan program pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan menuju perwujudan cita-cita Proklamasi Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, Melaksanakan pembangunan bangsa khususnya upaya pelestarian jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, Membina dan menyelenggarakan lembaga pendidikan milik PGRI sebagai wadah kegiatan pendidikan yang mengemban misi dan identitas PGRI dalam usaha penghayatan, pengamalan dan pelestarian jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi penerus sebagai

lembaga pengembangan ilmu dan teknologi, Melaksanakan upaya pemerataan layanan pendidikan bagi rakyat terutama pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Meningkatkan mutu sekolah-sekolah PGRI.

**b. Kondisi YPLP Dikdasmen PGRI Jawa Tengah Tahun 2004-2009**

Kondisi YPLP Dikdasmen PGRI Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Pengangkatan kepengurusan YPLP Dikdasmen PGRI kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah secara definitif sesuai masa baktinya dilantik oleh pengurus pengurus YPLP Dikdasmen PGRI Jawa Tengah.
- b. Pergantian kepala sekolah dilakukan setiap empat tahunan, didahului dengan monitoring dan evaluasi baik yang akan diganti maupun diperpanjang masa baktinya atas dasar usulan dari YPLP PGRI Kabupaten/Kota selanjutnya ditetapkan oleh YPLP Dikdasmen PGRI Jawa Tengah.
- c. Pengangkatan guru tetap Yayasan di usulkan oleh sekolah/YPLP Dikdasmen Kabupaten/Kota selanjutnya ditetapkan oleh YPLP Dikdasmen Jawa Tengah.
- d. Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah seperti kursus sampai sekarang baru sebagian kecil kabupaten/kota yang menyelenggarakan.

e. Jumlah YPLP Dikdasmen PGRI kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah ada 33 sedangkan 2 daerah kab/kota yang belum memiliki YPLP Dikdasmen PGRI yaitu Kota Magelang dan Kota Pekalongan.

Setiap YPLP di tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah ada yang memiliki satu atau dua sekolah tetapi ada pula yang mempunyai 23 sekolah. Keadaan Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI yang bernaung di bawah YPLP Dikdasmen PGRI Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2  
Jumlah sekolah dan murid di bawah naungan  
YPLP Dikdasmen PGRI Provinsi Jawa Tengah  
dari tahun 2005 - 2008

No	Jenis	Jumlah Sekolah				Jumlah Siswa			
		Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
1	TK	216	349	344	343	12.203	11.833	13.257	11.925
2	SD	1	1	1	1	79	79	79	109
3	SMP	147	152	157	151	37.658	37.959	39.043	36.533
4	SMA	38	38	39	37	15.393	17.036	17.841	14.550
5	SMK	27	28	30	31	9.995	14.625	11.179	10.753
Jumlah		429	568	571	564				

Sumber : Daftar monografi tahun 2009 perkembangan sekolah-sekolah PGRI di YPLP Prop.Jawa Tengah.

Melihat daftar jumlah sekolah dan jumlah siswa PGRI di bawah yayasan YPLP Dikdasmen PGRI Jawa Tengah tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Jumlah Sekolah SD dari tahun ke tahun tidak mengalami perkembangan padahal jumlah siswanya di tahun terakhir ada peningkatan jumlah yaitu tahun 2007 sebanyak 79 siswa pada tahun 2008 meningkat menjadi 109 siswa.
- 2) Kurangnya perhatian pengurus YPLP Dikdasmen PGRI Jawa Tengah terhadap keberadaan Sekolah Dasar akan berakibat kesulitan dalam regenerasi pertumbuhan sekolah-sekolah SMP, SMA dan SMK di kemudian hari sebab tidak mempunyai input siswa dari interen yayasan sendiri.
- 3) Data diatas menunjukan kecenderungan bahwa semakin lama jumlah siswa yang bersekolah PGRI dalam semua tingkatan mengalami penyusutan. Contoh jumlah siswa SMP pada tahun 2007 berjumlah 39.043 menurun menjadi 36.533, siswa SMA yang semula 17.841 menjadi 14.550. Kemudian jumlah siswa SMK tiga tahun terakhir berturut-turut mengalami penurunan jumlah siswa. Kalau hal ini dibiarkan oleh pengurus tidak mustahil sekolah-sekolah PGRI akan tinggal sebuah nama.
- 4) Kecenderungan penurunan jumlah murid yang sangat menonjol tersebut disebabkan oleh banyak faktor, antara lain, Fasilitas sekolah dan sarana prasarana yang masih minim, sering terjadinya pergantian guru dan pegawai lama dan baru sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan, dan seiring dengan pendirian sekolah-sekolah unit gedung baru (UGB) yang banyak

didirikan oleh pemerintah menyebabkan banyak input siswa yang lebih memilih sekolah negeri dibanding ke sekolah PGRI, dampak ini sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh yayasan PGRI namun juga oleh sekolah-sekolah swasta yang lain seperti Yayasan Muhammadiyah, Sekolah NU dan tentunya sekolah yang lain. Dengan sedikitnya animo siswa yang ingin masuk sekolah di yayasan PGRI tentunya berdampak pada penurunan jumlah sekolah-sekolah PGRI dan pada akhirnya banyak yang gulung tikar. Langkah yang ditempuh pengurus yayasan menghadapi sekolah-sekolah yang mengalami nasib berkurangnya jumlah murid dilakukan dengan merger atau memindahkan siswa yang tersisa ke sekolah lain sebelum dilakukannya likuiditasi terhadap sekolah .

Jumlah guru dan pegawai di lembaga pendidikan Yayasan PGRI

Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3  
Jumlah tenaga kependidikan di bawah naungan YPLP Dikdasmen PGRI  
Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2005 – 2008

No	Tenaga Kependidikan	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
1	Guru Dpk	892	667	471	557
2	Guru Bantu	325	444	444	157
3	Guru tetap Yayasan	892	974	864	1.217
4	Guru tidak tetap	2905	3.324	2.927	2.711

5	Pegawai (PTT/PTY)	825	1.027	964	1.154
---	-------------------	-----	-------	-----	-------

Sumber : Daftar monografi perkembangan sekolah-sekolah PGRI di YPLP Prop.Jawa Tengah 2009

Dari tabel IV-3 dapat dijelaskan bahwa jumlah guru tetap yayasan mengalami pasang surut, terbukti pada tahun 2006 jumlah guru tetap 974 tetapi di tahun 2007 menurun menjadi 864 kemudian mengalami kenaikan 1217 pada tahun 2008. Hal ini bisa diprediksi bahwa status guru tetap di yayasan tersebut belum menjanjikan sehingga masih banyak guru yang semula sudah berstatus guru tetap keluar dan kemungkinan berpindah ke sekolah/yayasan pendidikan lain yang dipandang mungkin lebih menjanjikan kesejahteraannya.

Sekolah PGRI dibawah naungan YPLP Dikdasmen PGRI Propinsi Jawa Tengah ada yang sudah memiliki sertifikat tanah dan bangunan atas nama hak milik yayasan PGRI sendiri dan ada yang belum memiliki sarana gedung bangunan sekolah sehingga pelaksanaannya dengan menyewa atau pinjam pakai dengan instansi yang lain seperti aset pemda/pemkot setempat. Untuk mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan sekolah PGRI di bawah naungan YPLP PGRI Provinsi Jawa Tengah yang meliputi : Jumlah sekolah PGRI di setiap Kab/Kota di Jawa Tengah, Akreditasi sekolah, Status kepemilikan tanah dan gedungnya,

Jumlah kelas, Jumlah siswa, Jumlah guru dan pegawainya, serta status guru dan pegawainya dapat dilihat dalam tabel IV.4.

Perlu disampaikan bahwa sekolah TK dan SD di bawah naungan YPLP Dikdasmen PGRI Jawa Tengah Belum bisa dijelaskan dalam uraian disini sebab keberadaan sekolah tersebut pengelolaannya ada pada Pengurus YPLP Dikdasmen PGRI tingkat Kab/Kota masing-masing, sedangkan fokus penelitian hanya pada pengurus PGRI provinsi Jawa Tengah.



Tabel IV.4  
Keadaan sekolah YPLP PGRI tahun 2008/2009

N O	YPLP DIKDAS KAB/ KOTA	Jenis sekol ah	Akreditasi			Pemilikan				JUMLAH																
			D / C	A / B	S / A	Tanah		Gedung		Jml Kelas			Jml siswa			Kelamin		sisw a	Guru					Pegawai		
						Pjm	sdr	Pjm	sdr	1	2	3	1	2	3	pa	pi			dp k	gty	Gtt	B nt	jml	pty	ptt
1	Kota Semarang	SMP	1	2			3		3	10	9	8	407	320	337	603	578	1181	6	13	30		49	3	7	10
		SMA	-	1			1		1	1	2	2	26	25	43	60	34	9		24			24		3	3
		SMK	1	1		1	1	1	1	5	5	4	212	195	138	30	515	545	1	9	45	1	56	5	2	7
2	Kota Salatiga	SMA	1				1		1			1			12	6	6	12	5	3	2		10	2	3	5
		SMK	1	2			3		3	10	13	8	340	271	271	444	639	1083	18	6	56		80	11	11	22
3	Kab.Grobogan	SMP	4	3		2	5		7	15	16	15	508	501	482	776	715	1491	3	13	134	1	151	2	21	23
		SMA	1	2		2	1	2	1	14	14	15	560	532	660	929	813	1742	7	25	75		107	2	20	22
4	Kab.Semarang	SMP	2	1		1	2		3	3	4	5	70	107	120	183	114	297	8	12	13		33	2	3	5
5	Kab. Demak	SMP	1	2			3		3	9	12	9	324	457	283	419	645	1064	20	6	52		78	11	11	22
		SMA		1			1		1	2	2	3	80	88	93	130	131	261		2	15	1	18		3	3
6	Kab. Kendal	SMP	3	8	1		12		12	26	26	31	937	922	1067	1643	1243	2926	13	60	126	2	201	26	29	55
		SMA		2	1		3		3	10	11	14	349	427	486	668	594	1262	6	44	39		89	15	9	24

N O	YPLP DIKDAS KAB/ KOTA	Jenis sekol ah	Akreditasi			Pemilikan				JUMLAH																
			D / C	A / B	S / A	Tanah		Gedung		Jml Kelas			Jml siswa			Kelamin		sisw a	Guru					Pegawai		
						Pjm	sdr	Pjm	sd r	7	8	9	7	8	9	pa	pi			dp k	gt y	Gtt	Bnt	jml	pty	ptt
7	Kab.Pati	SMP	1	3		1	3		4	7	7	7	284	293	283	453	407	860	3	1	76		80		16	16
		SMA		2	1		3		3	22	23	25	972	926	1006	1492	1412	2904	21	53	88		162	1	38	39
8	Kab.Kudus	SMP		1	1		2		2	4	5	4	107	152	167	280	146	426	7	3	23	3	36		8	8
		SMA	1	1			2		2	4	5	4	130	144	167	291	150	441	4	3	26		33	3	5	8
		SMK		2			2		2	15	13	12	606	535	481	506	1116	1622	11	26	44		81	9	15	24
9	Kab. Jepara	SMA		1			1		1	4	5	4	161	191	147	210	289	499	12	6	20		38	2	6	8
10	Kab.Rembang	SMP	1				1		1	2	2	2	44	56	64	84	80	164	2	17			19		3	3
11	Kab. Blora	SMP	3	2		1	4	1	4	8	9	9	270	283	241	425	383	808	3	18	44	1	66	5	11	16
		SMA	1	1			2		2	6	6	7	239	257	266	307	455	762	4	14	28	1	47	8	3	11
		SMK	2				2		2	5	5	4	108	95	118	79	242	321	2	18	28		48	2	5	7

( status kepemilikan tanah dan bangunan, status sekolah dan keadaan murid dan guru)



NO	YPLP DIKDAS KAB/ KOTA	Jenis sekolah	Akreditasi			Pemilikan				JUMLAH																
			D / C	A / B	S/ A	Tanah		Gedung		Jml Kelas			Jml siswa			Kelamin		siswa	Guru					Pegawai		
						Pjm	sdr	Pjm	sdr	7	8	9	7	8	9	pa	pi		dp k	gt y	Gt t	Bn t	jml	pty	ptt	jml
12	Kota Surakarta	SMP		1			1		1	2	2	3	62	59	64	107	78	185	9		12		21	4		4
		SMK	1	1			2		2	5	5	5	183	166	141	438	72	510	18	5	34		57	4	7	11
13	Kab. Boyolali	SMP	1				1		1	1	1	1	15	18	17	25	25	50	1	4	8		13		2	2
14	Kab. Klaten	SMP	2	3	2	1	6	1	6	9	11	13	217	334	348	518	381	899	51	20	56		127	3	22	25
		SMK	1	1	1		1	1	1	7	9	9	273	327	325	24	907	931	9	14	51	1	75	2	19	21
15	Kab. Sukoharjo	SMK			1		1		1	6	8	8	258	310	304	5	867	872	8	6	39	6	59	3	12	15
16	Kab. Wonogiri	SMP	3	3		2	4		6	9	8	11	333	291	307	530	401	931	8	13	76	1	98	2	15	17
		SMA		1			1		1		1	2		7	24	18	13	31	9	1	8		18		8	8
		SMK	1	1			2		2	3	2	2	60	41	71	115	57	172	8	4	24		36	4	17	21
17	Kab. Karang anyar	SMP	1	2			3		3	7	7	7	218	224	231	360	313	673	15	3	54		72		11	11
		SMA	1			1		1		1	1	1	11	12	21	25	19	44	1	1	12		14		1	1
		SMK	2			1	1		2	2	2	3	41	40	50	130	1	131	4	12	22		38		6	6
18	Kab.Sragen	SMP	1	7		1	7		8	14	17	16	468	569	544	940	667	1607	31	28	83	5	147	7	19	26
		SMA	1		1	1	1	1	1	4	6	7	153	228	286	294	373	667	24	13	34		71	14	7	21
		SMK		1			1		1	6	7	5	221	254	193	8	660	668	14	31	3		48	8	6	142

N O	YPLP DIKDAS KAB/ KOTA	Jenis sekol ah	Akreditasi			Pemilikan				JUMLAH																
			D / C	A / B	S / A	Tanah		Gedung		Jml Kelas			Jml siswa			Kelamin		sisw a	Guru					Pegawai		
						Pjm	sdr	Pjm	sdr	7	8	9	7	8	9	pa	pi		dp k	gt y	Gtt	Bn t	jml	pty	ptt	jml
19	Kota Pekalongan							k	o	s	o	n	g													
20	Kab. Pekalongan	SMA		1	1		2		2	6	8	8	219	288	277	285	499	784	5	4	48	4	61	1	16	17
21	Kab. Batang	SMP		1			1		1	2	2	2	85	87	78	126	116	242			19		19		9	9
		SMK		1			1		1	5	5	5	239	214	202	78	577	655	2	1	31	7	41	1	13	14
22	Kab. Pemalang	SMP	1	6		1	6	1	6	17	16	19	660	629	773	972	1090	2062	4	27	100	10	141	4	37	41
		SMA		1	2		3		3	16	18	20	597	693	788	990	1088	2078	10	21	82	5	118	21	21	42
		SMK		3			3		3	17	15	15	642	624	526	662	1130	1792	2	19	100		121	2	35	37
23	Kab. Brebes	SMP		1	1	1	1	1	1	5	5	5	235	217	226	361	317	678	12	3	26		41		12	12
		SMA		1			1		1	4	5	6	176	211	265	336	316	652	2		34		36		15	15
24	Kota Tegal	SMA		1			1		1	1	1	1		18	27	27	18	45	1	3	11		15	3	1	4
		SMK		1			1		1	5	6	4	222	215	148	58	527	585	4	9	15		28	10	3	13

N O	YPLP DIKDAS KAB/ KOTA	Jenis sekol ah	Akreditasi			Pemilikan				JUMLAH																
			D / C	A / B	S / A	Tanah		Gedung		Jml Kelas			Jml siswa			Kelamin		sisw a	Guru					Pegawai		
						Pjm	sdr	Pjm	sd r	7	8	9	7	8	9	pa	pi		dp k	gty	Gtt	Bn t	jml	pt y	ptt	jml
25	Kab.Tegal	SMP		2			2		2	3	2	2	85	71	63	128	91	219	2		28		30		6	6
		SMA		1			1		1	2	3	6	88	111	190	177	212	389	6	25	7		38	8	1	9
26	Kota Magelang							0		0																
27	Kab. Magelang	SMP	2	3		1	4	1	4	9	9	8	302	282	234	419	399	818	6	4	48	2	60		10	10
28	Kab. Kebumen	SMP	8	9		1	16	1	17	58	61	62	2193	2320	2256	3110	3549	6659	32	146	149	16	343	30	63	93
		SMA		2	1		3		3	6	7	9	187	216	308	418	393	811	5	17	34	2	58		18	18
		SMK	1	1			2		2	7	6	8	237	202	206	50	594	644	3	28	30	2	63	13	10	23
29	Kab. Purworejo	SMP	2	3	1		6		6	13	14	14	487	450	457	752	664	1416	14	36	88	1	139	5	22	27
		SMK		1			1		1	2	2	3	63	65	82	46	164	210		1	22		23		5	5
30	Kab. Temanggung	SMP	4	2		2	4		6	7	6	6	216	175	186	332	245	577	12	22	32		66	7	10	17
		SMA			1		1		1	2	3	4	84	131	135	197	153	350	7	6	17		30	4	6	10
		SMK	1			1		1		1	1		7	18		21	4	25			12		12	2		2

N O	YPLP DIKDAS KAB/ KOTA	Jenis seko- lah	Akreditasi			Pemilikan				JUMLAH																	
			D / C	A/ B	S/ A	Tanah		Gedung		Jml Kelas			Jml siswa			Kelamin		sisw a	Guru					Pegawai			
						Pj m	sdr	Pjm	sdr	7	8	9	7	8	9	pa	pi			dp k	gty	Gtt	Bnt	jml	pt y	ptt	jm l
31	Kab. Wonosobo	SMP	2	2			4		4	6	7	7	217	206	216	327	312	639		13	20	21		54	6	5	
		SMA	0					0			0																
		SMK	1				1		1	3	2	1	105	53	31	104	85	189				18		18	1	1	2
32	Kab. Banyumas	SMP	4	8	3	1	14		15	35	37	37	1232	1314	1198	1686	2148	3834		26	116	77	28	247	45	20	65
		SMA		2			2		2	4	4	4	163	150	170	236	247	483			10	30	3	43	1	3	4
33	Kab. Cilacap	SMP	5	11	1	4	13		17	51	46	49	1862	1732	1932	2753	2743	5496	20	157	129	43	349	40	44	84	
		SMA		1		1			1	1	1	1	46	48	43	67	70	137			3	15		18	1	2	3
34	Kab.Purbalingga	SMP	1			1			1	1	1	1	50	18	13	36	45	81			1	11		12		1	1
		SMK	1			1			1	3	2	3	107	47	90	244		244			3	19		22		6	6
35	Kab.Banjarnegar a	SMP	1	1			2		2	2	3	3	80	80	90	100	150	250			7	10	5	22		6	6
		SMA		1			1		1	1	1	1	30	0	42	42	60	102	4	6	2	4	16		6	6	
		SMK	1			1		1		1	1	1	37	36	36	39	70	109				11	3	14		5	5

Tabel :IV.5

N O	Jenis Sekolah	JML Sek.	Akreditasi			Pemilikan				JUMLAH																
			D/ C	A/B	S/ A	Tanah		Gedung		Jml Kelas			Jml siswa			Kelamin		siswa	Guru					Pegawai		
						Pj m	sdr	Pj m	sdr	7	8	9	7	8	9	pa	pi		dpk	gty	Gtt	Bnt	jml	pty	ptt	jml
1	SMP	151	54	87	10	21	130	6	146	335	345	359	11968	12177	12277	18448	18045	36533	321	750	1525	118	2714	202	423	625
2	SMA	37	6	23	8	5	32	4	33	111	127	145	4271	4703	5456	7205	7345	14550	133	284	627	20	1064	86	195	281
3	SMK	31	14	16	1	6	25	4	27	108	109	100	3961	3708	3413	3081	8227	11308	104	192	604	20	920	77	178	255
	Jumlah	219	74	126	19	32	187	14	206	554	581	601	20200	20588	21146	28734	33617	62391	558	1226	2756	158	4698	365	796	1161

Rekapitulasi Keadaan sekolah YPLP Dikdasmen PGRI Jawa Tengah  
( status kepemilikan tanah dan bangunan, status sekolah dan keadaan murid dan guru

Sumber : Data perkembangan sekolah-sekolah PGRI di YPLP Dikdas PGRI Jawa Tengah bulan Desember 2008





Pada tabel IV.5 data tahun 2008 menunjukkan bahwa jumlah sekolah SMP, SMA dan SMK adalah 219 sekolah namun jumlah sekolah PGRI yang mempunyai tanah dengan status hak milik sendiri hanya 187 sekolah sehingga ada sekitar 32 sekolah yang belum mempunyai tanah dengan status milik sendiri. Jumlah sekolah yang memiliki fasilitas gedung yang berstatus hak milik sendiri ada 206 sekolah, ada 13 sekolah yang fasilitas tempat belajar dan belajarnya masih menumpang milik orang lain. Dengan hanya mengandalkan sewa pakai gedung sekolah tentunya sangat mengganggu aktivitas pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa kurang perhatiannya pengurus yayasan terhadap keberadaan sekolah-sekolah PGRI.

#### **4.2.2 Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI (YPLP PT PGRI) Jawa Tengah**

YPLP PT PGRI sebagai anak lembaga PGRI Propinsi Jawa Tengah merupakan pendiri dan sekaligus menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi bagi masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan bagi para anggota PGRI/Guru SD pada khususnya yang ingin melanjutkan ke jenjang Strata satu.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di bawah naungan Pengurus Besar PGRI Propinsi Jawa Tengah tersebut bernama IKIP PGRI Semarang.

Adapun fungsi yayasan adalah membina dan mengembangkan IKIP PGRI Semarang. Sedangkan tugas yayasan adalah sebagai berikut: Menetapkan visi dan misi serta tujuan IKIP PGRI Semarang, Menetapkan kebijakan dasar (statuta) IKIP PGRI Semarang, Menetapkan rencana strategis (Renstra) dan rencana operasional (Renop) IKIP PGRI Semarang.

Melakukan monitoring, evaluasi terhadap kegiatan IKIP PGRI Semarang di bidang Keuangan, Sumber daya manusia dan Sarana Prasarana, Melakukan koordinasi dengan pimpinan IKIP PGRI Semarang di bidang akademik.

Sesuai dengan AD/ART pelaksanaan tugas dan fungsi YPLP PT PGRI Semarang antara lain melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi bidang Keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Untuk bidang akademik pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh instansi pemerintah (Kopertis dan Departemen Pendidikan Nasional

Pada awal berdirinya IKIP PGRI Jawa Tengah membuka 3 Fakultas, yaitu: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dengan jurusan Bimbingan dan penyuluhan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) dengan jurusan Civic

Hukum, Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan (FPOK) dengan jurusan Pendidikan Olah Raga.

Rektor IKIP PGRI Jawa Tengah yang pertama adalah Drs.Thomas Sabar Adiutomo. Pada tanggal 29 Agustus 1984 jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMP-KN) dan Psikolog Pendidikan dan Bimbingan (PPB) dengan program Strata Satu (S1) memperoleh Status Terdaftar melalui surat Keputusan Mendikbud No. 0395/O/1984. Pada saat itu sekaligus ditetapkan perubahan bentuk dari IKIP PGRI Jawa Tengah menjadi STKIP PGRI Jawa Tengah. Pada saat Rektor dijabat oleh Taruna, S.H., sebagai rektor kedua, melalui Surat Kopertis Wilayah VI Nomor: 142/K/14/Kop.VI/VI/1987 tanggal 12 Juni 1987, STKIP PGRI Jawa Tengah memperoleh Persetujuan sementara pembukaan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Matematika. Kemudian ketiga program studi tersebut melalui Surat Keputusan Mendikbud RI No. 088 /O/1989 mendapatkan Status terdaftar. Dengan demikian, STKIP PGRI Jawa Tengah memiliki 5 (lima) jurusan yang telah memiliki status terdaftar.

Melalui SK Mendikbud RI No. 088/O/1990 tertanggal 5 Februari 1990 STKIP PGRI Jawa Tengah berubah bentuk menjadi Institut Keguruan dan Ilmu

Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang, dengan 4 (empat) Fakultas dan 5 (lima) Jurusan.

Tabel IV.6  
Daftar fakultas dan jurusan pada IKIP PGRI Semarang  
di bawah pengelolaan YPLPT PGRI Jawa Tengah tahun 1990

No	Fakultas	Jurusan	Status
1	Ilmu Pendidikan	Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (S1)	terakreditasi
2	Pendidikan IPS	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1)	terakreditasi
3	Pendidikan Bahasa dan Seni	Pendidikan Bahasa Inggris (S1)	terakreditasi
		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S1)	terakreditasi
4	Fakultas Pendidikan MIPA	Pendidikan Matemática (S1)	terakreditasi

Sumber :BAAK IKIP PGRI Semarang

Saat ini IKIP PGRI Semarang sebagai anak lembaga PGRI Provinsi Jawa Tengah dalam pembinaannya secara operasional dilakukan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP PT) PGRI Semarang yang kedudukannya berada di bawah YPLP PGRI Pusat.

Perkembangan selanjutnya saat ini IKIP PGRI Semarang memiliki 4 (empat) fakultas dengan 10 (sepuluh) jurusan/program studi sebagai berikut:

Tabel IV.7  
Daftar fakultas dan jurusan pada IKIP PGRI Semarang  
di bawah pengelolaan YPLPT PGRI Jawa Tengah tahun 2009

No	Fakultas	Jurusan	Status
1	Ilmu Pendidikan	Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (S1)	terakreditasi
		Pendidikan Guru Taman Kanak Kanak (D2)	terakreditasi
2	Pendidikan IPS	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1)	terakreditasi
3	Pendidikan Bahasa dan Seni	Pendidikan Bahasa Inggris (S1)	terakreditasi
		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1)	terakreditasi
		Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa (S1)	terakreditasi
4	Fakultas Pendidikan MIPA	Pendidikan Matematika (S1)	terakreditasi
		Pendidikan Biologi (S1)	terakreditasi
		Pendidikan fisika (S1)	terakreditasi

Sumber :BAAK IKIP PGRI Semarang

Dengan membandingkan tabel 4.4 dengan tabel 4.5 menunjukkan bahwa perkembangan perguruan tinggi yang dikelola YPLPT PGRI Semarang menunjukkan kemajuan yang sangat pesat terbukti dengan satu dasawarsa jumlah mahasiswa dan program studi/jurusan yang dikelola bertambah.

Keadaan jumlah dosen, karyawan dan mahasiswa pada IKIP PGRI Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel IV.8  
Jumlah dosen, karyawan dan mahasiswa IKIP PGRI Semarang tahun 2009

No	Dosen/Karyawan	Jumlah	Total
1.	Dosen :		
	c. PNS/DPK	32 Orang	
	d. Tetap yayasan	34 Orang	
	e. Honorer	16 Orang	
	f. Luar Biasa	170 Orang	252 Orang
	Karyawan :		
	d. Tetap yayasan	53 Orang	
	e. Kontrak	15 Orang	84 Orang
	f. Honorer	16 Orang	
	Jumlah		336 Orang

Sumber: Bagian Kepegawaian IKIP PGRI Semarang

Tabel IV.9  
Jumlah mahasiswa IKIP PGRI dari tahun 2004 s/d 2009

No	Mahasiswa	Jumlah
2.	Mahasiswa :	
	6. Tahun 2004/2005	9.895 Orang
	7. Tahun 2005/2006	13.813 Orang
	8. Tahun 2006/2007	10.171 Orang
	9. Tahun 2007/2008	11.196 Orang
	10. Tahun 2008/2009	12.450 Orang

Sumber: Bagian BAAK IKIP PGRI Semarang

Melihat tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dosen dan karyawan belum ideal dengan jumlah mahasiswa karena jumlah mahasiswa pada tahun

terakhir sebanyak 12.450 orang sedangkan jumlah dosen tetap yayasan dan PNS/DPK nya hanya 66 orang sehingga prosentase jumlah dosen tetap dengan mahasiswa adalah 1:189

#### **4.2.3 Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI cabang Jawa Tengah**

Tenaga kependidikan terutama guru mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya (pasal 40 UU No.20 tahun 2003). Hal tersebut merupakan hak normatif bagi guru yang sudah sewajarnya harus diterima ketika menjalankan kewajibannya. Dalam realitasnya perlindungan hukum terhadap profesionalisme guru masih belum sesuai harapan.

PGRI sebagai organisasi perjuangan bagi guru telah mendirikan lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH) PGRI cabang Jawa Tengah. LKBH PGRI ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam hal pengabdian dan memberikan perlindungan hukum bagi para guru. LKBH PGRI berdiri sejak tahun 1999 sebagai anak lembaga dari Pengurus Daerah PGRI Jawa Tengah. LKBH PGRI Jawa Tengah mempunyai tujuan, kegiatan dan sasaran .

1) Tujuan LKBH PGRI Jawa Tengah :



- a. Memajukan dan menegakkan hukum sesuai dengan pembangunan hukum nasional dan tuntutan perkembangan masyarakat.
- b. Menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama guru/anggota PGRI.
- c. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama kepada guru/anggota PGRI yang memerlukannya baik yang diminta maupun tidak diminta.

2) Kegiatan :

- a. Memberikan konsultasi hukum baik langsung maupun tidak langsung.  
Konsultasi secara langsung dilakukan melalui tatap muka dengan para konsultan hukum PGRI Jawa Tengah setiap hari kerja. Konsultasi secara tidak langsung dilakukan dengan melalui surat, faks maupun telepon.
- b. Memberi bantuan hukum melalui proses pengadilan (*litigasi*) maupun di luar pengadilan (*nonlitigasi*). Bantuan hukum litigasi yaitu memberikan pembelaan atau melakukan gugatan ke pengadilan atas dasar surat kuasa baik melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan bantuan hukum yang bersifat nonlitigasi diberikan dengan cara penyelesaian hukum di luar pengadilan. Prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum dilakukan dengan cara : Klien datang

atau melalui surat yang telah mendapatkan rekomendasi dari pengurus daerah PGRI Kabupaten/Kota mereka berdomisili yang disertai surat pengaduan yang berisi uraian peristiwa hukum yang dialaminya disertai dengan bukti-bukti awal. Bantuan hukum juga bisa diberikan atas inisiatif LKBH PGRI itu sendiri manakala ada laporan bahwa anggota PGRI mengalami permasalahan hukum.

- c. Memberikan penyuluhan hukum dengan cara ceramah, dialog, diskusi, seminar, menerbitkan buku atau brosur tentang penyuluhan hukum.
- d. Permintaan kegiatan ceramah dan seminar dilakukan dengan cara, Pengurus daerah PGRI Kabupaten/Kota mengajukan surat permohonan untuk pelayanan penyuluhan hukum kepada LKBH PGRI Jawa Tengah.
- e. Berusaha memperjuangkan disahkannya PP tentang Guru dan Dosen sebagai implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen.

#### **4.2.4 Koperasi PGRI Jawa Tengah**

Koperasi PGRI Jawa Tengah adalah sebuah lembaga di bawah naungan Pengurus PGRI Propinsi Jawa Tengah. Koperasi ini bernama “Koperasi Kosera atau Koperasi Sejahtera”. Koperasi didirikan tanggal 2 Mei 2000 dengan berbadan hukum Nomor 14013/ BH/KWK/II/X/2000 tanggal 2 Oktober 2000. Berdasarkan

akta pendiriannya, Koperasi Sejahtera PGRI Jawa Tengah dapat menerima keanggotaan dari seluruh guru PNS/Swasta dan karyawan dilingkungan pendidikan se-Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi. Jenis usaha yang dilakukan koperasi pada saat ini adalah; Simpan pinjam, Perkreditan, Wartel dan Pengadaan Sembako.

#### **4.2.5 Badan Khusus PGRI Jawa Tengah**

Badan khusus PGRI Jawa Tengah terdiri dari dua badan usaha yang diberi kepercayaan untuk mengembangkan usahanya secara maksimal. Pemberian kepercayaan ini diharapkan dapat bekerja secara maksimal dan dapat memberikan kontribusi kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada para anggota PGRI. Dua badan khusus tersebut: Yayasan Dana Pensiun Setia Kawan PGRI dan Forum Komunikasi Pengembangan Profesi Guru (FKPPG) PGRI Jawa Tengah.

#### **1. Yayasan Dana setia kawan pensiun PGRI Jawa Tengah**

Yayasan dana setiakawan pensiun PGRI Jawa Tengah (Yayasan Daspen PGRI Jateng) lahir 24 Nopember 1985 di Surakarta bertepatan dengan hari guru/PGR ke-40. PGRI berpendapat bahwa anggota PGRI yang memasuki masa pensiun perlu memperoleh bekal. Para pendiri bersepakat perlunya penggalangan

rasa solidaritas antar guru dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam PGRI untuk menyumbang rekan sekerjanya yang memasuki usia pensiun.

Dalam musyawarah antar pengurus PGRI Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah akhirnya disepakati melalui Yayasan Dana Setiakawan Pensiun PGRI Jawa Tengah, para anggota PGRI memberikan sumbangan dana pensiun kepada anggota lainnya yang pensiun dan memberikan dana duka bagi anggota yang meninggal sebelum pensiun diberikan kepada ahli warisnya. Besarnya dana duka yang diterima kepada anggota yang meninggal dengan kategori sebagai berikut:

Tabel IV.10  
Besar dana duka bagi anggota PGRI yang meninggal

No	Kategori	Kelompok usia	Dana duka
1	I	Usia s/d 30 tahun	Rp 450.000
2	II	Usia 31 s/d 40 tahun	Rp 550.000
3	III	Usia 41 s/d 50 tahun	Rp 650.000
4	IV	Usia 51 s/d 55 tahun	Rp 750.000
5	V	Usia 56 tahun keatas	Rp 1.250.000

Sumber :Bagian Tata Usaha pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah tahun 2009

Seorang anggota yang pensiun akan memperoleh dana pensiun apabila telah memasuki batas usia pensiun, memasuki usia uzur dan memasuki masa pensiun karena permintaan sendiri. Ketentuan penerimaan dana santunan pensiun ditetapkan sebagai berikut .

Tabel IV.11  
 Besar dana pensiun/pesangon bagi anggota PGRI  
 Berdasarkan usia pensiun

No	Usia Pensiun	Dana yang di peroleh
1	50 tahun	Rp 1.100.000,-
2	51 tahun	Rp 1.150.000
3	52 tahun	Rp 1.200.000
4	53 tahun	Rp 1.250.000
5	54 tahun	Rp 1.300.000
6	55 tahun	Rp 1.400.000
7	56 tahun s/d 59 tahun	Rp 1.600.000
8	60 tahun s/d 64 tahun	Rp 1.650.000
9	65 tahun s/d 69 tahun	Rp 1.700.000
10	70 tahun	Rp 1.750.000

Sumber : Bagian Tata Usaha pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah tahun 2009

Ketentuan tersebut berlaku mulai tahun 2000, setiap tahun dana pensiun akan mengalami kenaikan Rp 25.000 dari besarnya ketetapan menurut usia pensiun.

Bagi anggota yang mengikuti program Daspen selama 10 tahun atau kurang berlaku ketentuan sebagai berikut :

Tabel IV.12  
 Besar dana pensiun/pesangon bagi anggota PGRI  
 Yang mengikuti kurang dari 10 tahun

No	Lama keanggotaan	Dana yang di peroleh
1	10 tahun	Rp 1.420.500,-
2	9 tahun	Rp 1.305.000,-

3	8 tahun	Rp	1.185.000
4	7 tahun	Rp	1.170.000
5	6 tahun	Rp	950.000
6	5 tahun	Rp	835.000
7	4 tahun	Rp	720.000
8	3 tahun	Rp	600.000
9	2 tahun	Rp	485.000
10	1 tahun	Rp	370.000

Sumber: Bagian Tata Usaha pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah tahun 2009

Yayasan Dana Setiakawan Pensiun PGRI Jawa Tengah pada bulan Juni 2007 telah menyesuaikan dengan UU no. 16 Tahun 2001, dengan penyesuaian menjadi Yayasan Dana Setiakawan Guru Jawa Tengah yang manfaat utamanya adalah memberikan santunan kepada anggota/guru yang pensiun, dan uang duka kepada anggota/guru yang meninggal. Sejak tahun 1987 sampai bulan Desember 2007 telah memberikan sumbangan untuk 95.911 orang yang purnatugas dengan nominal Rp. 115.551.533.506,25

## **2. Forum Komunikasi dan Pengembangan Profesi Guru (FKPPG) PGRI**

### **Jawa Tengah.**

Dalam rangka meningkatkan peranserta PGRI terhadap upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, PGRI Jawa Tengah memandang

perlu membentuk dan mengelola media/forum yang dapat mengembangkan profesi guru. Media tersebut bernama Forum Komunikasi Pengembangan Profesi Guru PGRI yang dibentuk di setiap Kabupaten/ kota se-Jawa Tengah.

Tugas dari FKPPG PGRI adalah membantu guru agar dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi guru, yang meliputi :

- a. Melaksanakan kegiatan karya ilmiah dibidang pendidikan, penemuan metodologi pembelajaran, membuat media pembelajaran, penciptaan karya seni dan upaya pengembangan kurikulum
- b. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan agar kegiatan pengembangan profesi yang dilaksanakan oleh para guru dapat diakui dan memperoleh angka kredit sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 025/O/1995 tentang petunjuk teknis ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.
- c. Memberikan pertimbangan, saran kepada pengurus PGRI Propinsi Jawa Tengah dalam rangka memberikan pengesahan kegiatan pengembangan profesi guru jika diperlukan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bentuk kegiatan yang dilakukan forum FKPPG PGRI meliputi ceramah, diskusi, seminar, penataran, lokakarya, pembimbingan, konsultasi, kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan kondisi masing-masing daerah.

Susunan pengurus FKPPG PGRI terdiri dari : Penanggung jawab: Ketua PGRI kab/kota, ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil.

### **3. Badan penerbitan PGRI Jawa Tengah**

Yayasan penerbitan PGRI Jawa Tengah berdiri berdasarkan SK Pengurus PGRI provinsi Jawa Tengah Nomor:203/KE/Prov./XIX/2004 tanggal 25 September 2004. Badan penerbitan PGRI Jawa Tengah merupakan bentuk usaha yang bergerak dalam bidang jasa percetakan. Sampai saat ini baru mampu menerbitkan majalah PGRI yang berjudul “Derap Guru Jawa Tengah” dan kalender. Kendala yang masih dihadapi adalah pembayaran majalah dari PGRI Kabupaten/kota yang masih sering tertunda. Modal Derap guru Jateng dari pinjaman yayasan dana setiakawan guru Jawa Tengah sebesar Rp 800.000.000,00.

Badan Penerbitan PGRI Jawa Tengah. Badan khusus ini sejak Februari 2000 menerbitkan majalah ***Derap Guru Jateng*** yang terbit setiap bulan. Sampai sekarang telah menerbitkan 118 edisi. Majalah ini melayani pelanggan sebanyak 19.837 eksemplar

Profil media majalah Derap Guru :



Penerbit : Badan penerbitan PGRI propinsi Jawa Tengah.  
Alamat redaksi : Jl.Lontar No. 1 (Sidodadi) Semarang Telepon 024-8453858 Fax 024- 8453858  
E-mail : [derap\\_guru@yahoo.com](mailto:derap_guru@yahoo.com)  
Data Media  
Terbit perdana : 5 Februari 1999  
Bentuk : Majalah  
Kategori : Majalah bulanan berita dunia pendidikan  
Sifat media : Majalah khusus organisasi  
Tanggal terbit : Tanggal 1 setiap bulannya  
Percetakan : CV Krida Karya .  
Alamat percetakan : Jl. Cempedak selatan 42 Semarang.

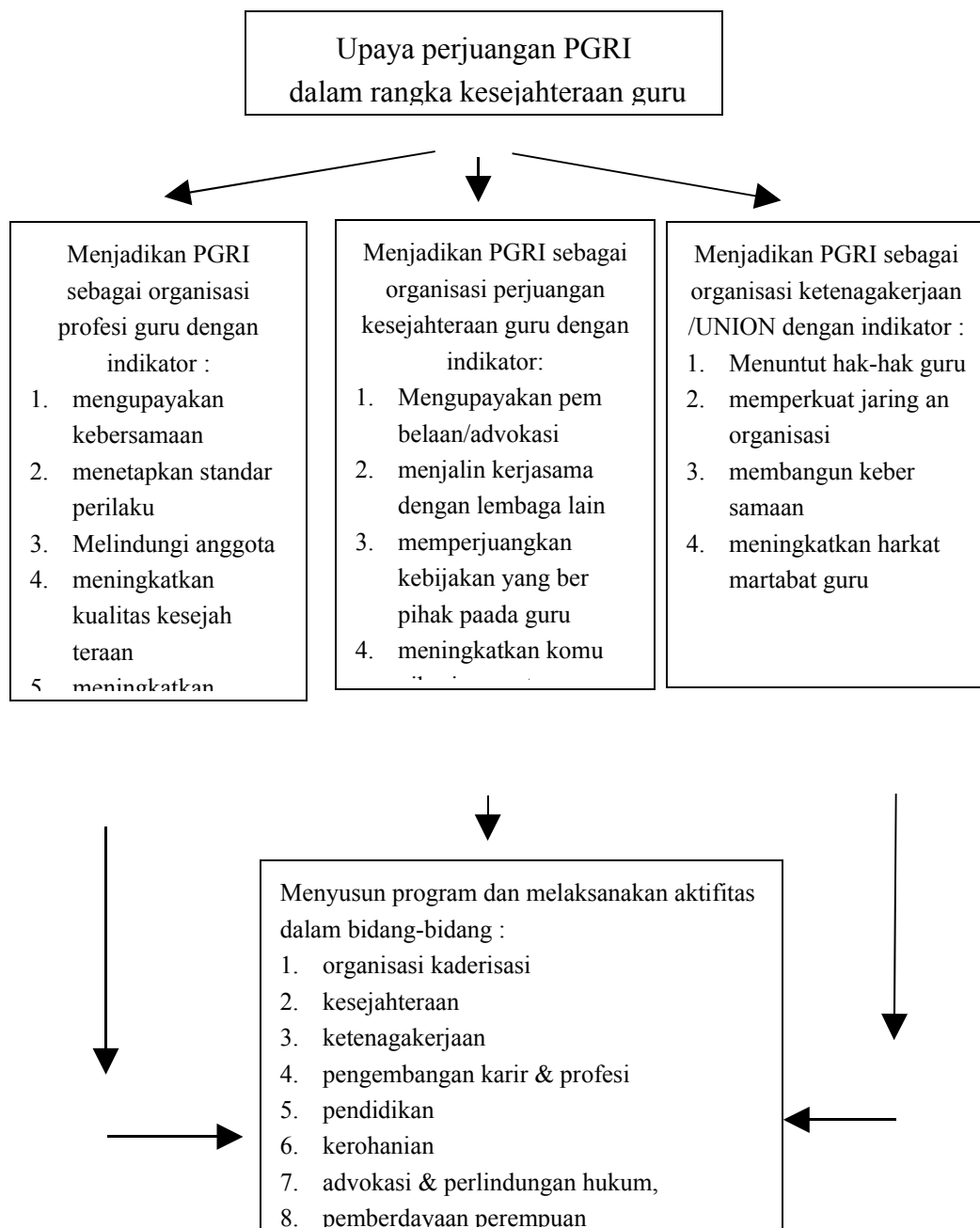
Program kerja dan kegiatan badan penerbitan PGRI Jawa Tengah dalam bidang organisasi mempunyai kegiatan meningkatkan manajemen pengelolaan aset dan keuangan penerbitan majalah derap guru Jawa tengah, meningkatkan mutu penulisan penerbitan, menerbitkan kalender, berusaha mengembangkan penerbitan buku, meningkatkan pelanggan majalah derap guru.

Dalam kegiatan ilmiah badan penerbitan PGRI Jawa Tengah menyelenggarakan diskusi dan kajian tentang manajemen penerbitan yang efektif. Menyelenggarakan sarasehan peningkatan kompetensi menulis bagi para wartawan majalah derap guru dan menyelenggarakan lomba opini, karikatur dan artikel bagi para pembacanya.

#### 4.3. Program Kerja dan Kegiatan Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah

periode 2004 s/d 2009

Sesuai dengan misinya bahwa PGRI berupaya memperjuangkan kesejahteraan guru melalui bidang tahapan sebagai berikut :





N O	Program dan kegiatan	Pelaksanaan / realisasi		Justifikasi organisasi PGRI		
				Profesi	Kesra	Ketenagaan
1	Rekrutmen anggota baru: Pengadaan/cetak blangko KTA PGRI	Feb 2006				V
2	Menyusun data anggota dan Organisasi:  Mengingatkan PGRI kab/kota untuk pengirim data anggota terbaru	Juli 2006				V
3	Konferkab/kota  Memberikan motivasi diseenggarakannya konferda, antara lain	(1) Kab. Kebumen	16 Jan 2006			V
		(2) Kab.Banjarnegara	17 Feb 2006			V
		(3) Kab.Temanggung	11 Feb. 2006			V
		(4) Kab.Semarang	4 Maret 2006			V
		(5) Kab.Karanganyar	7 Maret 2006			V
		(6) Kab.Banyumas	8 April 2006			V
		(7) Kab.Magelang	14April 2006			V
		(8) Kab.Blora	10 Juni 2006			V
		(9) Kab.Cilacap	16 Sept 2006			V
		(10)Kab.Purbalingga	9 des 2006			V
		(11)Kab.Boyolali	16 des 2006			V
		(12)Kota.Semarang	3 Feb 2006			V
		(13)Kab. Kebumen	16 Jan 2006			V
4	Menjalin kerjasama dengan instansi lain:					
	a.Unicef-Bapeda Jawa Tengah	Whorkshop flu burung	15 Juni 2006	V		
		Monitoring sosmob flu burung di 23 kab/kota se-Jateng	30 Juni 2006			V
	b.KPID Jawa Tengah	Dialog public ”Tayangan tele visi yang memihak masyarakat”	17 Mei 2006	V		
	c. Dinas P dan K Pemda Jawa Tengah:	1. Sarasehan pendidikan oleh dewan pendidikan Jateng	13 juni 2006	V		
		2. Workshop pemanapan hasil studi tentang kekerasan terhadap anak	Agts-sept 2006	V		
		3. Konsolidasi FGD rencana kerja pembangunan daerah 2007	17-18 Mei 2006	V		
		4. sosialisasi liberalisasi jasa pendidikan dalam kerangka Wto	28 feb 2006	V		

Program kerja dan kegiatan yang menyangkut organisasi dan kaderisasi bagi anggota PGRI Jawa Tengah tahun 2006 adalah sebagai berikut :

### Lanjutan bidang organisasi dan Kaderisasi

N O	Program dan kegi- atan	Pelaksanaan / realisasi		Justifikasi organisasi PGRI		
				Profesi	Kesra	Ketena gaan
5		5. Koordinasi pelaksanaan ujian nasional 2005/2006	13 maret 2006	V		
	d. KSPI :	Pertemuan sosialisasi renstra KSPI penolakan revisi UU ketenagakerjaan	11 Maret 2006			V
	e. BKKBN	Orientasi KBN pengurus PGRI kab/kota angkatan 1	28 maret 2006			V
		Orientasi KBN pengurus PGRI kab/kota angkatan 2	3s/d 4 april 06			V
	f. Educa- tion In- terna- tional (EI):	1. TOT (EI/PGRI/South East Asia Woman's network	10s/d 12 maret 06			V
		2. EI Comference woman's di Jakarta	7s/d 8 sept 06			V
		3. Comference EI Asia Pacific di Jakarta	9 s/d 11 sept 06			V
		4. Evaluation and Planing Meetin PGRI-EI di Jakarta	21 s/d 23 jan 06			V
		5. TOT (EI/PGRI/South East Asia Woman's network II	25 april 06			V
	g. Perguru an tinggi:	1. IKIP PGRI SMG: Wisuda ke 30, wisuda ke 31, refleksi peristiwa 10 Nopember	16 sept 06 9 nop 06, 13 jan 06			V
		2. UNTAG : Sebagai pembicara seminar "Relevansi nilai sumpah pemuda & penguatan karakter bangsa	11 nov 06			V
		3. UNDIP : Halal bihalal keluarga be- sar	31 Okt 06			V
	h. Stasiun Radio	(1) Smart FM : Nara sumber	7 nop 06	V		
		(2) Rasika	1 juni 06	V		
		(3) Trijaya	26 juni 06	V		
	6	Meningkatkan kesadaran membayar iuran melalui pertemuan koordinasi	Tidak terealisasi			
	7	Meningkatkan peran perempuan dalam organisasi TOT kader EI-PGRI :	10 s/d 12 maret 06			V
		Kerjasama dengan South East Asian Woman,s Net- work				V



**Bidang organisasi dan Kaderisasi tahun 2007, 2008, 2009**

N O	Program dan kegiatan		Pelaksanaan / realisasi			Justifikasi organisasi PGRI		
			2007	2008	2009	Profesi	Kesra	Ketenagaan
1	Organi sasi	1. Rekrutmen anggota baru : CPNS, Guru bantu, GTT, Guru Honor, tenaga kependidikan baik sekolah negeri maupun swasta.	Jan s/d des 2007	Jan s/d des 2008	Jan s/d april 2009		V	
		2. Menyusun data anggota dan Organisasi.	Jan s/d des 2007	Maret 2008	April 2009			V
		3. Melakukan konsolidasi organisasi.	Feb 2007	April 2008	Jan s/d april 2009			V
		4. Meningkatkan kesadaran membayar iuran melalui pertemuan koordinasi	Juli 2007	14 s/d 17 nov 2008	Tidak diprogramkan			V
		5. Memberdayakan unsur sek.bid kab/kota dalam setiap kegiatan organisasi	Nov 2007	Jan s/d des 2008	Tidak diprogramkan	V		
2								
3	Kerjasama : Menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi kependikan, instansi yang terkait dengan visi/misi PGRI		Jan s/d des 2007	Jan s/d des 2008	Jan s/d april 2009			V
	Professional : Memperjuangkan status GTT yang diatur dengan PP sehingga persyaratan, rekrutmen, jenjang karir, penghasilan, sitem penilaian dan dapat menjadi alternatif karier bagi yang tidak bisa memenuhi syarat CPNS.		Jan s/d des 2007	Jan s/d des 2008	Jan s/d april 2009		V	







**4.3.2 Program kerja dan aktivitas sekretariat bidang kesejahteraan tahun 2006,2007, 2008, 2009**

NO	PROGRAM KERJA	Waktu realisasi	Justifikasi organisasi PGRI		
			Profesi	Kesra	Ketena gaan
1	Memperjuangkan kesejahteraan guru: Mendesak pemerintah segera mengeluarkan PP tentang guru dengan menghadirkan komisi X DPR RI	30Des 2006		V	
	Berperan serta tim pemantau upah minimum Jawa Tengah	Des 2006		V	
2	Memperjuangkan kesejahteraan guru kontrak dan GTT; Menyampaikan aspirasi ke MENPAN RI tentang penerimaan CPNS: Surat No.13/u/Prov/XIX/2006 Tembusan:Presiden,DPR, DPD, Menko Kesra	21 Jan 2006		V	
3	Mengembangkan koperasi guru	Tidak terealisasi		V	
4	Mewujudkan system penghargaan yang baku bagi guru berprestasi : Penyerahan penghargaan kepada guru berprestasi di semua tingkatan sekolah	Pada Hut PGRI ke 61, 26 Nov 2006		V	
5	Memperjuangkan status guru tidak tetap : Menyampaikan aspirasi ke aksekutif dan legislataif	6 Feb 2006		V	
6	Memperjuangkan terealisasinya kelebihan jam mengajar	Baru diproses		V	
7	Membantu keluarga PGRI Membuka posko PGRI peduli bencana di Klaten Membantu guru yang menjadi korban bencana	26 Nov 2006 29 Juli 2006 17 Des 2006		V V V	

	Bantuan pengobatan bagi anggota PGRI Memberi beasiswa peraih medali OSN 2006	17 Jan 2006		V	
8	Membentuk jaringan relawan kesetiakawanan social PGRI			V	

**Program kerja dan kegiatan bidang : Kesejahteraan tahun 2007, 2008, 2009**

No	Program dan kegiatan	Pelaksanaan dan realisasi			Justifikasi PGRI		
		2007	2008	2009	Profesi	kesra	ketenagaan

1	Profesi Memperjuangkan system khusus bagi guru & tenaga kependidikan yang meliputi : Penggajian khusus, peningkatan tunjangan fungsional, Jaminan hari tua, Perlindungan sosial, kesejahteraan serta perlindungan bagi guru.	Jan-Des 2007	Jan-Des 2008	Jan-april 2009		V	
	Memperjuangkan peningkatan penghasilan guru & tenaga kependidikan non PNS dengan menetapkan system baku yang jelas, perlindungan dan jaminan sosial, kemantapan /kepastian hukum bagi guru dan tenaga kependidikan non PNS tersebut dalam bentuk kesepakatan kerja bersama antara guru atau penyetor sekolah	Jan-Des 2007	Jan-Des 2008	Jan-April 2009		V	
	Memperjuangkan & mengusahakan system penghargaan guru berprestasi dan berdedikasi dari jenjang SD, SMP, SMA /SMK	Jan-Des 2007	Jan-Des 2008	Jan-april 2009		V	
	Memperjuangkan terealisasi kelebihan jam mengajar guru SD/ MI Memperjuangkan terealisasi PP dan UU guru & dosen no 14/2005	Jan-Des 2007 Belum	Jan-Des 2008 Feb-Des 2008	Jan- April 2009 Jan-april 2009		V V	
	Rakor dengan sek.bid kesejahteraan kabupaten/kota.	Jan-Des 2007	Jan-Des 2008	Tidak diprogramkan		V	
2	Organisasi a. Mendorong pengembangan koperasi guru sebagai wahana kesejahteraan dan pendidikan guru. b. Membantu keluarga anggota PGRI yang meninggal dalam bentuk santunan. c. Membentuk jaringan relawan ke setiakawanan sosial PGRI dalam membantu bencana. d. Penyediaan dana kasra untuk membantu korban bencana.	Jan-Des 2007 Maret 2007	Jan-Des 2008 Jan-Des 2008 Jan-des 2008 Maret-Des 2008	Inventarisasi hasil sertifikasi guru anggota PGRI yang sudah lulus tetapi belum mendapat tunjangan profesi (Jan-Feb		V V V V	



#### 4.3.3 Program kerja ketenagakerjaan 2006

N O	Program dan kegiatan		Pelaksanaan / realisasi	Justifikasi organisasi PGRI		
				Profesi	kesra	ketenagaan
1	Membina kebersamaan dan kesetiakawanan	Perayaan ulang tahun PGRI ke-61	25-26 Nov 2006			V
		Rapat koordinasi 3 Sek.bid : Pendidikan, Kerokhanian, Profesi PGRI Kab/kota	17 des 2006			V
		Menerima dan menyalurkan bantuan korban bencana	Agustus 2007		V	
2	Pemberian penghargaan kepada guru berprestasi :Penyerahan penghargaan kepada guru berprestasi di semua tingkatan sekolah				V	
3	Memperjuangkan hak kepegawaian guru :	(1) Menyampaikan ke instansi terkait dalam bentuk aksi damai “Guru menggugat”	Feb 2006		V	
		(2) Apel akbar:Penyampaian sikap Forum guru Bantu(FGBI)	12 maret 2006		V	
		(3) Apel akbar&deklarasi guru karyawan swasta(PGKSI) Jawa Tengah.	20 Mei 2006		V	
		(4) Penyampaian aspirasi CPNS ke Menpan RI	21 Jan 2006		V	
		(5) Penyampaian aspirasi CPNS ke DPRD Jawa Tengah	13 April 2006		V	
		(6) Penyampaian dukungan aspirasi PGRI Kab. Pati tentang pelantikan jabatan eselon III dan IV di Dinas Pendidikan Kab. Pati	23 mei 2006		V	
		(7) Nara sumber”Masih adakah harapan guru swasta”	12 jan 2006	V		
		(8) Aksi damai KSPI tentang rencana revisi	27 maret 2006		V	
4	Melindungi membela guru PGRI yang berkasus		Jan s/d des 2006		V	

**Program kerja ketenagakerjaan 2007 s/d 2009**



N O	Program dan kegiatan		Pelaksanaan / realisasi			Justifikasi organisasi PGRI		
			2007	2008	2009	Profesi	Kesra	Ketenagaan
1	Organi sasi	Membina kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, kegotongroyongan dalam berbagai kegiatan dan usaha organisasi	Jan s/d des 2007	Jan s/d des 2008	Jan s/d april 2009		V	
		Melindungi dan membela guru anggota PGRI yang menghadapi persoalan hukum	Jan s/d des 2007	Maret 2008	April 2009			V
		Memberikan penyuluhan hukum kepada guru anggota PGRI	Feb 2007	April 2008	Jan s/d april 2009			V
2	Memperjuangkan & mengusahakan system penghargaan yang baik dan berkesinambungan bagi guru berprestasi dan berdedikasi		Jan s/d des 2007	Jan s/d des 2008	Jan s/d april 2009			V
3	Membantu dan memperjuangkan guru dalam memperoleh hak-hak kepegawaian, kenaikan pangkat, pembayaran gaji, pensiun yang tepat dan pengaturan yang jelas system mutasi.		Jan s/d des 2007	Jan s/d des 2008	Jan s/d april 2009			V
4	Membantu realisasi penyelesaian pengangkatan CPNS guru yang lulus tes		Jan s/d des 2007	Jan s/d des 2008	Jan s/d april 2009			V
5	Mendesak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) khusus tenaga non kependidikan dan tentang sertifikasi guru seleksinya tidak didasarkan pada DUK atau intinya dipermudah		Jan s/d des 2007	Jan s/d des 2008	Jan s/d april 2009			V
6	Mempermudah dan mengupayakan pembinaan usulan kenaikan pangkat dari golongan IV a ke IV b di daerah-daerah.		Jan s/d des 2007	Sudah terrealisasi	Jan s/d april 2009			v

**4.3.4 Program sekretariat bidang Pengembangan karier dan profesi tahun 2006 dan 2007**



	PROGRAM KERJA	Realisasi	Justifikasi Organisasi PGRI sebagai		
			Profesi	Kesra	Ketenagaan
1	Meningkatkan mutu tenaga kependidikan dengan menyelenggarakan latihan dan pendidikan, seminar, lokakarya, sarasehan, diskusi, penataran dan pelatihan	23 Des 2006	V		
2	Membantu program penyetaraan D2, S1 yang melanjutkan ke pendidikan guru IKIP PGRI Semarang	Desember 2006		V	
3	Memberi pelatihan, bimbingan penerbitan karya ilmiah, buku ajar untuk meningkatkan profesionalisme	Agustus dan s/d Oktober 2006	V		
4	Proaktif dan partisipasi terlibat dalam pengembangan dewan pendidikan dan komite sekolah	Agustus dan s/d Oktober 2006			V
5	Aktif menyampaikan gagasan, pemikiran, pertimbangan tentang pelaksanaan pembangunan pendidikan dan proses pembelajaran tingkat kab/kota maupun provinsi	Agustus dan s/d Oktober 2006	v		
6	Meningkatkan peran FKPPG dalam membantu guru lebih profesional dan lancar dalam pengumpulan angka kredit melalui kegiatan pengembangan profesi	Agustus dan s/d Oktober 2006	V		
7	Melakukan kerjasama dan lomba yang berkaitan dengan proses pembelajaran guru	Agustus dan s/d Oktober 2006	V		

Program kerja PGRI bidang pengembangan karir dan profesi tahun 2008, 2009

#### 4.3.5 Program kerja dan kegiatan sekretariat bidang : Pendidikan tahun

N O	Program dan kegiatan tahun 2008	Realisasi	Justifikasi organisasi PGRI			Program dan kegiatan tahun 2009	Realisasi	Justifikasi organisasi PGRI		
			Profesi	kesra	Ketenagaa			Profesi	kesra	Ketenagaa
1	Narasumber TOT KTSP Prov. Jateng	April s/d Maret 2008	V			Rapat koordinasi sebid pengembangan karir dan profesi kab/kota se-Jateng	Feb 09			V
2	Narasumber Workshop implementasi MBS	1/4/08	V			Menyusun agenda kegiatan yang dapat direalisasi di daerah	Feb 09	V		
3	Sosialisasi perubahan pelaksanaan sertifikasi guru	19/4/08	V			Memberikan layanan pengembangan profesi melalui bimbingan penulisan karya ilmiah /PTK yang menunjang profesi guru	Jan s/d april 09	V		
4	Pengiriman calon assessor	16/5/08	V			Meningkatkan peran FKPPG kab/kota dalam membantu guru meningkatkan profesi dan pengumpulan angka kredit pengembangan professional guru	Jan s/d april 09	V		
5	Mengirim 2 orang lulus tes sebagai peserta bintek Asesor	2 s/d 5 juli 08	V							
6	Narasumber pelatihan kompetensi tenaga pendidik bagi guru PKn kota Semarang	12 s/d 16 agustus 2008	V							
7	Narasumber seminar “Masadepan program sertifikasi guru	31 Agt 2008	V							
8	Menerima audiensi guru TK dan IGTK	16 sept 2008	V							
9	Peserta sosialisasi pangarusutaman gender bagi lembaga pemasyarakatan	20 sept 2008	v							

2006





**Program bidang : Pendidikan tahun 2007 dan 2008**

NO	Program dan Kegiatan	Pelaksanaan / Realisasi	Realisasi 2009	Justifikasi Organisasi PGRI		
				Profesi	Kesra	Ketenagaan
1	Menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal	Dilaksanakan oleh YPLP Dikdas men dan YPLP Perguruan Tinggi PGRI	Tidak dilaks			
2	Berperan serta mening- katkan mutu pendidikan bidang pendidikan PGRI Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah	Menjadi pengarah pada diklat per cepatan mutu pendidikan di gedung wanita	18 jan 2006			V
3	Meningkatkan kualitas pendidikan di PGRI	1. Membantu perbaikan mata sarana prasarana PGRI 2. Menyelenggarakan pelatihan dan penataran di seluruh Jawa Tengah kurikulum	Maret 2007- Mei 2007	Dalam proses tidak terealisasi	V	
4	Meningkatkan derajat kecerdasan manusia dan harkat martabat manusia.	(1) Seminar dan loka karya (2) Memberikan beka ketram pihan komputer di sekolah	Jan 2007- Des 2007	Telah terd sasi terealisasi		V
5	Mendidik moral dan karakter anak didik mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemam puan pengelola sekolah PGRI	(3) Mensukseskan pemberantasan program Buta aksara (1) Mendesak pemerintah untuk memasukkan pendidikan budi pekerti di sekolah (2) Meningkatkan pendidikan	Jan 2007 Des 2007	Sudah terd sasi terealisasi	V	
6	Kegiatan Ilmiah	ekstrakurikuler di Sudah sekolah 2007	tereali		V	
	Mengadakan latihan men- ingkatkan kemampuan pengelo mbaan sekolah-sekolah PGRI /Pen gurus yayasan sekolah PGRI Semarang	(1) Mengadakan lomba lomba Pelatihan dan penataran guru (2) Mengadakan pelatihan pustakawan	tidak terealisasi			
3 7	Kegiatan kerjasama Melakukan pemantauan peningkatan pengelola peningkatan profesi guru:	(3) Mengadakan lomba guru se untuk kompetensinya Menyampaikan usulan pemerintah perlunya standarisasi profesi guru dengan melibatkan PGRI	Sudah ter- eal- sasi tidak terealisasi	Ter- laksa na		V



	pendidikan						
--	------------	--	--	--	--	--	--



**4.3.6 Program kerja dan kegiatan sekretariat bidang Kerokhanian  
tahun 2006 s/d 2009**

4.3.7 Program kerja dan kegiatan sekretaris bidang : Advokasi dan Perlindungan hukum tahun 2006

N O	Program dan kegiatan	Pelaksanaan / realisasi					Justifikasi organisasi PGRI		
			2006	2007	2008	2009	Pro fesi	Kesra	Ketenaga an
1	Pertemuan koordinasi sekretaris bidang		17 des 2006	-	-	Feb 2009			V
	Kajian agama secara berkala		Insi dental	Insi dental	Insi dental	Insi dental	V		
2	Kegiatan amalan romadhon:	santunan anak yatim	11 Okt 2006	13 sept 2007	16 sept 2008	-		V	
		nuzulul Quran	31 des 2006	13 sept 2007	16 sept 2008	-	V		
		Zakat fitrah		28 Sept 2007	28 sept 2008	-		V	
		Kajian romadhon		15,22,29 Sep 2007	3,5,8,11,16 sept 2008	-	V		
3	Peringatan hari besar isla	Peringatan Qurban		20 des 2007	7Des 2008	-	V		
		Sholat id Adha		20 des 2007	7Des 2008	-	V		
	Mengisi artikel Derap guru		Tri wulan	Tri wulan	Tri wulan	Tri wulan	V		

Program bidang : Advokasi dan perlindungan hukum tahun 2007, 2008, 2009

N O	Program dan kegiatan	Pelaksanaan / realisasi		Justifikasi organisasi PGRI		
				Profesi	Kesra	Ketenagaan
1	Mengembangkan kesadaran dan budaya hukum bagi anggota PGRI dilakukan dengan cara: Penyuluhan hukum, seminar, rapat dan sosialisasi UUGD	(1) Penyuluhan hukum di STBAIN Tegal	20 sept 2006	V		
		(2) Penyuluhan hukum di PGRI Cabang Windusari Magelang	11 nop 2006	V		
		(3) Penyuluhan hukum di PGRI Kab. Kebumen	18 nop 2006	V		
		(4) Penyuluhan hukum di PGRI Kab. Magelang.	25 nop 2006	V		
		(5) Seminar "UUGD"	23 des 2006	V		
		(6) Rapat koordinasi sebid advokasi dan perlindungan hukum PGRI Kab/Kota	13 des 2006			V
		(7) Sosialisasi UUGD	Jan s/d des 2006	V		
2	Media	Mengisi majalah derap guru dan media cetak nasional, regional	Jan s/d des 2006	V		
3	Memperjuangkan secara optimal hak-hak guru serta memberikan perlindungan terhadap guru yang mendapat kasus hukum baik secara litigasi maupun non litigasi	(1) Melakukan advokasi anggota PGRI di Kudus	1 sept 2006		V	
		(2) Melakukan advokasi anggota PGRI di Rembang	Sept 2006 s/d Jan 2007		V	
4	Mengawal implementasi UUGD	Ikut merumuskan rancangan UUGD	Sept 2006			V
5	Meningkatkan peran LKBH PGRI baik dalam pelayanan konsultasi maupun bantuan hukum	Memberikan bantuan hukum dan penyuluhan hukum	Jan s/d Des 2006		V	
6	Mengadakan pelatihan advokasi bagi LKBH PGRI di tingkat Kab/Kota		Belum terlaksana	V		
7	Kegiatan kerja sama : Merumuskan naskah kerjasama dengan lembaga/institusi		Juli s/d Nop 2006			v

No	Program dan kegiatan		Pelaksanaan / realisasi			Justifikasi organisasi PGRI		
	Jenis layanan	Pelaksanaan / realisasi	Keterangan			Profesi	Kesra	Ketenagaan
1	Organisasi Konsultasi hukum Memberi konsultasi hukum pada 85 klien (73 datang langsung dan 12 melalui surat/telepon)	Meningkatkan peran LKBH PGRI baik dalam pelayanan dan konsultasi maupun dalam hukum	Jan 2008 s/d Des 2006	Agus- (1) kota Semarang	Jan s/d April 2009		V	
		Rapat koordinasi LKBH PGRI Jawa Tengah dengan LKBH PGRI cabang kab/kota se-Jawa Tengah.		(2) Kab.Semarang				
				(3) Kab.Kebumen				
				(4) Kab.Jepara	2009			
				(5) Kab.Boyolali				
				(6) Kab.surakarta				
				(7) Kab.banyumas	Jan s/d April 2009			V
				(8) Kab.Pekalongan				
				(9) Kab.Blora	2009			
				(10) Kab.Magelang				
				(11) Kab.karanganyar				
				(12) Kab.rembang				
	Hukum	Memperjuangkan secara optimal hak-hak guru serta memberikan perlindungan terhadap guru yang mendapat kasus hukum baik secara liti-		(13) Kab.Purworejo			V	
				(14) Kab.Sukoharjo				
				(15) Kab.Kudus				
				(16) Kab.Pati				
				(17) Kab.Demak				
				(18) dua klien bukan anggota PGRI dari kota Semarang				
	Bantuan hukum gratis maupun kasasi	Jan 06 s/d Desember 06		15 Kab. Semarang	-	Pemohon menang tingkat pertama, kalah proses kasasi		
				perka Kab.Purworejo		Penggugat kalah tingkat pertama,banding menang dan proses kasasi		
				(1) 3 perkara PTUN				
				(2) 6 perkara pidana				
				(3) 6 perkara perdata dan agama				
				7perk Kab.Temanggung	-	Terdakwa kalah tingkat pertama, menang pada tingkat banding, proses kasasi.		
				perdata Kab.Semarang		Terdakwa kalah tingkat pertama, proses pada tingkat menang dan dilanjutkan proses kasasi.		
				perdata Kab.Pati 1		Terdakwa menang di tingkat pertama dan banding		
				Jan Kab.Pati 2	-	Terdakwa /pemohon banding terbukti bersalah, putusan lebih ringan dari tuntutan proses banding	V	
				Disah 2007- Kab.Kebumen		Terdakwa r terbukti bersalah putusan lebih berat dari tuntutan		
3	Kegiatan ilmiah	Mengembangkan kesadaran dan budaya hukum bagi anggota PGRI dilakukan dengan cara: Penyuluhan hukum, seminar, rapat dan diskusi		Seminar 2 Kab.Karanganyar	-	Terdakwa/peradilan anak) terbukti bersalah putusan lebih ringan dari tuntutan		
				Kab.Demak	-	Tergugat/pemohon kasasi dalam proses kasasi	V	
				Ke 35 Kab.Kebumen	-	Tergugat dalam proses persidangan	V	
				2007 Kab.Purworejo		Pemohon banding dalam proses sidang		
				dan Kota Semarang		(Termohon) LKBH PGRI pada siding menjelang putusan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum		
				2007 Kab.Semarang	Jan s/d des 07	(Termohon) kesepakatan perdamaian	V	
				Kab.Sukoharjo		Masih dalam proses persidangan mengundurkan diri mencari LKBH lain		
4	Media	Mengisi majalah de- rap guru dan media cetak nasional, region						

Hasil advokasi tim LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

N O	Jenis layanan	Pelaksanaan realisasi	Keterangan	
1	Konsultasi hukum 85 Klien dengan rincian 63 datang langsung ke kantor PGRI dan 19 melalui telepon dan 3 melalui surat	Jan 2007 s/d Des 2007  Menyesuaikan klien	a. Kota Semarang	n. Kab.Jepara
			b. Kab.Demak	o. Kab.Pati
			c. kab.Semarang	p. Kab.Rembang
			d. Kota salatiga	q. Kab.Karanganyar
			e. Kab.Grobogan	r. Kab.Sukoharjo
			f. Kab.kendal	s. Kab.Boyolali
			g. Kab.Pekalongan	t. Kab.Wonogiri
			h. Kota Pekalongan	u. Kab.Klaten
			i. Kab.Batang	v. Kab.Purworejo
			j. Kab.Brebes	w. Kab.Kebumen
			k. Kab.Tegal	x. Kab.Banjarnegara
			l. Kab.Blora	y. Kab. purbalingga
			m. Kab.Kudus	
			Bantuan hukum :  a. 3 perkara PTUN b. 11 perkara pidana c. 3 perkara perdata dan agama	Jan 07 s/d des 07
	(2) Kab.Purworejo	Penggugat kalah tingkat pertama,banding menang dan proses kasasi		
	(3) Kab.Pati	Gugatan di tolak		
	1. Kab.Temanggung	Terdakwa kalah tingkat pertama, proses pada tingkat menang dan dilanjutkan proses kasasi		
	2. Kab.Semarang	Terdakwa menang di tingkat pertama dan banding		
	3. Kab.Pati :2 Kasus	Terdakwa /pemohon banding terbukti bersalah, putusan lebih ringan dari tuntutan proses banding		
	4. Kab.Pekalongan	Tersangka masih dalam proses penyidikan		
	5. Kab.Kendal :2	(Tersangka) putusan terbukti, putusan lebih ringan dari tuntutan JPU.		
	6. Kab.Kudus	Saksi korban) putusan : Terdakwa terbukti sesuai dakwaan JPU		
	7. Kab Purworejo	terdakwa dalam proses persidangan		
	8. Kab.Banyumas	Tersangka dalam proses kepolisian		
	9. Kota.Pekalongan	(Terlapor) kesepakatan menempuh perdamaian dengan pihak korban, kasus tidak berlanjut ke proses hukum		
	10. Kab.Purworejo	(Korban meninggal kecelakaan lalu lintas) terjadi kesepakatan perdamaian.		
	11. Kab.Sukoharjo	Terdakwa kalah tingkat pertama, menang pada tingkat banding, proses kasasi.		
	(1) Kab.Purworejo	(Pemohon banding) putusan : Mengabulkan sebagian permohonan pemohon banding khususnya mengenai hak pengasuhan anak dan harta gono-gini.		
	(2) Kab.Banjarnegara	(Penggugat/pemohon banding, dalam proses banding di pengadilan tinggi Semarang		
	(3) Kab.Kebumen 106	(Tergugat) putusan.: Mengabulkan gugatan pengugat dan pembagian gono-gini sesuai harta bersama dan harta bawaan		



**Program bidang : Pemberdayaan perempuan tahun 2006**

NO	PROGRAM KERJA	Waktu	Justifikasi organisasi PGRI sebagai		
			Profesi	Kesra	Ketenagaa an
1	Rapat koordinasi sek.bid	9 Des 2006			V
2	Meningkatkan sensitivitas gender bagi pengurus PGRI Kab/Kota di Jawa Tengah	1-2 Mei 2006	V		
3	Mengadakan penyuluhan manajemen organisasi PGRI	Belum terlaksana	V		
4	Menyelenggarakan TOT bagi pengurus perempuan PGRI	10-12 Maret 2006	V		
5	Pelatihan TI bagi pengurus PGRI perempuan : Pelatihan IT	9 des 2006	V		
6	Forum silaturahmi istri-istri pengurus PGRI :Pertemuan rutin	Jan 2006-Des 2006			V
7	Bhakti sosial dalam HUT PGRI Memberikan tali asih	Oktober 2006		V	
8	Mengisi rubrik perempuan di majalah ‘Derap Guru’	Jan – Des 2006			V

**Program bidang : Pemberdayaan perempuan tahun 2007 s/d 2009**



#### 4.3.9 Program kerja dan kegiatan sekretariat bidang : Pembinaan Kesenian dan Olahraga

N O	Program dan kegiatan		Pelaksanaan / realisasi			Justifikasi organisasi PGRI		
			2007	2008	2009	Profesi	Kesra	Ketenagaan
1	Organisasi	Mengadakan koordinasi sek.bid pemberdayaan perempuan kabupaten/kota se-Jawa Tengah	Okt 2007	Agustus-Des 2008	Jan-April 2009			V
		Forum silaturahmi istri-istri pengurus PGRI	Tiap 3 bulan	Tiap 3 bulan	Tiap 3 bulan			V
		Bhakti sosial dalam HUT PGRI	November 2007	Sept 2008	-		V	
2	Pelatihan	Workshop AD/ART bagi pengurus perempuan PGRI	Sept 2007	Agts-Des 2008	-	V		
		Pelatihan TI tingkat lanjut bagi pengurus perempuan PGRI Kabupaten/kota se-Jawa Tengah.	Okt 2007	Tidak terlaksana	-	V		
		Pelatihan kompetensi guru perempuan PGRI Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	Mei 2007	Tidak terlaksana	-	V		
3	Media	Mengisi rubrik perempuan di majalah “Derap Guru	Jan-Des 2007	Jan-Des 2008	Jan-April 2009	V		

#### an dan Olahraga

**Program bidang : Pembinaan Kesenian dan Olahraga tahun 2006**

**Program bidang : Pembinaan Kesenian dan Olahraga tahun 2007**

N O	Program dan kegiatan	Pelaksanaan / realisasi			Justifikasi organisasi PGRI		
					Profe si	Kesra	Keten agaan
1	Pertemuan Koordinasi Rapat pemantapan pelaksanaan program kerja sebid di kab/kota masing-masing		5 Okt 2006				V
2	Peningkatan mutu profesi guru di bidang kesenian dan olah raga	Nara sumber pada kegiatan klinik Teaching seni musik	Kota Salatiga	24 s/d 25 April 2006	V		
			Kab.Blora	Mei s/d Juli 2006	V		
		Nara sumber penataran seni musik	4 Kota Semarang	6-7 Mei 2006	V		
			5 Kab.Batang	3 s/d 4 Agustus 2006	V		
			6 Ambarawa	15-16 Sept 2006	V		
		Nara sumber penataran KBK guru bidang musik	1. IGTKI Propinsi Jawa Tengah	14 juni 2006	V		
			GOPTKI Propinsi Jawa Tengah	25-28 Nov 2006	V		
		Pembinaan tim paduan suara PGRI	1. PGRI kecamatan Bawen	5 Agts 2006	V		
			2. PGRI kecamatan pabelan Semarang	8 Agts 2006	V		
			3. Nara sumber pelatihan pembentukan paduan suara Gereja Jawa klasik Salatiga	8-9 Sept 2006	V		
			4. PGRI Kota Salatiga	29 Juli 2006	V		
		Lokakarya	a. Lokakarya kurikulum Bahasa Jawa	Tidak terealisasi	V		
			b. Semiloka Seni Musik		V		
3	Apresiasi seni	1. Porseni PGRI Kab.Semarang	8 Nov 2006				V
		2. Festifal Entertainment	3 Des 2006				V
		3. Pagelaran kesenian rakyat dalam rangka HUT PGRI ke-61 di Purworejo	25 Nov 2006				V

N O	Program dan kegiatan	Pelaksanaan / realisasi		Justifikasi organisasi PGRI		
				Profe si	Kesra	Keten agaan
1  2  3	Organisasi	1. Rapat pemantapan pelaksanaan program kerja sebid di kab/kota masing-masing dengan tujuan :  Menyatukan langkah pelaksanaan program antara PGRI Kab/kota dengan PGRI Propinsi.	Jan 2007- Des 2007			V
		2. Menyusun buku panduan program kegiatan sek.bid pembinaan kesenian dan olah raga	Jan 2007- Des 2007	V		
	Profesi  Peningkatan profesi bagi anggota yang mengampu mata pelajaran Kesenian dengan kegiatan lokakarya, semi loka penataran		Jan 2007- Des 2007	V		
	Apresiasi seni dan olah raga	1. Porseni PGRI Kab.Semarang	Jan 2007- Des 2007			V
		2. Festifal Entertainment	Jan 2007- Des 2007			V
		3. Pagelaran kesenian rakyat dalam rangka HUT PGRI ke-61 di Purworejo	Jan 2007- Des 2007			v

**Program bidang : Pembinaan Kesenian dan Olahraga tahun 2008**

N O	Program dan kegiatan	Pelaksanaan / realisasi		Justifikasi organisasi PGRI		
				Profesi	Kesra	Ketenagaan
2	<b>Organisasi</b>  Pembinaan teknis sebid pem. Kes & olahraga	Materi pembinaan meliputi :  0. Jatidiri PGRI 1. Tugas sek.bid 2. Penjabaran program & pelaksanaan di daerah 3. Pengertian profesional guru	17 Maret 2008 di SKB Purwodadi	V		
			23 Maret 2008 kab. kebumen	V		
			Okt 2008 kab. Wonogiri	V		
			Nov 2008 dikab. Brebes dan Tegal	V		
			Nov 2008 di Kab. Purbalingga	V		
			7 des 2008 di Kab.Purworejo	V		
	<b>Profesi</b>  1. Pelatihan peningkatan mutu guru/kep.TK se-Kab Magelang	Peran seni, metode pembelajaran,men cipta lagu anak	Feb 2008 di Kaliurang	V		
	2. Clinic Teaching seni musik guru TK di Salatiga					
	3. Pelatihan seni musik guru SD,SMP,SMA dan pembina	Elemen dasar seni, apresiasi lagu, menyanyi	di SKB Purwodadi	V		
	4. Clinic Teaching seni musik guru TK se-kab.Kebumen	Latihan baca notasi Menyanyi dan bermain Gerak lagu	22 Maret 2008	V		
	5. Diklat peningkatan mutu pembelajaran musik guru TK se-Kab.Batang	Peran musik Elemen dasar seni Metode pembelajaran Mencipta lagu	13 s/d 16 Juli 2008	V		
	6. Diklat peningkatan mutu pembelajaran musik guru TK se-Kota Semarang	Metodologi musik TK	6 Agt 2008 di BLPTSemarang	V		
	7. Diklat peningkatan mutu pembelajaran musik guru TK se-Kota Pekalongan	Sistem evaluasi Latihan mencipta lagu	11s/d13 agt 08 di SMK 3	V		
	8. Diklat kepala dan guru TK dan penyelenggara TK se-Jateng	Peran seni, metode pembelajaran,men cipta lagu anak	22 s/d 30 Agt di LPMP Jateng	v		



**Lanjutan : Pembinaan Kesenian dan Olahraga tahun 2008**

N O	Program dan kegiatan	Pelaksanaan / realisasi		Justifikasi organisasi PGRI		
				Profesi	Kesra	Ketenagaan
4.3.10 Program kerja dan kegiatan sekretariat bidang Informasi dan Ketenagaan						
	1. Lomba cipta lagu PAUD Kab. Semarang	Sebagai dewan yuri	8 Maret 2008 diTingkir,Sala tiga	V		
	2. Lomba cipta lagu PAUD se-Jawa Tengah	Sebagai dewan yuri	29 Mei 2008 di Bale kam bang Solo	V		
	3. Pembinaan teknis pencipta lagu &vokal group guru TK Jawa Tengah.	Sebagai Pembina	15 Agt 2008 di TK Pembina Semarang	V		
	4. Pelatihan seni musik bagi guru TK,SD,SMP,SMA	Peran musik, Elemen dasar musik, metode pembelajaran	27 Maret 2008 di Wonosobo	V		
	5. Clinic Teaching seni musik guru TK di Salatiga	Latihan buat lagu, Latihan menyanyi, Pola irama	17 April 2008 di TK Aisyah	V		
	6. Clinic Teaching seni musik guru SD&SMP Kab.Boyolali	Latihan buat lagu, Latihan menyanyi, Pola irama	12 April 2008	V		
	7. Diklat mencipta lagu anak-anak usia dini se-Kab.Semarang	Latihan buat lagu, Latihan menyanyi, Pola irama	30 April 2008 di TK IT Tunas Harapan	V		
	8. Clinic Teaching seni musik guru TK se-	Latihan buat lagu, Latihan menyanyi,	1 s/d 2 mei 2008	V		
N O	Kab.karang anyar	Pola irama				
	9. Diklat kepala/guru TK IGTKI PGRI	Peran seni, metode pembelajaran,mencip	7 s/d 13 Juli 2008 di Islamic Centre	Profesi	Kesra	Ketenagaan
	Kepeng. Kependidikan caleg DPD	ta lagu anak peningkatan mutu	1 s/d 13 Maret 2009	V		
	terhadap pendidikan dan kesenian Sasaran : Guru TK,SD,SMP Dibiayai PGRI dan Caleg	pembelajaran seni musik di sekolah untuk 12 Kab/kota se-Jawa Tengah. Se- tiap kegiatan diikuti 75 s/d 100 peserta.				
	Apresiasi seniFestifal inter-tainment Organ tunggal	6 kali kegiatan. Jan s/d Maret 2008	Jan s/d Maret 2009	V		

NO	Program dan kegiatan	Pelaksanaan / realisasi		Justifikasi organisasi PGRI		
				Profesi	Kesra	Ketenagaan
1	Menyebarluaskan informasi kebijakan, kegiatan sebagai pengembangan eksistensi organisasi	Penyampaian informasi organisasi melalui "Derap Guru" Penerbitan bulletin PGRI-EI	Jan-Des 2006 Terbit 2 edisi			V
2	Menjalin komunikasi dengan lembaga, organisasi, instansi terkait bagi kepentingan pengembangan organisasi	Membentuk posko bencana gempa di Klaten Workshop penanggulangan flu burung	7-20 Juli 2006 30 Juli 2006		V	
3	Mondokumentasikan berbagai kegiatan PGRI	Pembuatan kliping dokumentasi kegiatan PGRI Jawa Tengah	Jan 2006-Des 2006	V		
4	Menyusun kliping berita dan artikel pendidikan dan PGRI yang dipublikasikan berbagai media cetak regional dan nasional	Pembuatan kliping berita	Jan 2006-Des 2006	V		
5	Seminar "strategi dan Etika media massa		Belum terlaksana	V		
6	Pelatihan Jurnalistik	Pelatihan jurnalis tik untuk sek.bid Infokom PGRI Kab/Kota di Jawa Tengah.	12 Feb 2007	V		
7	Manajemen pengelolaan majalah "Derap guru"	Melakukan klarifikasi tagihan majalah derap Guru Jateng pada setiap Kab/Kota di Jawa Tengah.	Jan 2006-Des 2006	V		

**Program bidang : Informasi dan Komunikasi tahun 2007 dan 2008**

NO	KEGIATAN	2007	2008	Justifikasi organisasi PGRI sebagai		
				Profesi	Kesra	Ketenagaan
1	<b>Organisasi</b> Menyebarluaskan informasi kebijakan, kegiatan sebagai pengembangan eksistensi organisasi	Jan 2007-Des 2007	Jan s/d Des 2008			V
	Mondokumentasikan berbagai kegiatan PGRI	Jan 2007-Des 2007	Jan s/d Des 2008	V		
	Menyusun kliping berita dan artikel pendidikan dan PGRI yang dipublikasikan berbagai media cetak regional dan nasional	Jan 2007-Des 2007	Jan s/d Des 2008	V		
	Manajemen pengelolaan majalah “Derap guru”	Jan 2007-Des 2007	Jan s/d Des 2008	V		
	Memasyarakatkan majalah derap guru sebagai media informasi dan komunikasi bagi PGRI	Jan 2007-Des 2007	Jan s/d Des 2008	V		
2	<b>Kegiatan ilmiah</b> Menyelenggarakan lomba opini pendidikan	Mei 2007	Tidak di adakan	V		
	Pelatihan kehumasan tingkat pemula bagi anggota PGRI	Juli 2007	Tidak terealisasi	V		
	Menyelenggarakan seminar “Strategi dan etika pengembangan media massa”	Jan 2007-Des 2007	Tidak terealisasi	V		
3	Kerjasama	Belum terealisasi	Jan s/d Des 2008			V

	Menjalin komunikasi dengan lembaga, organisasi, instansi terkait bagi kepentingan pengembangan organisasi					
--	---	--	--	--	--	--



**Program bidang : Informasi dan Komunikasi tahun 2009**

NO	KEGIATAN	Realisasi	Keterangan	Justifikasi organisasi PGRI sebagai		
				Profesi	Kesra	Ketenagaan
1	Organisasi Menyebarkan informasi kebijakan, kegiatan sebagai pengembangan eksistensi organisasi	Jan 2009 s/d April 2009	Bekerjasama dengan lembaga penerbitan PGRI	V		
	Mondokumentasikan berbagai kegiatan PGRI	Jan s/d April 2009	Bekerjasama dengan lembaga penerbitan PGRI	V		
	Menyusun kliping berita dan artikel pendidikan dan PGRI yang dipublikasikan berbagai media cetak regional dan nasional	Jan s/d April 2009	Bekerjasama dengan lembaga penerbitan PGRI	V		
	Manajemen pengelolaan majalah “Derap guru”	Jan s/d April 2009	Bekerjasama dengan lembaga penerbitan PGRI	V		
	Memasyarakatkan majalah derap guru sebagai media informasi dan komunikasi bagi PGRI	Jan s/d April 2009	Bekerjasama dengan lembaga penerbitan PGRI	V		
2	Kerjasama  Menjalin komunikasi dengan lembaga, organisasi, instansi terkait bagi kepentingan pengembangan organisasi	Jan s/d April 2009	Bekerjasama IKIP PGRI Semarang dan lembaga PGRI Jawa Tengah			V

N 3.11	Program dan kegiatan		Pelaksanaan / real-		Justifikasi organisasi PGRI		
	Program kerja dan kegiatan anak lembaga dan badan khusus PGRI				Profesi	Kesra	Ketena- gaan
1	<b>Umum dan Organisasi Provinsi Jawa Tengah ( YPLP DIKDASMEN )</b>						
	1. Melaksanakan pelatihan dan penetapan pengurus YPLP Dikdasmen PGRI kabupaten/kota se Jawa Tengah.	Rapat dan pelantikan	Januari-Desember 2006	Terealisasi 90%	V		
	2. Hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah & masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.	Rapat dan pelantikan	Januari-Desember 2006	Terlaksana 75 %			V
	3. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas YPLP Dikdasmen PGRI Kab/kota.	Rapat dan pelantikan	Januari-Desember 2006	Terlaksana 80 %			V
	4. Membentuk badan hukum YPLP Dikdasmen PGRI Jawa Tengah untuk mempermudah penyelesaian aset tanah	Konsultasi dengan pihak terkait	Belum terlaksana	-	-	-	-
	<b>Peningkatan mutu pendidikan</b>						
	1. Pengembangan program ketrampilan di sekolah.	Rapat & Kunjungan	Januari-Desember 2006	Terealisasi 90 %			V
	2. Mempersiapkan pelaksanaan KBK 2004	Supervisi	Januari-Des 2006	Terealisasi 70 %			V
	3. Peningkatan mutu dan relevansi sekolah PGRI dari TK-SLTA	Rapat dan pelatihan	Januari-Des 2006		V		
	4. Peningkatan belajar siswa melalui lomba mapel, karya ilmiah bagi siswa PGRI	Rapat dan pelatihan	Januari-Des 2006	Terealisasi 90 %	V		
	5. Meningkatkan peran lembaga pendidikan PGRI dalam kegiatan pramuka, olahraga, seni	Rapat dan pelatihan	Januari-Des 2006	Terealisasi 70 %	V		
	6. Meningkatkan profesional guru dan kepala sekolah oleh YPLP PGRI dan Pemerintah	penataran	Januari-Des 2006	Terlaksana 80 %	V		
2	7. Mengembangkan kursus bagi siswa dan guru di sekolah PGRI	Rapat dan pelatihan	Januari-Des 2006	Belum terealisasi	-		
	8. Meningkatkan jumlah beasiswa dari Jepang untuk siswa PGRI	Pengajuan bantuan	Januari-Des 2006	Belum terealisasi	-		

**Lanjutan program dikdasmen PGRI Jawa Tengah.**

N O	Program dan kegiatan		Pelaksanaan / realisasi		Justifikasi organisasi PGRI		
					Profesi	Kesra	Ketenaga an
3       4	<b>Keuangan sarana dan prasarana</b>						
	1. Membina manajemen keuangan YPLP mau pun lembaga pendidikan PGRI	Pelatihan dan kunjungan	Januari-Des 2006	Terlaksana 60 %			V
	2. Meningkatkan prasarana yang dimiliki sekolah-sekolah PGRI	Pelatihan & Kunjungan	Januari-Des 2006	Terlaksana 90 %	V		
	3. Inventarisasi aset YPLP Dikdasmen.	Pengumpulan data aset	Januari-Des 2006	Terlaksana 10 %		V	
	4. Memperjuangkan dispensasi gedung sekolah negeri bagi lembaga pendidikan PGRI	Kunjungan kerja	Januari-Des 2006	Terlaksana 70 %		V	
	5. Mengadakan gerakan peduli sekolah PGRI	Rapat dan konsultasi	Januari-Des 2006	Terlaksana 70 %		V	
	6. Mengintensifkan pemasukan iuran organisasi YPLP	Kunjungan dan monitoring	Januari-Des 2006	Terlaksana 70 %		V	
	<b>Tatalaksana dan Pengelolaan</b>						
	1. Mengintensifkan pembinaan lembaga pendidikan PGRI	Rapat & Kunjungan	Januari - Desember 2006	Terealisasi 90 %			V
	2. Pengembangan sekolah berprestasi	Supervisi	Januari-Des 2006	Terealisasi 70 %			V
	3. Menyelesaikan aset tanah & menutup sekolah PGRI yang tidak berkembang	Inventarisasi data tanah	Januari-Desember 2006	Terealisasi 90 %		V	



Rincian pelaksanaan program kerja Dikdasmen PGRI Jawa Tengah tahun 2006

N O	Program dan kegiatan		Pelaksanaan / real- isasi		Justifikasi organisasi PGRI		
					Profesi	Kesra	Ketenagaan
	Pelanti kan kepala sekolah	1. SMA PGRI Jepara	18-1-2006	Di Jepara			
		2. SMP PGRI 05 Pegan dan	20-7-2006	Di Kendal			
		3. SMP PGRI 10 Kali wungu	20-7-2006	Di Kendal			
		4. SMP,SMA,SMK PGRI di Kebumen	20-9-2006	Di Kebumen			
		5. SMA PGRI Taman	20-9-2006				
		6. SMA PGRI 3 Randu dongkal	21-11-2006	Di Pemalang			
		7. SMK PGRI 1 Taman	2-11-2006	Di Pemalang			
		8. SMP PGRI Gringsing	25-11-2006	Di Pemalang			
		9. SMKGRI Batang	25-11-2006	Di Batang			
		10. SMA PGRI Sukorejo	2-12-2006	Di Batang			
		11. SMA PGRI Tegal	25-1-2006	Di Kendal			
		12. SMP PGRI 1 Tegal	25-1-2006	Di Legal			
	Pelantik an penguru s	1. Pengurus YPLP Kab. Karanganyar	7-3-2006	Karang anyar			
		2. Pengurus YPLP Kab. Kudus	25-7-2006	Kudus			
		3. Pengurus YPLP Kab. Wonogiri	12-8-2006	Wonogiri			
	Kunjung an	1. Peresmian gedung perpus takaan, laborat IPA, Lab.Komputer dan Lab.Bahasa di SMA PGRI Karang Madang	15-2-2006	Di Sragen  Di Pati			
		2. Peresmian perpustakaan di SMA PGRI Pati	8-1-2006	Banyumas			
	Kunker Pengurus propvinsi Jateng		17-19-Feb 2006	Semarang			
	Raker YPLP Dikdasmen PGRI Jateng		8-8-2006	Kendal, Cilacap			
	Pembinaan SMP PGRI 13 Kendal Pembinaan SMP PGRI Kroya		18-9-2006	Sragen, Pati			

**Pelaksanaan program YPLP Dikdasmen PGRI Propinsi Jawa Tengah tahun 2007/2008**

N O	Program dan kegiatan	Pelaksanaan / real- isasi		Justifikasi organisasi PGRI		
				Profesi	Kesra	Ketenagaan
Mon itori ng dan eval uasi	1. SMP PGRI Jekulo	14/12/ 2006	Di Jepara	V		
	2. SMP PGRI Jati	25-2- 2006	Di Kendal	V		
	3. SMA PGRI Kudus	21/3/06	Di Kendal	V		
	4. SMA PGRI Kaliwungu	25/6/06	Di Kebumen	V		
	5. SMK PGRI 1 Mejobo	22/6/06	Pemalang	V		
	6. SMK PGRI Kaliwungu	23/6/06	Di Pemalang	V		
	7. SMP PGRI 8 Taman	28/6/06	Di Pemalang	V		
	8. SMK PGRI 2 Taman	28/8/06	Di Pemalang	V		
	9. SMP PGRI Puring	5/9/06	Di Batang	V		
	10. SMP PGRI Rowokele	30/11/06	Di Batang	V		
	11. SMP PGRI Pejagoan	5/12/06	Di Kendal	V		
	12. SMP PGRI Pegandan, Kaliwungu	11/12/06	Kendal	V		
	13. SMP PGRI Kuwaras an, Kebumen	28/6/06	Kebumen	v		
	14. SMA PGRI Randu dongkal, Pemalang,	27/6/06	Pemalang	V		
	15. SMP PGRI Gringsing, SMK PGRI Batang	28/6/06	Batang	V		
	16. SMP PGRI Kepil, Selomerto, Wonosobo	5/12/06	Wonosobo	V		
	17. SMA PGRI Blora	11/12/06	Blora	V		
	18. SMP PGRI NGadirejo, Jatiroto, Wonogiri	11/12/06	Wonogiri	V		
	19. SMA PGRI Purwo rejo, Klampok	11/12/06	Purworejo	V		

**Pelaksanaan program YPLP Dikdasmen PGRI Propinsi Jawa Tengah tahun  
2007/2008**

N O	Program dan kegiatan		Pelaksanaan / real- isasi		Justifikasi organisasi PGRI		
					Profesi	Kesra	Ketena gaan
1	Umum dan organisasi	Mengingatkan kepada daerah untuk merealisasikan	Setiap akhir tri wulan	Terealisasi 85%	V		
2	1. menertibkan pendataan pelaporan tahun 2006/2007						
	2. Menyelesaikan terbentuknya kepengurusan YPLP dikdasmen PGRI Kab/kota yang belum reorganisasi	Melaksanakan raker	Jan s/d Des 2008	Terlaksana 95 %			V
	3. Menyenggarakan raker YPLP Dikdasmen PGRI Kab/Kota	Membuat sk pengangkatan dan melantik	Feb s/d Des 2008	Terlaksana 50 %			V
	4. Mengangkat & melantik kepala sekolah yang diperpanjang maupun yang baru	Rapat koordinasi, kunjungan konsultasi	Jan s/d Des 2008	50 %	-	-	-
	5. Meningkatkan kerjasama dengan dinas P&K provinsi		Jan s/d Des 2008	dirintis			V
	6. Merintis berdirinya sekolah model PGRI	Rapat dengan Kepala sekolah	Jan s/d Des 2008	dirintis			V
	7. rakor YPLP Dikdasmen PGRI Kab/Kota		Jan s/d Des 2008	Terealisasi	V		
	8. Raker Kepala SMP,SMA, SMK PGRI	Melaksanakan rakor	Jan s/d Des 2008	Terealisasi 90 %	V		
	Peningkatan mutu Pendidikan Pengembangan wajib belajar 9 tahun		Jan s/d Des 2008	Terealisasi 70 %	V		
	1. melaksanakan sosialisasi KTSP		Jan s/d Des 2008	Terlak-sana 90 %	V		
2. Peningkatan motivasi belajar melalui lomba mapel,Kir, lomba sekolah berprestasi	lomba 121	Jan s/d Des 2008	Belum terealisasi	V			
3. Meningkatkan peran serta lembaga pendidikan PGRI dalam kegiatan ekstrakurikuler	Monitoring	Jan s/d Des 2008	50 %	V			

Lanjutan program YPLP Dikdasmen PGRI Propinsi Jawa Tengah tahun 2007/2008

N O	Program dan kegiatan		Pelaksanaan / real- isasi		Justifikasi organisasi PGRI		
					Profesi	Kesra	Ketenagaan
3	Penatalaksanaan dalam pengelolaan  1. Mengefektifkan pembinaan kepala sekolah/ guru	supervisi	Agustus 2008	Terlaksana 95 %	V		
	2. Koordinasi antara YPLP Dikdasmen PGRI dengan masyarakat dan pemerintah	Surat menyurat	oktober 2008	Terlaksana 100 %			V
	3. Menyelesaikan liquiditas sekolah-sekolah PGRI yang akan dan sudah di tutup.	Rapat koordinasi, kunjungan konsultasi	Jan s/d Des 2008	100 %	-	V	-
	4. Menyelenggarakan penataran bendahara YPLP Dikdasmen PGRI Kab/Kota di bidang manajemen keuangan.	Kunjungan kerja	Jan s/d Des 2008	Terlaksana 90 %	V		
	5. Melaksanakan supervisi dan monitoring evaluasi kinerja kepala sekolah.	Rapat dengan Kepala sekolah	Des 2008	Terlaksana 10 %			V
	6. Penerbitan SK guru tetap, bendahara dan YPLP Kab/Kota		Jan s/d Des 2008	Terealisasi		V	

**TABEL IV.13**

**Ringkasan program dan kegiatan Pengurus PGRI Jawa Tengah tahun 2006 s/d 2009**

<b>NO</b>	<b>SEKRETARIAT BIDANG</b>	<b>HASIL</b>
-----------	-------------------------------	--------------

1	Organisasi dan Kaderisasi	<p><b>Kegiatan tahun 2006 .</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rekrutmen anggota baru. Sasarannya guru PNS yang baru saja diangkat, Guru swasta, maupun guru tidak tetap dan guru bantu.</li> <li>Memperjuangkan status guru tidak tetap agar diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP) sehingga persyaratan, rekrutmen, jenjang karir, penghasilan dan sistem penilaiannya jelas.</li> <li>Menyelenggarakan konfercab PGRI Kab/Kota se-Jawa Tengah, baru terealisasi 12 kab/Kota.</li> <li>Konsolidasi dengan pengurus PGRI Kab/kota se-Jawa Tengah (12 Kab/Kota)</li> </ol> <p>PGRI bekerja sama dengan lembaga lain yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Unicef-Bapeda Jawa Tengah : Whorkshop flu burung</li> <li>Monitoring sosmob flu burung di 23 kab/kota se-Jateng</li> <li>KPID Jawa Tengah: Dialog public”Tayangan televisi yang memihak masyarakat”</li> <li>Dinas P dan K Pemda Jawa Tengah</li> <li>KSPI :Pertemuan sosialisasi renstra KSPI penolakan revisi UU ketenagakerjaan</li> <li>BKKBN</li> <li>Education International(EI)</li> <li>Perguruan tinggi (Untag, IKIP, Undip)</li> <li>Stasiun radio penyiaran (Smart FM, Rasika, Trijaya)</li> <li>South East Asian Woman,s Network(Peningkatan peran perempuan)</li> </ol>
---	---------------------------	---



**Kegiatan tahun 2007, 2008, 2009 .**

1. Program organisasi :
  - a. Rekrutmen anggota baru. Sasarannya guru PNS yang baru saja diangkat, Guru swasta, maupun guru tidak tetap dan guru bantu. Menyusun data anggota dan Organisasi.
  - b. Melakukan konsolidasi organisasi.
  - c. Meningkatkan kesadaran membayar iuran melalui pertemuan koordinasi
  - d. Memberdayakan unsur sek.bid kab/kota dalam setiap kegiatan organisasi
2. PGRI bekerja sama dengan lembaga lain.
3. Memperjuangkan status guru tidak tetap agar diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP) sehingga persyaratan, rekrutmen, jenjang karir, penghasilan dan sistem penilaiannya jelas.

Program kerja yang tidak terealisasi adalah sebagai berikut :

<b>Kegiatan</b>	<b>Penyebab/Kendala</b>
1. Meningkatkan kesadaran membayar iuran melalui pertemuan koordinasi	Tidak ada respon dan tanggapan
2. Memberdayakan unsur sek.bid kab/kota dalam setiap kegiatan organisasi	Ketidakkompakan dalam pembahasan setiap permasalahan

2	Kesejahteraan	<p><b>Kegiatan tahun 2006 .</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperjuangkan kesejahteraan guru yang berhubungan dengan upaya diterbitkannya PP tentang guru sehingga lahir PP No.74 Th 2009</li> <li>2. Memantau penetapan upah minimum tenaga kerja (Berhubungan kesra guru honorer)</li> <li>3. Memperjuangkan kesejahteraan guru kontrak dan GTT agar diperhatikan dalam proses seleksi CPNS 2006 dan 2007, terwujud dengan diutamakannya guru wiyata dalam seleksi CPNS akhir-akhir ini.</li> <li>4. Penyerahan penghargaan kepada guru berprestasi di semua tingkatan sekolah</li> <li>5. Membantu keluarga PGRI</li> </ol> <p><b>Kegiatan tahun 2006 .</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperjuangkan kesejahteraan guru yang berhubungan dengan upaya diterbitkannya PP tentang guru sehingga lahir PP No.74 Th 2009</li> <li>2. Memantau penetapan upah minimum tenaga kerja (Berhubungan kesra guru honorer)</li> <li>3. Memperjuangkan kesejahteraan guru kontrak dan GTT agar diperhatikan dalam proses seleksi CPNS 2006 dan 2007, terwujud dengan diutamakannya guru wiyata dalam seleksi CPNS akhir-akhir ini.</li> <li>4. Penyerahan penghargaan kepada guru berprestasi di semua tingkatan sekolah</li> <li>5. Membantu keluarga PGRI</li> </ol> <p><b>Kegiatan tahun 2007, 2008, 2009</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profesi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperjuangkan system khusus bagi guru &amp; tenaga kependidikan yang meliputi : Penggajian khusus, peningkatan tunjangan fungsional, Jaminan hari tua, Perlindungan sosial, kesejahteraan serta perlindungan bagi guru.</li> <li>b. Memperjuangkan peningkatan penghasilan guru &amp; tenaga kependidikan non PNS dengan menetapkan system baku yang jelas, perlindungan dan jaminan sosial, kemantapan</li> </ol> </li> </ol>
---	---------------	---

		<p>/kepastian hukum bagi guru dan tenaga kependidikan non PNS tersebut dalam bentuk kesepakatan kerja bersama antara guru atau penyelenggara sekolah</p> <p>c. Memperjuangkan &amp; mengusahakan system penghargaan guru berprestasi dan berdedikasi dari jenjang SD, SMP, SMA /SMK</p> <p>d. Memperjuangkan terealiasasinya kelebihan jam mengajar guru SD/MI</p> <p>e. Memperjuangkan terealiasasinya PP guru&amp;dosen</p> <p>f. Rakor dengan sek.bid kesejahteraan kabupaten/kota</p>
--	--	---

## 2. Organisasi

- a. Mendorong pengembangan koperasi guru sebagai wahana kesejahteraan dan pendidikan guru.
- b. Membantu keluarga anggota PGRI yang meninggal dalam bentuk santunan.
- c. Membentuk jaringan relawan kesetiakawanan sosial PGRI dalam membantu bencana.
- d. Penyediaan dana kesra untuk membantu korban bencana kabupaten/kota

Program kerja dan kegiatan yang tidak terealisasi bidang kesejahteraan:

Kegiatan	Penyebab/Kendala
Tahun 2006	
1. Mengembangkan koperasi guru	Terbentur dana
2. Memperjuangkan terealisasinya kelebihan jam mengajar	Terbentur birokrasi di pemerintahan
3. Membentuk jaringan relawan kesetiakawanan sosial PGRI	Tidak ada kejelasan
Tahun 2007 s/d 2009	Tidak diprogramkan, hanya sekali tahun 2006
1. Rakor dengan sek.bid kesejahteraan kabupaten /kota	

3	Ketenagakerjaan	<p><b>Kegiatan tahun 2006 .</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membina kebersamaan dan kesetiakawanan</li> <li>2. Pemberian penghargaan kepada guru berprestasi</li> <li>3. Memperjuangkan hak kepegawaian guru</li> <li>4. Melindungi mem bela guru PGRI yang berkasus</li> </ol> <p><b>Kegiatan tahun 2007 s/d 2009</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Organisasi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membina kebersamaan, kekeluar gaan, kesetiaka wanan dalam berbagai kegiatan dan usaha orga nisasi</li> <li>b. Melindungi dan membela guru anggota PGRI yang menghadapi persoalan khusus .</li> </ol> </li> <li>2. Bidang Profesi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperjuangkan &amp; mengusahakan system penghargaan yang baku dan berkesinambungan bagi guru berpres tasi dan berdedikasi</li> <li>b. Membantu dan memperjuangkan guru dalam memperoleh hak-hak kepegawai an, kenaikan pangkat, pembayaran gaji, pensiun yang tepat dan pengaturan yang jelas system mutasi</li> <li>c. Membantu realisasi penyelesaian pengangkatan CPNS guru yang lulus tes 2005/2006</li> <li>d. Mendesak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) khusus tenaga non kependidikan dan tentang sertifikasi guru seleksinya tidak didasarkan pada DUK atau intinya dipermudah</li> <li>e. Mempermudah dan mengupayakan pembinaan usulan kenaikan pangkat dari golongan IV a ke IV b di daerah-daerah.</li> </ol> <p>Program kerja yang tidak terealisasi dari bidang ketenagakerjaan adalah</p> </li> </ol>
---	-----------------	---

		<table><tr><th>Kegiatan</th><th>Penyebab/Kendala</th></tr><tr><td>Tahun 2007  1. Mempermudah dan mengupayakan pembi naan usulan ke naikan pangkat dari golongan IV a ke IV b di daerah daerah  2. Seminar PGRI se-bagai serikat pekerja</td><td>Tahun 2007 Program dan kegiatan tersebut terhenti terbentur birokrasi tetapi tahun 2008 dan 2009 diupayakan kembali.  Tahun 2006 dan 2007 kegiatan tersebut belum di programkan, hanya dilakukan sekali pada tahun 2008 saja.</td></tr></table>	Kegiatan	Penyebab/Kendala	Tahun 2007  1. Mempermudah dan mengupayakan pembi naan usulan ke naikan pangkat dari golongan IV a ke IV b di daerah daerah  2. Seminar PGRI se-bagai serikat pekerja	Tahun 2007 Program dan kegiatan tersebut terhenti terbentur birokrasi tetapi tahun 2008 dan 2009 diupayakan kembali.  Tahun 2006 dan 2007 kegiatan tersebut belum di programkan, hanya dilakukan sekali pada tahun 2008 saja.
Kegiatan	Penyebab/Kendala					
Tahun 2007  1. Mempermudah dan mengupayakan pembi naan usulan ke naikan pangkat dari golongan IV a ke IV b di daerah daerah  2. Seminar PGRI se-bagai serikat pekerja	Tahun 2007 Program dan kegiatan tersebut terhenti terbentur birokrasi tetapi tahun 2008 dan 2009 diupayakan kembali.  Tahun 2006 dan 2007 kegiatan tersebut belum di programkan, hanya dilakukan sekali pada tahun 2008 saja.					
4	Pengembngan Karir dan Profesi	Kegiatan tahun 2006 .  a. Meningkatkan mutu tenaga kependidikan dengan menyeleng garakan				

		<p>latihan dan pendidikan, seminar, lokakarya, sarasehan, diskusi, penataran dan pelatihan</p> <p>b. Membantu program penyetaraan D2,S1 yang melanjutkan ke pendidikan guru IKIP PGRI Semarang</p> <p>c. Memperjuangkan anggota yang berprestasi untuk mengembangkan karier lebih lanjut.</p> <p><b>Kegiatan tahun 2007</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu tenaga kependidikan dengan menyelenggarakan latihan dan pendidikan, seminar, lokakarya, sarasehan, diskusi, penataran dan pelatihan</li> <li>2. Membantu program penyetaraan D2,S1 yang melanjutkan ke pendidikan guru IKIP PGRI Semarang</li> <li>3. Memperjuangkan anggota yang berprestasi untuk mengembangkan karier lebih lanjut.</li> <li>4. Memberi pelatihan, bimbingan penulisan karya ilmiah, buku ajar untuk meningkatkan profesionalisme</li> <li>5. Melakukan kerjasama dan lomba yang berkaitan dengan proses pembelajaran guru</li> <li>6. Aktif menyampaikan gagasan, pemikiran, pertimbangan tentang pelaksanaan pemanfaatan pendidikan dan proses pembelajaran tingkat kab/kota maupun propinsi</li> <li>7. Meningkatkan peran FKPPG dalam membantu guru lebih professional dan lenter</li> </ol> <p><b>Kegiatan tahun 2008</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narasumber TOT KTSP Prov. Jateng</li> <li>2. Narasumber Workshop implementasi MBS</li> <li>3. Sosialisasi perubahan pelaksanaan sertifikasi guru</li> <li>4. Pengiriman calon assessor</li> <li>5. Mengirim 2 orang lulus tes sebagai peserta bintek Asesor</li> <li>6. Narasumber pelatihan kompetensi tenaga pendidik bagi guru PKn kota Semarang</li> <li>7. Narasumber seminar “Masadepan program sertifikasi guru</li> <li>8. Menerima audiensi guru TK dan IGTK</li> <li>9. Peserta sosialisasi</li> </ol> <p><b>Kegiatan tahun 2009</b></p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat koordinasi sebid pengembangan karir dan profesi kab/kota se-Jateng</li> <li>b. Menyusun agenda kegiatan yang dapat direalisasikan di daerah</li> <li>c. Memberikan layanan pengembangan profesi melalui bimbingan</li> <li>d. penulisan karya ilmiah/PTK yang menunjang profesi guru</li> </ul>
5	Pendidikan	<p><b>Kegiatan tahun 2006 .</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan formal</li> <li>b. Menjadi pengarah pada diklat percepatan mutu pendidikan di gedung wanita</li> </ul> <p>Kegiatan tahun 2007 dan 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Organisasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi sekretaris bidang pendidikan PGRI Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah</li> <li>2. Menyusun silabus mata pelajaran/mata kuliah PGRI untuk sekolah-sekolah PGRI di seluruh Jawa Tengah</li> <li>3. Melaksanakan kebijakan PGRI dalam mengawal pelaksanaan Undang-Undang Guru dan Dosen</li> <li>4. Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan sekolah-sekolah PGRI di seluruh Jawa Tengah dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengelola sekolah PGRI</li> </ul> </li> <li>b. Kegiatan ilmiah Mengadakan latihan meningkatkan kemampuan pengelolaan sekolah-sekolah PGRI /Pengurus yayasan sekolah PGRI</li> <li>c. Kerjasama Melakukan pemantauan untuk peningkatan pengelola pendidikan</li> </ul> <p>Kegiatan 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Organisasi <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kebijakan organisasi dalam mengawal UUGD</li> <li>2. Melanjutkan penyempurnaan bahan ajar PSP PGRI</li> </ul> </li> <li>b. kerjasama Melaksanakan pemantauan untuk meningkatkan pengelolaan setiap jenjang pendidikan pada sekolah-sekolah PGRI</li> </ul>



--	--	--	--

6	Kerokhanian	<p>Kegiatan yang telah direalisasikan tahun 2006 s/d 2009:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Organisasi yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat koordinasi sek.bid kero khanian kab/kota se-Jawa Tengah.</li> <li>b. Mengaktifkan anggota PGRI dari jajaran Depag dengan cara menyelenggarakan perte muan terha dap guru-guru MI, MTs, MA.</li> </ol> </li> <li>2. Peringatan hari besar keagamaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat koordinasi sek.bid kero khanian kab/kota se-Jawa Tengah.</li> <li>b. Kajian keagamaan, kegiatan amalan romadhon, penyembelihan hewan Qurban dan halal bihalal</li> </ol> </li> </ol> <p>Kegiatan tahun 2007 dan 2008</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberi santunan anak yatim</li> <li>b. Memperingati Nuzulul Quran</li> <li>c. Penyembelihn hewan Qurban</li> <li>d. Kajian islam dan amalan islam</li> </ol> <p>Kegiatan 2009</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan rapat sek.bid</li> <li>b. Menyelenggarakan kegiatan agama</li> <li>c. Memperingati maulid nabi</li> <li>d. Mengisi majalah derap guru</li> </ol> <p>Kegiatan yang tidak terealisasi tahun 2008 adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi sek.bid kerokhanian kab/kota se-Jawa Tengah.</li> <li>2. Mengaktifkan anggota PG RI dari jajaran Depag dengan cara</li> </ol>
---	-------------	---

		<p>menyelenggarakan pertemuan terhadap guru-guru MI, MTs, MA.</p>
7	Advokasi dan Perlindungan hukum	<p>1. Memperjuangkan secara optimal hak-hak guru serta memberikan perlindungan terhadap guru yang mendapat kasus</p>

		<p>hukum baik secara litigasi maupun non litigasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyuluhan hukum di STBAIN Tegal, PGRI Cabang Windusari Magelang, PGRI Kab. Kebumen, PGRI Kab. Magelang.</li> <li>3. Seminar "UUGD"</li> <li>4. Rapat koordinasi sebid advokasi dan perlindungan hukum PGRI Kab/Kota</li> <li>5. Sosialisasi UUGD</li> <li>6. Mengisi rubric hukum</li> <li>7. Melakukan advokasi anggota PGRI di Kudus</li> <li>8. Melakukan advokasi anggota PGRI di Rembang</li> <li>9. Ikut merumuskan rancangan UUGD</li> <li>10. Merumuskan naskah kerjasama dengan lembaga/institusi lainnya</li> </ol>
8	Pemberdayaan perempuan	<p>Kegiatan yang telah direalisasikan tahun 2006 s/d 2009:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>0. Meningkatkan hubungan kekeluargaan melalui pertemuan rutin pengurus dengan mantan pengurus.</li> <li>1. Melakukan pelatihan penguasaan teknologi informasi , pelatihan jurnalistik bagi pengurus perempuan PGRI kabupaten/kota se-Jawa Tengah dengan menjalin kerjasama dengan IKIP PGRI Semarang</li> <li>2. Meningkatkan sensitivitas gender bagi pengurus PGRI Kab/Kota di Jawa Tengah</li> <li>3. Mengisi rubric perempuan di majalah "Derap Guru</li> </ol>

9	Pembinaan kesenian dan olah raga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan peningkatan mutu guru/kep.TK se-Kab Magelang</li> <li>2. Clinic Teaching seni musik guru TK di Salatiga</li> <li>3. Pelatihan seni musik guru SD,SMP,SMA dan pembina</li> <li>4. Clinic Teaching seni musik guru TK se-kab.Kebumen</li> <li>5. Diklat peningkatan mutu pembelajaran musik guru TK se-Kab.Batang</li> <li>6. Diklat peningkatan mutu pembelajaran musik guru TK se-Kota Semarang</li> <li>7. Diklat peningkatan mutu pembelajaran musik guru TK se-Kota Pekalongan</li> <li>8. Diklat kepala dan guru TK dan penyelenggara TK se-Jateng</li> <li>9. Lomba cipta lagu PAUD Kab. Semarang</li> <li>10. Lomba cipta lagu PAUD se-Jawa Tengah</li> <li>11. Pembinaan teknis pencipta lagu &amp;vokal group guru TK Jawa Tengah</li> <li>12. Pelatihan seni musik bagi guru TK,SD,SMP,SMA</li> <li>13. Clinic Teaching seni musik guru TK di Salatiga</li> <li>14. Clinic Teaching seni musik guru SD&amp;SMP Kab.Boyolali</li> <li>15. Clinic Teaching seni musik guru TK se-Kab.karang anyar</li> <li>16. Diklat kepala/guru TK IGTKI PGRI Jateng</li> </ol>
10	Informasi dan komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyebarluaskan informasi kebijakan, kegiatan sebagai pengembangan eksistensi organisasi</li> <li>2. Menjalinkan komunikasi dengan lembaga, organisasi, instansi terkait bagi kepentingan pengembangan organisasi</li> <li>3. Mendokumentasikan berbagai kegiatan PGRI</li> <li>4. Menyusun kliping berita dan artikel pendidikan dan PGRI yang dipublikasikan berbagai media cetak regional dan nasional</li> <li>5. Seminar”strategi dan Etika media massa</li> <li>6. Pelatihan Jurnalistik</li> <li>7. Manajemen pengelolaan majalah “Derap guru”</li> </ol>

Tabel : IV-14  
Jalinan kerjasama dengan lembaga lain yang dilakukan PGRI Jawa Tengah.

NO	Mitra Organisasi	waktu	Tema Kerjasama
1    2  3 4 5	Provinsi Jateng	28 feb 2006	Pertemuan konsolidasi <i>Forum group Discussion</i> rencana kerja pembangunan daerah 2007
		7 Maret 2006	Koordinasi program KB bagi institusi pengelola program tingkat propinsi
		8 Maret 2006	Pertemuan persiapan porseni tripartite Jateng 2006
		12 Maret 2006	Apel akbar dan penyampaian sikap forum Guru Bantu Indone sia Jawa Tengah di Semarang untuk diperhatikan dalam seleksi CPNS.
		9-11 Sept 2006	Persiapan rakor Wajar 9 <sup>th</sup> pro vinsi Jawa Tengah
	Bapeda Jateng	15 juni 2006	Whorkshop flu burung
		30 Juni 2006	Monitoring sos mob flu burung di 23 kab/kota se-Jateng
	Depnakertran	8 maret 2006	Pertemuan sosialisasi renstra KSPI penolakan revisi UU Ketenagakerjaan
	KPID Jawa Tengah	17 Mei 2006	Dialog public "Tayangan televisi yang memihak masyarakat"
	Dinas P dan K Pemda Jawa Tengah	13 juni 2006	Sarasehan pendidikan oleh dewan pendidikan Jateng
		Agts-sept 2006	Workshop pemantapan hasil studi tentang kekerasan terhadap anak
		17-18 Mei 2006	Konsolidasi FGD rencana kerja pem bangunan daerah 2007
		28 feb 2006	sosialisasi liberalisasi jasa pendidikan dalam kerangka Wto
		13 maret 2006	Koordinasi pelaksanaan ujian nasional 2005/2006

NO	Mitra Organisasi	waktu	Tema Kerjasama
6	KSPI	11 Maret 2006	Pertemuan sosialisasi renstra KSPI penolakan revisi UU ketenagakerjaan
7			
8	BKKBN	28 maret 2006	Orientasi KBN pengurus PGRI kab/ kota angkatan 1
		3s/d 4 april 06	Orientasi KBN pengurus PGRI kab/ kota angkatan 2
9	Education International (EI)	10s/d 12 maret 06	TOT (EI/PGRI/South East Asia Woman's network
		7s/d 8 sept 06	EI Conference woman's di Jakarta
10		9 s/d 11 sept 06	Conference EI Asia Pacific di Jakarta
11		21 s/d 23 jan 06	Evaluation and Planing Meetin PGRI-EI di Jakarta
12	Perguruan tinggi	16 sept 06 9 nop 06, 13 jan 06	IKIP PGRI SMG: Wisuda ke 30, wisu da ke 31, refleksi peristiwa 10 Nop .
13		11 nov 06	UNTAG : Sebagai pembicara seminar "Relevansi nilai sumpah pemuda & penguatan karakter bangsa
14		31 Okt 06	UNDIP : Halal bihalal keluarga besar
	Radio	7 nop 06	Smart FM :Nara sumber Kebijakan Pendidikan
		1 juni 06	Rasika
		26 juni 06	Trijaya
	DPRD Jateng	20 mei 2006	Penyampaian aspirasi , Apel akbar & deklarasi guru karyawan swasta Indonesia (PKGSI) Jawa Tengah
	Komisi IX DPR	21-23 Jan 06	Memperjuangkan hak-hak guru
	Mahkamah Konstitusi	18 Jan 2007	Sidang Uji Materi keputusan pemerintah yang tidak mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dari APBN
	Pemerintah daerah Kab/Kota		Penyampaian aspirasi Guru terhadap setiap kebijakan yang menyangkut kesejahteraan guru



#### **4.4 Hasil-hasil Penelitian**

##### **4.4.1 PGRI Sebagai Kelompok Kepentingan (*Interest Groups*) dan**

##### **Kelompok Penekan (*Pressure Groups*)**

Dalam menelaah kelompok kepentingan ada beberapa faktor yang perlu difahami yaitu memahami aktivitas kegiatannya, sistem politik yang berlaku pada saat itu dan lingkungan yang mempengaruhinya.

Dari segi internal organisasinya dapat difahami dari lingkup keanggotaannya, loyalitas anggota , lingkup kegiatannya dan derajat kedalaman kegiatan. Dari segi cara dan sarana yang digunakan untuk memperjuangkan tuntutannya dapat dipelajari dari sifat teknik-teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kelompok, bentuk tuntutannya, kekompakan kelompoknya, sumber daya material dan sumber daya manusianya.

Dari segi eksternal organisasi dapat diperhatikan dari derajat kesesuaian, ketaatan tujuan dan kegiatan kelompok dengan norma-norma atau kebiasaan

budaya politik yang berlaku, kemampuan kelompok dalam memelihara akses komunikasi langsung dengan pemerintah yang hendak dipengaruhinya.<sup>44</sup>

Sedangkan ciri yang nampak dari kelompok penekan adalah cara-cara yang dipakai untuk mewujudkan keinginannya dilakukan dengan paksaan dan penekanan seperti; demonstrasi, unjuk rasa, pemboikotan kegiatan, penggalangan massa dan sebagainya.

Dengan meminjam teori kelompok kepentingan diatas, maka keberadaan organisasi PGRI dapat dikategorikan sebagai kelompok kepentingan dengan logika pemikiran sebagai berikut :

Tabel : IV-15  
Bagan PGRI sebagai Kelompok Kepentingan ( Interest Group)

---

<sup>44</sup> William A.Welsh.1973,*Studying Politics* dalam Ramlan Surbakti, *op.cit.hlm.110*

Faktor yang perlu difahami dari	Ciri yang tampak pada PGRI sehingga dapat
Faktor yang perlu difahami dari ciri-ciri-ciri Kelompok Kepentingan	Ciri yang tampak pada PGRI sehingga dapat dikategorikan sebagai Kelompok Kepentingan
ciri Kelompok Kepentingan ( <i>Interest Groups</i> )	sebagai Kelompok Kepentingan
Faktor yang perlu difahami dari	Ciri yang tampak pada PGRI sehingga dapat
( <i>Interest Groups</i> )	
<b>Dari segi internal organisasi Aspirasi dan tuntutan kesejahteraan Guru</b>	
0. Kelompok kepentingan akan	Dari segi internal organisasi Aspirasi dan tuntutan kesejahteraan Guru
yang dilakukan Pengurus PGRI Jawa Tengah	Aktivitas dikategorikan sebagai Kelompok Kepentingan
1. Kelompok kepentingan akan	Loyalitas anggota PGRI :
tidak memperjuangkan kepentingan	Ciri yang tampak dari PGRI adalah aktifitas dan
kepentingan kelompok	Loyalitas anggota PGRI sangat baik, karena terikat dengan
kepentingan kelompok	1. kegiatannya memperjuangkan kesejahteraan, keadilan,
kepentingan kelompok	statusnya, terbukti mau dan mampu memberikan iuran
kepentingan kelompok	dan perlindungan kaum guru kepada pemerintah agar
kepentingan kelompok	secara rutin mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan
2. Lebih berorientasi kepada proses	PGRi merupakan kelompok yang terorganisasi dengan
untuk memperoleh kekuasaan	kepentingan guru dan dunia pendidikan. Hal ini sesuai
perumusan kebijakan umum yang	baik, karena punya anggota yang jelas yang para guru
melakukan penyusunan kebijakan	dengan misinya yang ingin menjadikan PGRI sebagai
dibuat pemerintah agar memihak	tenaga kependidikan, memiliki pola kepemimpinan dalam
diharapkan selalu dapat menam	organisasi profesi guru, organisasi perjuangan kesejah
kepadanya	keorganisasian, mempunyai sumber keuangan yang meluas dan
pung kepentingannya.	teraan guru dan organisasi ketenagakerjaan guru.
Sistem Politiknya :	PGRi tidak melibadkan diri dalam politik praktis yang
Kelompok kepentingan dalam	berjuang untuk mengusulkan
berjuang untuk mengusulkan	suatu kebijakan tidak untuk
suatu kebijakan tidak untuk	Lingkup keanggotaannya :
suatu kebijakan tidak untuk	Dari segi internal organisasi
suatu kebijakan tidak untuk	Lingkup keanggotaannya terdiri dari, independen, non-politik
suatu kebijakan tidak untuk	Keanggotaannya PGRI :
suatu kebijakan tidak untuk	kependidikan yang kadang kala aspirasi kurang didengar
suatu kebijakan tidak untuk	diperhatikan oleh pemerintah birokrasi, kerjasama dengan
suatu kebijakan tidak untuk	Kelompok / organisasi guru dan tenaga kependidikan
suatu kebijakan tidak untuk	berbagai instansi lembaga pemerintah
suatu kebijakan tidak untuk	berfungsi sebagai wadah kebersamaan kesejawatan dalam
suatu kebijakan tidak untuk	Lingkup kekuasaan sumber
suatu kebijakan tidak untuk	pengangan: yang jelas dan pola
suatu kebijakan tidak untuk	Lingkup kegiatan PGRI :
suatu kebijakan tidak untuk	profesional, melindungi / Advokasi hak guru, meningkatkan
suatu kebijakan tidak untuk	PGRi dalam memperjuangkan aspirasinya dilaksanakan
suatu kebijakan tidak untuk	kesejah teraan, mengembangkan kualitas PGRI mempunyai
suatu kebijakan tidak untuk	Lingkup keanggotaan PGRI secara nasional bahkan men
suatu kebijakan tidak untuk	anggota jelas (Guru-guru), ada susunan organisasi, sumber
suatu kebijakan tidak untuk	jalin kerjasama dengan <i>World Confederation of Organ</i>
suatu kebijakan tidak untuk	keuangan dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga
suatu kebijakan tidak untuk	<i>ration of the Teaching Profession (WCOTP)</i> dan <i>Internat</i>
suatu kebijakan tidak untuk	lain
suatu kebijakan tidak untuk	<i>tional Federation of Free Teachers Union (IFFTU),</i>
suatu kebijakan tidak untuk	<i>Educa tion Internati-onal (EI)</i>
balisasi seperti sekarang ini, ter	143
kadang mendapat donatur, spon	
sor dan suport dari luar negeri.	

Ketika PGRI memperjuangkan sebuah kebijakan tentang kepentingan guru, PGRI sangat intensif menjalin komunikasi politik dengan anggota dewan (DPRD, DPR, DPD), Pemerintah dan bahkan Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu ketika memperjuangkan tuntutan realisasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN maupun APBD.

Kalau kita menggunakan bagan teori sistem politik menurut pendekatan Easton dan Almond idealnya usulan pemikiran dari guru sebagai anggota masyarakat berupa permintaan dan dukungan disampaikan oleh PGRI sebagai kelompok kepentingan kepada partai politik, atau bisa langsung ke DPR dan DPD. Usulan berupa input kebijakan tersebut oleh wakil partai politik diproses didalam DPR / dewan bersama pemerintah dan akhirnya disetujui presiden selaku pemerintah keluarlah sebagai output / kebijakan pemerintah. Output berupa kebijakan pemerintah dilaksanakan oleh birokrasi. Pelaksanaan kebijaksanaan tersebut diawasi oleh fungsi penghakiman yang dijalankan oleh fungsi peradilan

Namun dari hasil penelitian ini ternyata penyampaian aspirasi dan perjuangan kesejahteraan guru yang dilakukan Pengurus PGRI Jawa Tengah tidak pernah melalui Partai Politik karena PGRI berusaha untuk tidak beraviliasi dengan

partai politik, Betapapun misalnya pemenang pemilu dari partai tertentu dan yang menjadi penguasa/presiden dari partai pemenang pemilu tertentu. Akan tetapi PGRI tetap bekerjasama dengan seluruh komponen bangsa, karena bagaimanapun anggota dewan juga berasal dari Partai politik. Bagi PGRI, Partai politik dan ilmu politik bukan harus dihindari tetapi politik merupakan sebuah strategi yang harus dipakai. Secara kelembagaan PGRI menghindari keterlibatan politik praktis namun juga tidak menghindari pola-pola berpolitik karena tanpa berpolitik maka misi perjuangan PGRI tidak akan pernah sampai.<sup>45</sup>

Tampaknya hal tersebut dibuktikan ketika PGRI selalu berharap dan berusaha mendudukkan kadernya di DPD. Dengan mempunyai wakil di DPD setidaknya PGRI dapat mewarnai setiap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Karena tanpa punya wakil di dewan kadangkala perjuangan PGRI tidak ditanggapi sepenuhnya dan sebagian diabaikan. Oleh karena itu ketika kita (PGRI) di dalam sistem (anggota DPD) harapannya dapat memperjuangkan kepentingan guru dan dunia pendidikan secara intensif dan hal ini sudah terbukti selama dua periode anggota PGRI menjadi anggota DPD mewakili Jawa Tengah.

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Sudharto, MA, ketua PGRI Jawa Tengah, Sabtu, 4 April 2009, Pukul. 09.00 s/d 11.00 wib.

Penyampaian aspirasi dan perjuangan PGRI Jawa Tengah dalam rangka peningkatan kesejahteraan guru meliputi empat hal, antara lain : (1)Upaya memperjuangkan hak-hak normatif guru seperti ( Tuntutan Uang makan, Tunjangan Perbaikan Penghasilan/TPP, Tunjangan Profesi sebagai dampak kebijakan sertifikasi guru), (2)Memperjuangkan realisasi anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN/APBD, (3)Memperjuangkan kenaikan status dari tenaga honorer, PTT, Guru Bantu untuk mendapatkan prioritas pengangkatannya menjadi CPNS, (4)Menuntut terealisasinya kebijakan di bidang pendidikan yang menguntungkan bagi tenaga kependidikan, antara lain : Terealisasinya UUGD, Kebijakan sertifikasi guru dan dosen, Kebijakan penggunaan dana BOS untuk menunjang KBM, dan tuntutan diterbitkannya PP No.74 tahun 2008 mengatur tentang kemudahan persyaratan sertifikasi bagi guru yang belum berijazah sarjana. Alur kegiatan pengurus PGRI Jawa Tengah dalam memperjuangkan kesejahteraan dapat dilihat dalam bagan tabel: IV-14 dibawah ini.



**Tabel : IV.16**

Alur kegiatan Pengurus PGRI Jawa Tengah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru

INPUT			PROSES			OUTPUT
Program	Kegiatan	Realisasi	Mekanisme Perjuangan melalui			
			Parpol	DPRD/DPR /DPD	Pemerintah	
Aspirasi seleksi cpns agar mengutamakan guru bantu/wiyata bhakti dan honorer	a. Surat no 13/U/Prov/XIX/06 tgl 21 Oktober 2006: Tujuan:.,Menpan RI, Presiden RI, Ketua DPR, Ketua DPD, Menko kesra	21/10/06	-	V	V	Pemerintah dalam mengangkat CPNS mengutamakan tenaga honorer, wiyata Bhakti dan Guru bantu.
	b. Surat no 120/U/Prov/XIX/06 tgl 13 April 2006: Di tujukan kepada DPRD Jawa Tengah	13/4/06	-	V		
	c. Surat no 160/U/Prov/XIX/06 tgl 23 Mei 2006: Di tujukan kepada bupati Pati.	23/05/06	-		V	Bupati Pati dan Grobogan mengajukan permohonan PGRI dengan tetap memperhatikan guru bantu dalam pengangkatan CPNS guru
	d. Dialog guru bantu dengan Bupati Grobogan	27/8/06	-		V	
Memperjuangkan guru bantu/wiyata bhakti /serikat pekerja	a. Menghadiri apel akbar diselenggara kan FGBI Jateng, Deklarasi PGKS Jateng, Deklarasi GTT Jateng	12 Maret 2006	-	V	V	-
	b. Tuntutan Dana BOS& penerbitan SK Wiyata Bakti guru Taman Kanak-kanak swasta	12 Jan 2006	-		V	Dana BOS untuk TK disetujui



Memperjuangkan hak guru dan pendidikan	a. Aksi damai "Guru menggugat" dengan mengirimkan aspirasi ke instansi terkait baik eksekutif / legislatif dengan tuntutan segera diwujudkan Undang undang Guru dan Dosen/UUGD	Feb 2006	-	V	V	DPR menampung aspirasi dan berjanji akan ditindaklanjuti terwujudnya UUGD
	b. Sertifikasi guru ditujukan Ditujukan ke Bupati/Wali kota se-Jawa Tengah : Surat No.154/u/Prov /xix/ 2006 tgl.17 mei 2006.	17 mei 2006	-		V	Bupati/wali kota menerima kebijakan adanya sertifikasi guru
	c. Teruskan aspirasi anggota ke Bupati magelang Surat no.180/u/prov/xix/ 2006 tgl. 12 juni 2006	12 juni 2006	-		V	Bupati magelang siap merealisasi dampak kebijakan sertifikasi guru
Aksi damai	Bupati tentang pemberlakuan periodisasi oleh Bupati Kudus	1sept 2006	-		V	

INPUT			PROSES			OUT PUT
Program	Kegiatan	Realisasi	Mekanisme Perjuangan melalui			
			Parpol	Dewan DPR/DPD	Pemerintah	
Aksi damai  Audensi, advokasi dan penyampaian aspirasi kepada	a. Bupati tentang pemberlakuan periodisasi oleh Bupati Kudus	1sept 2006	-		V	
	b. Pemberlakuan periodisasi oleh Bupati Rembang.	Sep 2006	-		V	
	c. Dengan ketua MPR bersama PB PGRI.	18 jan 2006	-	V		
	d. Dengan komisi XI DPR tuntutan diterbitkan PP tentang Guru	23 jan 2006	-	V	V	Pemerintah mengeluarkan PP No.74 tahun 2008 mengatur tentang kemudahan persyaratan sertifikasi bagi guru yang belum berijazah sarjana.
	e. Dengan komisi X DPR.	30 jan 2006	-	V		
	f. Dengan komisi DPD.	31jan 06	-	V		

Aspirasi seleksi CPNS agar mengutamakan guru bantu/wiyata bhakti dan honorer	a. Aspirasi seleksi CPNS: Surat no 13/U/Prov/XIX/06 tgl 21 Oktober 2006: dan 11-12 juli 2007: Tujuan :, Menpan RI, Presiden RI, Ketua DPR, Ketua DPD, Menko kesra	11-12 juli 2007	-	V	V	Pemerintah dalam mengang kat CPNS mengutamakan tenaga honorer, wiyata Bhakti dan Guru bantu.
	b. Perjuangan hak kesra guru: Surat no 375/org/Prov/XIX/07 tgl 8Nov 2007: Tujuan :Mengirimkan aspirasi melalui PB PGRI dan tembusan ke PGRI seluruh Propinsi di Indonesia	8Nov 2007	-		V	
Memperjuangkan hak normative guru	a. Tuntutan uang makan guru: Surat no 154/u/Prov/XIX/07 tgl 15Mei 200 :Tujuan :, Menpan RI, Presiden RI, Ketua DPR, Ketua DPD, Menko kesra	15Mei 2007	-	V	V	Pemerintah mengabulkan pemberian uang makan / TPP Tunjang an perbaikan penghasilan sebesar Rp 15.000 setiap hari kerja.
	b. Menyampaikan aspirasi anggota PGRI Kudus :Surat no 185 /u/prov /xix 07 tgl 13 Juni 2007: Ditujukan Bupati Kudus	13 Juni 2007	-		V	
	c. Menyampaikan aspirasi PGRI Kota Semarang: Surat no 184 /u/prov /xix 07 tgl 13 Juni 2007 Ditujukan walikota Semarang	13 Juni 07		X	V	
<b>INPUT</b>			<b>PROSES</b>			<b>OUT PUT</b>
<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Mekanisme Perjuangan melalui</b>			
			<b>Parpol</b>	<b>Dewan DPR/DPD</b>	<b>Pemerintah</b>	

Perjuangan realisasi anggaran pendidikan 20 % dari APBN /APBD	a. Meneruskan pernyataan PGRI ke Walikota bupati se Jateng: Surat no 187 /u/prov /xix 07 tgl 13 Juni 07	13 Juni 07	-		V	
	b. memperjuangkan realisasi anggaran pendidikan 20 % dari APBN/APBD ke pemerintah pusat dan menagih janji terwujudnya UUGD		-		V	Pemerintah pusat mengabulkan dengan merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN dan diterbitkannya UUGD
	c. Rapat gabungan tentang alokasi anggaran pendidikan 20% Prov. Jateng dengan Bapeda	10 des 2007	-		V	Pemda Jateng merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBD
	d. Menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi tentang tuntutan anggaran pendidikan 20%	1mei 2007	-	V	V	Gugatan dimenangkan oleh PGRI, sehingga pemerintah harus mentaati kebijakan tentang pengalokasian dana APBN/APBD sebesar 20 % untuk pendidikan.
	e. Dialog putusan MK terhadap Yudicial Review PGRI di jakarta	10 mei 2007	-		V	
	f. menghadiri sidang PTUN Surabaya	19 mei 2007	-	V	V	
	g. Menyampaikan aspirasi PGRI ke Presiden,DPR,DPD Mendiknas dan menkeu	11 s/d 12 Juli 2007	-	V	V	merealisasikan anggar an pendidikan sebesar 20 % dari APBN
	h. Audiensi dengan Wagub jateng	26 Juli 07	-		V	
	i. Audiensi dengan MK	22 agt 07	DENGAN MK			
	j. Pertemuan PGRI dengan MPR	19 sept 07	-	V		
	k. Audiensi ketua DPD dengan PGRI	3 Okt 07	-	V		



#### **4.4.3 Hasil-hasil yang dicapai Pengurus PGRI Jawa Tengah dalam memperjuangkan anggotanya**

Pada era globalisasi dan demokratisasi profesi guru saat ini harus ditempatkan pada posisi sepatutnya. Guru harus memiliki keahlian khusus yang harus dipersiapkan melalui pendidikan keahlian atau spesialisasi di bidang pendidikan dan pengajaran, Memiliki kemampuan untuk terus meningkatkan keterampilannya, dan Penghasilan yang memadai. Guru sebagai tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional sedangkan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (UUGD ps.5) .

Berdasarkan UUGD pasal 14.1 dikatakan bahwa Guru Mempunyai Hak memperoleh Penghasilan kebutuhan hidup dan kesejahteraan sosial, Promosi dan penghargaan, Perlindungan melaksanakan tugas, Memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, Memanfaatkan sarana dan prasarana serta Kebebasan dalam penilaian dan penentuan kelulusan, penghargaan, Rasa aman dan jaminan

keselamatan kerja, Kebebasan berserikat dalam organisasi profesi, Kesempatan berperan dalam kebijakan pendidikan, Kesempatan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi Pelatihan dan pengembangan profesi . Selanjutnya guru diharapkan mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimal yang meliputi : Gaji pokok, Tunjangan yang melekat pada gaji, Tunjangan profesi, Tunjangan fungsional, Tunjangan khusus, Maslahat tambahan.(Psl 15). Maslahat tambahan berupa tambahan kesejahteraan dalam bentuk: Tunjangan pendidikan, Asuransi pendidikan, Beasiswa, Penghargaan bagi guru, Kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, Pelayanan kesehatan, Dan bentuk lainnya (Pasal 19 ayat 1)

Peranan PGRI Jawa Tengah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru sesuai dengan harapan dan amanat UUGD dapat di ketahui bahwa hasilnya sebagian sudah terpenuhi antara lain :

A. Menjadikan PGRI Jawa Tengah sebagai organisasi peningkatan profesional guru dengan melaksanakan program kerja dan kegiatan :

No	Bidang kerja	Program kerja yang terealisasi
----	--------------	--------------------------------

1	organisasi kaderisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dan monitoring penyakit Flu burung di 23 kab/kota se Jawa Tengah kepada keluarga guru yang punya ternak ayam.</li> <li>2. Dialog public “ tayangan TV yang memihak mendidik” kerjasama dengan KPID Jawa Tengah</li> <li>3. Sarasehan pendidikan oleh dewan pendidik di Jateng</li> <li>4. Workshop pemaparan hasil studi tentang kekerasan terhadap anak</li> <li>5. sosialisasi liberalisasi jasa pendidikan dalam kerangka WTO</li> <li>6. Nara sumber kebijakan pendidikan di stasiun radio(Smart FM, Rasika, Trijaya)</li> </ol>
2	kesejahteraan	-
3	ketenagakerjaan	-
4	pengembangan karir & profesi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu tenaga kependidikan dengan menyelenggarakan latihan dan pendidikan, seminar, lokakarya sarasehan, diskusi, penataran dan pelatihan</li> <li>2. Memberi pelatihan, bimbingan penguasaan karya ilmiah, buku ajar untuk meningkatkan profesionalisme</li> <li>3. Aktif menyampaikan gagasan, pemikiran, pertimbangan tentang pelaksanaan pembangunan pendidikan dan proses pembelajaran tingkat kab/kota maupun propinsi</li> <li>4. Meningkatkan peran FKPPG dalam membantu guru lebih profesional dan lancar dalam pengumpulan angka kredit melalui kegiatan pengembangan profesi</li> <li>5. Melakukan kerjasama dan lomba yang berkaitan dengan proses pembelajaran guru</li> <li>6. Narasumber TOT KTSP Prov. Jateng</li> <li>7. Narasumber Workshop implementasi MBS</li> <li>8. Sosialisasi perubahan pelaksanaan sertifikasi guru</li> <li>9. Pengiriman calon assessor</li> <li>10. Mengirim 2 orang lulus tes sebagai peserta bintek Assesor</li> <li>11. Narasumber pelatihan kompetensi tenaga pendidik bagi guru PKn kota Semarang</li> <li>12. Narasumber seminar “Masadepan program sertifikasi guru</li> <li>13. Menerima audiensi guru TK dan IGTK</li> <li>14. Peserta sosialisasi pangarusutaman gender bagi lembaga masyarakat</li> <li>15. Menyusun agenda kegiatan yang dapat direalisasikan di daerah</li> <li>16. Memberikan layanan pengembangan profesi melalui bimbingan penulisan karya ilmiah /PTK yang menunjang profesi guru</li> <li>17. Meningkatkan peran FKPPG kab/kota dalam membantu guru meningkatkan profesi dan pengumpulan angka kredit pengembangan profesional</li> </ol>

5	pendidikan	1. Menyusun silabus mata pelajaran/mata kuliah PGRI untuk sekolah-sekolah PGRI di seluruh Jawa Tengah
		2. Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan sekolah-sekolah PGRI di seluruh Jawa Tengah dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengelola sekolah PGRI
		3. Mengadakan latihan meningkatkan kemampuan pengelolaan sekolah-sekolah PGRI /Pengu rus yayasan sekolah PGRI
6	kerohanian	1. Kajian kagamaan secara berkala
		2. Peringatan hari besar islam (PHBI)
		3. Kajian romadhon
		4. Mengisi artikel majalah guru”Derap Guru”
7	advokasi & perlindungan hukum,	1. Penyuluhan hukum di STBAIN Tegal
		2. Penyuluhan hukum di PGRI Cabang Windusari Magelang
		3. Penyuluhan hukum di PGRI Kab. Kebumen
		4. Penyuluhan hukum di PGRI Kab. Magelang
		5. Seminar”UUGD
		6. Rubrik pengetahuan hokum pada majalah guru.
		7. Mengembangkan kesadaran dan budaya hukum bagi anggota PGRI dilakukan dengan cara: Penyuluhan hukum, seminar, rapat dan diskusi di Batang, tegal dan 35 daerah kota/kab. Se Jawa Tengah.
8	pemberdayaan perempuan	1. Meningkatkan sensitivitas gender bagi pengu rus PGRI Kab/Kota di Jawa Tengah
		2. Mengadakan penyuluhan managemen organi sasi PGRI
		3. Menyelenggarakan TOT bagi pengurus perempuan PGRI
		4. Pelatihan TI bagi pengurus PGRI perem puan : Pelatihan IT
		5. Workshop AD/ART bagi pengurus perempuan PGRI
		6. Pelatihan TI tingkat lanjut bagi pengurus perempuan PGRI Kabupaten/kota se-Jawa Tengah
		7. Pelatihan kompetensi guru perempuan PGRI Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
		8. Mengisi rubrik perempuan di majalah “Derap Guru



9	Pembinaan kesenian & olah raga	1. Nara sumber pada kegiatan klinik Teaching seni musik di Kab/kota : Salatiga, Blora, Kab.Semarang, Kota Semarang
		2. Nara sumber penataran KBK guru bidang musik IGTKI, GOPTKI
		3. Pembinaan tim paduan suara PGRI : PGRI Kecamatan Bawen, Pabelan, Kota Salatiga
		4. Loka karya Seni Bahasa Jawa dan Semiloka Seni Musik
		5. Menyusun buku panduan seni musik
		6. Peningkatan profesional pengampu mata pelajaran kesenian dengan kegiatan lokakarya, semiloka, penataran.
		7. Pelatihan peningkatan mutu guru/kep.TK se-Kab Magelang
		8. Pelatihan seni musik guru SD,SMP,SMA dan pembina
		9. Clinic Teaching seni musik guru TK se-kab.Kebumen
		10. Diklat peningkatan mutu pembelajaran musik guru TK se-Kab.Batang
		11. Diklat peningkatan mutu pembelajaran musik guru TK se-Kota Pekalongan
		12. Diklat kepala dan guru TK dan penyelenggara TK se-Jateng
		13. Pembinaan teknis pencipta lagu &vokal group guru TK Jawa Tengah
		14. Pelatihan seni musik bagi guru TK,SD,SMP,SMA
		15. Clinic Teaching seni musik guru SD&SMP Kab.Boyolali
		16. Clinic Teaching seni musik guru TK se-Kab.karang Anyar
10	informasi dan komunikasi	1. Menyebarluaskan informasi kebijakan, kegiatan sebagai pengembangan eksistensi organisasi 2. Menjalin komunikasi dengan lembaga, organisasi, instansi terkait bagi kepentingan pengembangan organisasi 3. Mondokumentasikan berbagai kegiatan PGRI 4. Menyusun kliping berita dan artikel pendidikan dan PGRI yang dipublikasikan berbagai media cetak regional dan nasional 5. Seminar”strategi dan Etika media massa 6. Pelatihan Jurnalistik 7. Manajemen pengelolaan majalah “Derap guru”

A. Menjadikan PGRI Jawa Tengah sebagai organisasi peningkatan kesejahteraan guru. Hasil perjuangannya PGRI Jawa Tengah ikut andil dan berpartisipasi aktif menjadi motor penggerak melakukan perjuangan dan tuntutan kepada pemerintah dalam hal :

- (1) Pemerintah dalam mengangkat CPNS harus mengutamakan tenaga honorer, wiyata Bhakti dan Guru bantu. Kebijakan ini tampaknya sudah terbukti.
- (2) Pemerintah diharapkan memberikan uang makan / TPP Tunjangan perbaikan penghasilan. Hasil kebijakan ini sudah dirasakan bahwa setiap guru memperoleh TPP sebesar Rp 15.000 setiap hari kerja.
- (3) PGRI Jawa Tengah menjadi Koordinator pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang tuntutan anggaran pendidikan 20% dari APBN atau APBD yang tidak kunjung direalisasikan oleh Pemerintah padahal kebijakan tersebut sudah diamanahkan dalam konstitusi, sehingga pemerintah dipandang tidak mentaati konstitusi. Hasilnya gugatan dimenangkan oleh PGRI.

- (4) PGRI Jawa Tengah terus mendesak ke pemerintah agar diterbitkannya Undang-undang khusus yang mengatur tentang guru. Akhirnya dalam perkembangannya lahirlah Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD) sehingga memberikan pengakuan, jaminan, kepastian dan perlindungan hukum bagi guru dan dosen.
- (5) PGRI Jawa Tengah bersama dengan pengurus PGRI dari provinsi lain mengusulkan agar diterbitkannya PP No.74 tahun 2008 mengatur tentang guru dan kemudahan persyaratan sertifikasi bagi guru yang belum berijazah sarjana.
- (6) Diterapkannya program sertifikasi guru yang diharapkan meningkatkan mutu profesionalisme guru dan tingkat kesejahteraan guru merupakan dampak dari tuntutan lahirnya UUGD.

Dengan keberhasilan tersebut kondisi tingkat kesejahteraan guru saat ini mengalami peningkatan dibandingkan pada masa-masa yang lalu (Masa Orde baru). Setidaknya saat ini penghasilan guru dengan golongan IIB minimal berpenghasilan Rp. 1.500.000, masih mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok yang ia terima saat lulus sertifikasi. Sehingga gaji guru diperkirakan antara Rp. 2.500.000 sampai dengan Rp. 4.000.000.

## **4.5 Analisis Hasil Penelitian**

### **4.5.1 PGRI merupakan Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan**

Pada awal perjuangannya PGRI merupakan kelompok kepentingan bagi guru dalam rangka menuntut berbagai kebijakan pendidikan dan kesejahteraan guru. Peran sebagai kelompok kepentingan ini terjadi manakala PGRI dalam menyampaikan segala aspirasinya kepada pemerintah dilakukan dengan cara-cara yang santun seperti : melakukan lobi-lobi ke pemerintah, menyampaikan aspirasi lewat surat dan melakukan kerjasama sebagai mitra kesejajaran.

Ciri yang tampak bahwa PGRI merupakan Kelompok Kepentingan bisa dilihat dalam Tabel : IV-14 Bagan PGRI sebagai Kelompok Kepentingan, yang mana PGRI memenuhi syarat sebagai kelompok kepentingan yang ditandai dengan: (1) PGRI dalam memperjuangkan aspirasi guru tidak semata-mata hanya untuk kepentingan guru sendiri tetapi juga berdampak pada kepentingan yang lebih luas yaitu demi kebaikan mutu pendidikan secara nasional. Contohnya upaya memperjuangkan terealisasinya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN / APBD tidak untuk kesejahteraan guru saja tetapi sangat bermanfaat bagi

pendanaan pendidikan secara menyeluruh. (2)Sifat perjuangan PGRI yang Unitaristik, Independen dan non-politik praktis menjadikan PGRI bersifat mandiri, tidak terikat oleh kekuatan politik praktis. Sifat non-politik praktis inilah berakibat pada ketidakberpihakan pada salah satu partai politik yang sedang berkuasa. Dari sifat kemandirian dan tidak terikat oleh kekuatan politik tertentu inilah pada akhirnya terkadang menyulitkan dirinya sendiri dalam memperjuangkan sebuah kebijakan.(3)Setiap menyampaikan aspirasi ke pemerintah, PGRI mengutamakan jalur birokrasi, kerjasama dan tidak bertujuan mencari kekuasaan dalam pemerintahan. (4)PGRI selalu mengutamakan kerjasama dengan berbagai instansi yang berhubungan dengan upaya kemajuan pendidikan nasional, baik dari dalam maupun luar negeri.

Selanjutnya PGRI suatu saat juga bisa menjadi kekuatan kelompok penekan manakala ketika sampai pada kebijakan tertentu misalkan pemerintah tidak memenuhi tuntutan harapan guru/persyaratan tertentu untuk dilaksanakan maka guru melakukan demo, protes, unjukrasa atau mungkin sampai mogok mengajar.

PGRI sebagai Kelompok Penekan dapat terlihat pula dari hasil wawancara kami kepada salah seorang pengurus yang mengatakan bahwa :

..... Ketika memainkan peran sebagai serikat pekerja maka PGRI harus bertanggungjawab penuh terhadap nasib anggotanya. Dalam rangka menjalankan tanggung jawab tentang nasib anggotanya itu ya.. maka ketika ada kebijakan tertentu yang menyimpang dari harapan para guru tentu saja PGRI harus mengingatkan kepada pemerintah. Cara mengingatkannya bisa berbentuk mengeluarkan *statement* atau komentar di Koran atau di media massa yang lain, bisa juga kami menulis surat, bisa juga beraudiensi secara langsung. Ketika kami demo itu sebenarnya jalan akhir yang kami tempuh atau itukan sebagai alat terakhir ketika cara-cara/hal-hal lain sudah tidak mungkin di tempuh. Ketika upaya-upaya yang lebih santun itu tidak di dengarkan atau dengan usul yang lain-lain tidak didengarkan akhirnya terpaksa kegiatan demonstrasi atau unjukrasa dilakukan seperti itu.....<sup>46</sup>

PGRI berperan sebagai kelompok penekan pernah terjadi ketika guru melakukan demonstrasi ke Jakarta menuntut disahkannya UUGD dan mohon terealisasinya anggaran pendidikan sebesar 20 %.

Gambar IV- 1

PGRI memainkan peran sebagai Kelompok Penekan

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan sdr.Ngasbun







Sumber :Dokumentasi perjuangan PGRI Jawa Tengah dan PGRI Provinsi lain tahun 2005.

#### **4.5.2 PGRI merupakan Organisasi yang kuat**

Perlu dimaklumi bahwa dalam perjalanannya sejak kelahirannya lebih dari setengah abad yang lalu PGRI ternyata membuktikan dirinya sebagai organisasi yang masih lestari hingga kini dan tentunya untuk masa-masa yang akan datang. PGRI menjadi sebuah organisasi kaum guru yang kuat hal ini bisa dilihat dari kekuatan organisasinya, Sumberdaya manusianya, Keuangannya dan Jumlah anggotanya serta Strategi Perjuangannya.



## **1. Kekuatan Organisasi PGRI Jawa Tengah**

Kekuatan organisasi PGRI didukung tatanan urutan organisasi mulai dari tingkat bawah sampai pusat. PGRI di semua tingkatan memiliki tata urutan organisasi sebagai berikut; Pengurus Besar (PB), Pengurus Propinsi (PD I), Pengurus Kabupaten/Kota (PD II), Pengurus Cabang ditingkat kecamatan dan Pengurus Cabang Khusus di tingkat Perguruan Tinggi atau satuan unit kerja tertentu yang agak luas, Pengurus Ranting meliputi wilayah desa, kelurahan atau unit kerja pada satuan pendidikan sekolah. Sedangkan perangkat kelengkapan organisasi PGRI tingkat Propinsi terdiri Ketua, wakil ketua, Sekretaris, Bendahara dan Sekretaris bidang yang meliputi : organisasi dan kaderisasi, kesejahteraan, ketenagakerjaan, pengembangan karir & profesi, pendidikan, kerohanian, advokasi & perlindungan hukum, pemberdayaan perempuan, pembinaan kesenian & olah raga, informasi dan komunikasi. Anak lembaga dan Badan Khusus. PGRI Jawa Tengah memiliki 35 PGRI Kabupaten/Kota, 618 Pengurus Cabang, dan 248.446 anggota dikenal solid dan paling baik dan kuat dari seluruh PGRI se-Indonesia

Anak lembaga PGRI Jawa Tengah terdiri YPLP Dikdasmen PGRI Jawa Tengah, YPLP Perguruan Tinggi PGRI, LKBH PGRI cabang Jawa Tengah, Koperasi PGRI Jawa Tengah, Badan Khusus PGRI Jawa Tengah, meliputi : Yayasan Dana Setia Kawan Pensiun PGRI Jawa Tengah, Forum Komunikasi Pengembangan Profesi Guru (FKPPG) PGRI Jawa Tengah dan Badan penerbitan.

## **2. Sumberdaya Manusia**

Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh PGRI Jawa Tengah mayoritas mempunyai kompetensi dibidangnya. Selain berpengalaman dalam bidang pendidikan kebanyakan dari beliau mempunyai pengalaman organisasi, birokrasi dan kemampuan mengadakan lobo-lobi ke instansi dan lembaga pengambil kebijakan. Para anggotanya juga mempunyai kompetensi yang baik, karena mereka adalah kaum pendidik yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memajukan organisasinya demi kesejahteraan mereka sendiri.

## **3. Keuangan**

Sebuah organisasi tidak akan kuat bila tidak ditopang oleh dana yang memadai. Oleh sebab itu PGRI Jawa Tengah sekuat tenaga untuk mencari dana guna membiayai kegiatan organisasi. Selama ini dana operasional PGRI diperoleh

dari iuran 248.446 orang anggota. Setiap anggota besar iurannya Rp 2000 per-bulan. Selain dari anggota, sumber keuangan juga berasal dari sumber dana lain di-luar anggota yaitu usaha-usaha lain yang bisa mendatangkan keuangan seperti mendirikan usaha percetakan, Meningkatkan koperasi guru, dan sumbangan dari pemerintah. Upaya penggalan dana dapat dilakukan pula melalui peningkatan peran dan partisipasi anak lembaga PGRI dalam upaya pengumpulan dana. Harapannya anak lembaga bisa memberikan kontribusi sumber keuangan guna jalannya organisasi atau minimal dapat membiayai dirinya sendiri dalam operasional kegiatannya.

#### **4. Jumlah Anggota**

Anggota PGRI seluruh Jawa Tengah diperkirakan 248.446 orang ,terdiri Guru dan tenaga kependidikan yang tersebar di seluruh kabupaten / kota di Jawa Tengah. Perincian jumlah disetiap kabupaten / kota tidak sama, mestinya jumlahnya bisa diketahui namun untuk kepentingan ini kami belum bisa menerima keterbukaan. Dengan jumlah tersebut PGRI memiliki massa yang cukup banyak sehingga dapat dijadikan modal untuk menekan kepada pemerintah apabila kepentingannya tidak terealisasi.

## **5. Strategi Perjuangan Organisasinya**

Aktifitas pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah dalam mengusulkan kebijakan yang bersifat nasional diusulkan oleh pengurus besar. Penyelesaian persoalan di tingkat Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh pengurus daerah masing-masing kabupaten /kota yang bersangkutan dengan koordinasi dan dukungan pengurus daerah provinsi Jawa Tengah, Sehingga tampak bahwa peran Pengurus PGRI Jawa Tengah hanya menjembatani pengurus ditingkat Kabupaten / kota dengan Pengurus PGRI Pusat, Namun demikian PGRI Jawa Tengah perannya sangat penting karena harus mampu mengelola dan memadukan bermacam aspirasi yang berkembang dari berbagai daerah tersebut untuk disampaikan ke Pengurus pusat. Kecuali itu Pengurus PGRI Jawa Tengah harus mampu meredam segala gejolak yang terjadi di daerah Kabupaten/Kota.

Pengurus PGRI Provinsi menyadari dalam memperjuangkan kebijakan bagi kepentingan guru tidak bisa dilakukan sendiri. Mereka perlu kerjasama dengan instansi lain. Instansi yang dihubungi tentu yang lekat dan dekat dengan pengambilan kebijakan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, Pemerintah daerah maupun instansi pemerintah lainnya.

PGRI perlu pula kerjasama dengan NGO, Partai Politik, Media Massa dan organisasi lainnya. Kerjasamanya tidak terbatas pada tingkat kota atau kabupaten, propinsi, nasional tetapi sampai internasional. Patut disayangkan bila PGRI Jawa Tengah belum membuka diri bekerjasama dengan Partai Politik dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi perjuangan aspirasi. Hal ini sangat beralasan karena pengalaman menunjukkan ketika PGRI membuka diri terhadap Partai Politik, PGRI dijadikan sarana mencari dukungan untuk mencapai kekuasaan.

Dari daftar tabel IV-13 tentang jalinan kerjasama yang dilakukan PGRI Jawa Tengah ada bidang kerjasama yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Pengurus PGRI Jawa Tengah karena tidak sesuai dengan dunia Pendidikan, seperti : Kerja sama dengan BKKBN dalam hal Orientasi KB, Kerjasama dengan Bappeda dalam hal penanganan Flu Burung, Kerjasama dengan Perguruan tinggi tentang Halal bihalal keluarga besar.

Kerjasama yang berhubungan dengan kemajuan pendidikan yaitu: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah : Persiapan rakor Wajar 9<sup>th</sup> provinsi Jawa Tengah, KPID Jawa Tengah : Dialog public ”Tayangan televisi yang memihak masyarakat, Dinas P dan K Pemda Jawa Tengah : Sarasehan pendidikan oleh

dewan pendidikan Jateng, Pemantapan hasil studi tentang kekerasan terhadap anak, sosialisasi liberalisasi jasa pendidikan dalam kerangka Wto, Koordinasi pelaksanaan ujian nasional 2005/2006.

Kerjasama dalam upaya perjuangan kesejahteraan guru antara lain:  
Dengan pemerintah Provinsi Jateng : Apel akbar dan penyampaian sikap forum Guru Bantu Indonesia Jawa Tengah di Semarang agar diperhatikan dalam seleksi CPNS, Depnakertran dan KSPI: Sosialisasi renstra KSPI penolakan revisi UU Ketenagakerjaan, Education International (EI) : EI Conference woman's di Jakarta, Evaluation and Planing Meetin PGRI-EI di Jakarta, DPRD Jateng : Penyampaian aspirasi , Apel akbar & deklarasi guru karyawan swasta Indonesia (PKGSI) Jawa Tengah, Komisi IX DPR : Memperjuangkan hak-hak guru, Mahkamah Konstitusi : Sidang Uji Materi keputusan pemerintah yang tidak mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dari APBN, Pemerintah daerah Kab/Kota : Penyampaian aspirasi Guru menyangkut kesejahteraan guru.



#### 4.5.3 Tantangan Pengurus PGRI Jawa Tengah di era Reformasi dan sikap politiknya

##### A. Tantangan Pengurus PGRI Jawa Tengah

Era reformasi merupakan kurun waktu yang ditandai berbagai perubahan dalam semua sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tatanan kehidupan baru yang lebih baik guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Tatanan kehidupan baru yang diupayakan melalui reformasi adalah dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya diharapkan lebih baik sehingga tercipta masyarakat madani, yaitu masyarakat yang demokratis, sejahtera dan agamis. Era reformasi ini bagi Pengurus PGRI Jawa Tengah ada tiga tantangan yaitu tantangan global, nasional dan organisasi itu sendiri.

#### **1. Tantangan global bagi Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah**

Era globalisasi ditandai ketergantungan antar bangsa di dunia, suasana kompetitif dalam bidang ekonomi, pelayanan bidang jasa dan makin homogennya pandangan nilai-nilai dan perilaku, makin ketatnya tingkat persaingan hidup, dan semakin menguatnya sikap kritis masyarakat terhadap pandangan nilai-nilai. Tantangan global bagi Pengurus PGRI Jawa Tengah ditandai dengan timbulnya berbagai perubahan tatakehidupan yang sangat cepat dari dampak majunya ilmu dan teknologi. Disini pengurus PGRI ditantang untuk bisa menguasai kemajuan Ilmu dan Teknologi. PGRI Jawa Tengah harus memiliki sumber daya manusia yang bermutu,



berwawasan luas, mampu menguasai peralatan teknologi agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kemajuan jaman.

## **2. Tantangan Nasional bagi Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah**

Tantangan nasional bersumber dari hasil perkembangan era reformasi di segala bidang terutama dalam sikap politiknya sebagai koreksi terhadap beberapa kelemahan pada era sebelumnya. Tantangan ini menuntut dilakukannya pembenahan visi dan misi organisasi PGRI.

Era Reformasi terjadi pergeseran dalam hubungannya dengan tata kehidupan politik dan pemerintahan diantaranya : (a) Pergeseran pola pemerintahan yang otoriter menjadi lebih demokratis dengan ciri membudayakan sikap partisipatif dan demokratis. Pelayanan birokrasi yang kaku dan tertutup menuju pelayanan birokrasi yang terbuka. Dalam hal ini pengurus PGRI Provinsi harus menempatkan pola pelayanan yang demokratis, partisipatif dan tidak otoriter pula. (b) Manajemen yang kaku dan tertutup bergeser kepada manajemen yang terbuka dan luwes, maka pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah sudah saatnya membuka diri, mau menerima kritik dan bersifat open manajemen sehingga tidak akan ada lagi kecurigaan di sana-sini dalam memperjuangkan dan memberi

pelayanan kepada anggotanya. (c)Tatanan ekonomi yang hanya mengandalkan monopoli, konglomerasi, nepotisme dan kronisme bergeser ke tatanan ekonomi yang berpangkal pada pemberdayaan. Dalam hal ini pengurus PGRI Jawa Tengah harus bisa menerapkan bahwa PGRI Jawa Tengah harus terhindar dari budaya KKN dan menerapkan kebijakan yang transparan kepada para anggotanya. (d) Komunikasi satu arah/Top Down bergeser pada komunikasi dua arah dan bersifat Bottom-up. Bila diterapkan di PGRI Jawa Tengah, maka pengurus harus bisa menyerap aspirasi dari bawah.(e)Model pengelolaan sentralistik bergeser ke model otonomi sehingga harapannya pengurus PGRI provinsi mampu memberi kepercayaan dan kemandirian serta memberi peluang pemberdayaan yang lebih besar bagi pengurus kab/kota, pengurus cabang dan ranting.

### **3. Tantangan Organisasi bagi pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah**

Tantangan yang bersumber dari dalam organisasi itu sendiri akibat adanya pengaruh tantangan global dan nasional. Banyak permasalahan organisasi biasanya bersumber dari kurang efektifnya komunikasi dan kualitas sumberdaya( Pengurus dan anggota). Untuk itu Pengurus PGRI Jawa Tengah harus mengantisipasi dengan menerapkan empat strategi dasar yang tertuang di dalam AD/ART meliputi (1)in-

tensifikasi silaturahmi baik keajaaran vertikal maupun horisontal. (2)Optimalisasi kemitraan secara seimbang dengan berbagai pihak atas dasar saling menghormati dan menguntungkan.(3)Aktualisasi program yang berpusat pada hak dan martabat anggota (4) Transparansi manajemen organisasi dalam berbagai tingkatan,mulai dari pengurus pusat, provinsi, Kab/Kota, cabang sampai ranting.

## **B. Sikap Politik PGRI Provinsi Jawa Tengah Di era Reformasi**

Era reformasi adalah era keterbukaan, begitu halnya dengan kebijakan yang mesti dikeluarkan oleh pemerintah dalam kaitannya pendidikan dan kesejahteraan guru, pemerintah perlu sekali melibatkan lembaga yang menghimpunnya dalam hal ini PGRI atau paling tidak peranserta dan masukannya perlu di dengar atau bahkan perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusannya walaupun PGRI bukanlah lembaga pengambil kebijakan dalam pemerintahan. Lalu, realistiskah bila guru berhasrat membangun kekuatan politiknya? Tentu saja. Populasi guru yang besar di republik ini menjadi modal sosial untuk melakukannya. Dengan kekuatan yang besar itu, guru sebenarnya dapat menjadi kelompok penekan (pressure) yang efektif kepada

partai politik dan calon eksekutif dan legislatif dalam pengambilan keputusan yang peduli terhadap pembangunan pendidikan. Guru dapat saja menganjurkan masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang peduli terhadap nasib pendidikan.

Para guru juga mempunyai peranan cukup besar dalam memberikan pencerahan politik bagi para siswanya yang mungkin akan menjadi pemilih pemula. Peranan strategis guru tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran tingkah laku politik para siswanya yang betul-betul mencerminkan insan yang demokratis, antikekerasan, dan dapat membedakan calon legislatif maupun eksekutif dari sisi kualitasnya, bukan dari segi kelekatan emosional atau kesamaan primordial murid dengan caleg atau kandidat tertentu.

Peran penting tersebut dapat diwujudkan bila potensi guru terorganisasi secara baik, adanya kedisiplinan berorganisasi yang tinggi, dan terbangun suatu kekuatan politik nonpartisan. Mengapa politik nonpartisan sangat penting? Sebab sejarah masa lalu, telah menggoreskan tinta merah tentang bagaimana para guru, khususnya guru yang menjadi pegawai negeri, pernah "diwajibkan" untuk memenangkan partai politik tertentu; mereka harus berkampanye, paling sedikit sebagai

penggembira. Tetapi, persis setelah usai pemilu, nasib mereka termaginalkan begitu saja.

Menyadari akan hal itu kini PGRI Jawa Tengah telah mempertegas jati dirinya yang sempat dinilai luntur ditelan situasi sosial politik di era orde baru untuk mempertahankan organisasinya sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi dan organisasi ketenagakerjaan

Mengapa kekuatan politik guru mesti dibangun? Ada sejumlah alasan yang menjadi bahan pertimbangannya. Pendidikan acapkali ditempatkan sebagai sesuatu yang hanya menggeluti masalah *transfer of knowledge* yang kerap diintervensi dan diindoktrinasi. Implikasi semua itu adalah hilangnya profesionalisme dan independensi institusi pendidikan dari konteksnya sebagai institusi yang mencerdaskan dan membebaskan. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan kerap kali inkonsistensi dengan amanat UUD 1945, UU 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan peraturan lainnya. Contohnya saja (1) Masalah realisasi anggaran pendidikan 20 % yang sudah jelas diamanatkan dalam konstitusi, dengan mudahnya pemerintah baik di pusat maupun daerah masih saja berusaha untuk menghindar dengan alasan klasik tidak adanya anggaran. (2) Kebijakan Ujian Nasional

yang dikaitkan dengan standar kelulusan siswa telah melanggar otonomi penilaian guru yang bersifat holistik, menafikan prinsip-prinsip kebhinekaan, keunikan siswa, unsur keadilan, bertentangan dengan program wajar dikdas 9 tahun. (3) Bongkar pasang kurikulum yang kerap dilakukan juga menafikan eksistensi guru. Guru jarang dilibatkan dalam perbaikan kurikulum secara intens.

Pendidikan merupakan bagian dari proses kehidupan masyarakat yang tak terlepas dari pengaruh politik. Pelaksanaannya niscaya membutuhkan dukungan dari lingkungan masyarakat, penyediaan fasilitas, personalia, sistem sosial budaya, keamanan, dan politik. Pendidikan dan politik sendiri memiliki relasi yang amat erat, bahkan cenderung bersifat sosial alami. Guru sebagai pelaku yang berada di garda depan pendidikan niscaya memerlukan politik juga. Kegagalan dalam pendidikan salah satunya ditengarai dari lemahnya kemampuan politik guru. Oleh karenanya guru harus mempunyai kemampuan berpolitik.

Setuju atau tidak, guru merupakan aktor utama dalam proses politik. Sebagai aktor politik, guru harus mampu mentransformasi situasi masyarakat menjadi dunia yang lebih baik. Di dalamnya, guru berjumpa dan berinteraksi dengan banyak pihak, antara lain kepala sekolah, komite sekolah, dewan guru, karyawan,

yayasan, orangtua, lembaga-lembaga nonpemerintah, birokrat, politisasi, dan masyarakat. Hubungan antarkelompok ini tidak kebal dari praktik kekuasaan. Relasi ini terstruktur dan terbentuk melalui sebuah sistem yang menyangga sistem kekuasaan satu sama lain.

Setidaknya ada empat prasyarat penting yang harus dilakukan agar guru bisa membangun kekuatan politik nonpartisannya secara kuat. (1) Organisasi PGRI Jawa Tengah seharusnya tetap mempertahankan sifatnya yang unitaristik, independen, dan nonpolitik praktis agar tidak mudah mengintervensi. (2) Disiplin organisasi para guru perlu terus ditingkatkan. Disiplin organisasi para guru dapat meningkat jika para guru merasakan ada manfaat langsung dari peran pengurus PGRI. (3) Keberadaan PGRI harus dapat dirasakan manfaatnya oleh para guru. Jangan sampai keberadaan PGRI malah menjadi beban bagi para anggotanya. (4) Keikhlasan para pengurus PGRI untuk meminimalisasi kepentingan pribadinya demi kemaslahatan para guru.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. PGRI Provinsi Jawa Tengah merupakan Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan bagi para guru yang berjuang untuk mendapatkan perhatian dan kesejahteraan dari Pemerintah dalam pengabdianya sebagai tenaga pendidik. Hal ini tampak dari aktivitas kegiatan, lingkup kegiatan dan sifat perjuangannya. Dalam Sistem Politik, Partai Politik berperan memperjuangkan kebijakan kepada Pemerintah, tetapi bagi PGRI Jawa Tengah tidak pernah menyalurkan aspirasinya melalui Partai Politik namun lebih ke



lembaga Pemerintah dan Lembaga perwakilan (DPR/DPD/ DPRD). Hal ini disebabkan PGRI sudah berkomitmen untuk tidak beraviliasi dengan Partai Politik.

2. Prasyarat penting yang harus dilakukan agar guru bisa membangun kekuatan politik nonpartisannya secara kuat lewat induk organisasi PGRI Jawa Tengah;  
(1) PGRI Jawa Tengah seharusnya tetap mempertahankan sifatnya yang unitaristik, independen, dan nonpolitik praktis agar tidak mudah mengintervensi. (2) Disiplin anggota PGRI Jawa Tengah dapat meningkat jika para guru merasakan ada manfaat langsung dari peran pengurus PGRI. (3) Keberadaan PGRI harus dapat dirasakan manfaatnya oleh para guru. Jangan sampai keberadaan PGRI malah menjadi beban bagi para anggotanya. (4) Keikhlasan para Pengurus PGRI untuk meminimalisasi kepentingan pribadi dan kelompoknya.
3. PGRI Jawa Tengah dengan 35 PGRI Kabupaten/Kota, 618 Pengurus Cabang, dan 248.446 anggota dikenal solid dan paling baik dan kuat dari seluruh PGRI se-Indonesia. PGRI Jawa Tengah memiliki Anak Lembaga seperti :  
  
(a) YPLP PGRI Jawa Tengah yang mengelola lembaga pendidikan terdiri dari 344 TK dengan (13.354) siswa, 1 SD (79 siswa), 154 SMP (39.043 siswa), 39 SMA (17.841)

siswa), dan 30 SMK (11.179 siswa). Di samping itu ada YPLP PT PGRI Semarang yang mengelola IKIP PGRI Semarang dengan 4 fakultas yaitu FIP, FPBS, FPMIPA, serta FPIPS dan 9 prodi yaitu Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, PGTK, PPKN, Matematika, Biologi, Fisika, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris, Pendidikan dan Sastra Bahasa Jawa. Semua prodi telah terakreditasi A dan B. Jumlah Mahasiswa pada tahun akademik 2007/2008 sebanyak 11.196 orang.

- (b) Untuk melindungi para guru PGRI Jawa Tengah memiliki LKBH PGRI yang terus berkembang dan semakin dirasakan kehadirannya di kalangan anggota. Untuk tahun 2007 LKBH PGRI menangani 17 kasus litigasi dan 8 kasus nonlitigasi, memberikan konsultasi hukum terhadap 63 klien.
- (c) Untuk menunjang berbagai kegiatan organisasi PGRI Jawa Tengah juga memiliki beberapa badan khusus seperti: (1) Yayasan Dana Setiakawan Pensiun PGRI Jawa Tengah pada bulan Juni 2007 telah menyesuaikan dengan UU no. 16 Tahun 2001, dengan penyesuaian menjadi Yayasan Dana Setiakawan Guru Jawa Tengah yang manfaat utamanya adalah memberikan santunan kepada anggota/guru yang pensiun, dan uang duka kepada anggota/guru yang meninggal. Sejak tahun 1987 sampai bulan Desember 2007 telah memberikan sumbangan untuk 95.911 orang yang purnatugas dengan nominal Rp. 115.551.533.506,25. (2) Forum Komunikasi Pengembangan Profesi Guru (FKPPG) PGRI Jawa Tengah terus menerus melakukan aktivitas di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan kondisi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun anggaran yang dapat diusahakan oleh kabupaten/kota melalui hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah setempat dan pihak lain yang memungkinkan. (3) Badan Penerbitan PGRI Jawa Tengah. Badan khusus ini sejak Februari 2000 menerbitkan majalah *Derap Guru Jateng* yang terbit setiap bulan. Sampai sekarang telah menerbitkan 118 edisi. Majalah ini melayani pelanggan sebanyak 19.837 eksemplar.

4. PGRI Jawa Tengah merupakan organisasi yang kuat, ini bisa dilihat dari kekuatan organisasi, Sumberdaya Manusia, Keuangannya dan Jumlah anggotanya serta Strategi Perjuangannya. Kelebihan ini mampu menekan pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan guru dan mutu pendidikan.
5. Pengurus PGRI Jawa Tengah memadukan program kerja dan kegiatan kedalam tiga misi perjuangan yakni: Sebagai organisasi perjuangan profesi, Sebagai organisasi Kesejahteraan dan Sebagai organisasi Ketenagakerjaan.
6. Kerja keras pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah dalam memperjuangkan nasib guru pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya sebagian telah menunjukkan hasil antara lain, PGRI Jawa Tengah ikut andil dan berpartisipasi aktif menjadi motor penggerak melakukan perjuangan dan tuntutan kepada pemerintah dalam hal :
  - (b) Pengangkatan CPNS harus mengutamakan tenaga honorer, wiyata Bhakti dan Guru bantu. Kebijakan ini tampaknya sudah terbukti.
  - (c) Pemberian uang makan / TPP Tunjangan perbaikan penghasilan. Hasil kebijakan ini sudah dirasakan bahwa setiap guru memperoleh TPP sebesar Rp 15.000 setiap hari kerja.
  - (d) PGRI Jawa Tengah menjadi Koordinator pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang tuntutan anggaran pendidikan 20% dari APBN atau APBD yang tidak kunjung direalisasikan oleh Pemerintah padahal kebijakannya tersebut sudah diamanahkan dalam konstitusi, sehingga pemerintah dipandang tidak mentaati konstitusi. Hasilnya gugatan dimenangkan oleh PGRI.

- (e) Mendesak pemerintah agar diterbitkannya Undang-undang khusus yang mengatur tentang guru. Akhirnya dalam perkembangannya lahir Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD) sehingga memberikan pengakuan, jaminan, kepastian dan perlindungan hukum bagi guru dan dosen.
- (f) PGRI Jawa Tengah bersama dengan pengurus PGRI dari provinsi lain mengusulkan agar diterbitkannya PP No.74 tahun 2008 mengatur tentang guru dan kemudahan persyaratan sertifikasi bagi guru yang belum berijazah sarjana.
- (g) Diterapkannya program sertifikasi guru yang diharapkan meningkatkan mutu profesionalisme guru dan tingkat kesejahteraan guru merupakan dampak dari tuntutan lahirnya UUGD.

## **5.2 Rekomendasi**

Untuk meningkatkan peran pengurus PGRI Jawa Tengah dalam rangka melayani anggotanya (Guru dan tenaga kependidikan) dan dalam rangka memperjuangkan kebijakan kepada pemerintah maka perlu disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pengurus PGRI harus selalu pro aktif mensosialisasikan program kegiatannya kepada para guru, agar mereka tahu bahwa organisasi PGRI memang betul-betul bekerja untuk menyampaikan aspirasi suara guru kepada pemerintah.
2. PGRI agar dapat bekerja secara maksimal dan dapat memperjuangkan aspirasi kepentingan guru dengan berhasil maka organisasi PGRI itu sendiri harus

kompak dan adanya partisipasi yang aktif antara anggota, pengurus ranting, pengurus cabang dan pengurus daerah.

3. Era globalisasi dan reformasi saat ini Pengurus PGRI Jawa Tengah dihadapkan pada tiga tantangan yaitu tantangan global, tantangan nasional dan tantangan organisasi sendiri. Menghadapi tantangan global, Pengurus PGRI Jawa Tengah harus bisa menguasai kemajuan Ilmu dan Teknologi, memiliki sumber daya manusia yang bermutu, berwawasan luas. Menghadapi tantangan nasional Pengurus PGRI Jawa Tengah harus menempatkan pola pelayanan yang demokratis, partisipatif dan tidak otoriter, membuka diri, mau menerima kritik dan bersifat open managemen. Sedangkan upaya mengatasi tantangan organisasi, Pengurus PGRI Jawa Tengah harus terhindar dari budaya KKN dan menerapkan kebijakan yang transparan kepada para anggotanya, harus bisa menyerap aspirasi dari bawah. Mampu memberi kepercayaan dan kemandirian serta memberi peluang pemberdayaan yang lebih besar bagi pengurus kab/kota, pengurus cabang dan ranting.
4. Partisipasi anggota sangat dominan dalam membesarkan organisasi dalam hal ini sudah dibuktikan dengan banyaknya iuran yang masuk, namun sampai saat

ini masih kurang adanya transparansi manajemen pengelolaan. Untuk itu PGRI Jawa Tengah perlu melakukan pelaporan auditor kepada publik.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan pada penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya mengungkap atau mendiskripsikan program kerja dan kegiatan yang dilakukan Pengurus PGRI Jawa Tengah secara sebagian/ yang hanya berhasil diamati oleh peneliti. Kami berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Pengurus PGRI Jawa Tengah lebih dari uraian diatas, untuk itu kelengkapan informasi maupun data masih banyak yang belum terungkap. Terutama mengenai jumlah anggota PGRI seluruh Jawa Tengah, Tingkat partisipasi anggota maupun Jumlah anggota PGRI pada masing-masing Kab/Kota di Jawa Tengah itu sendiri.
2. Penelitian ini belum membuktikan Efektifitas Perjuangan Pengurus PGRI Jawa Tengah terhadap Pencapaian tingkat Kesejahteraan guru, hal ini disebabkan masih adanya beberapa anggapan bahwa perjuangan PGRI masih dirasa mandul terhadap keputusan-keputusan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru.

3. Penulis menyadari bahwa masih ada beberapa kelemahan tertentu dari uraian bahasa, metode pembahasan ataupun dari analisa kasusnya, untuk itu dengan senang hati dan terima kasih mengharapkan saran dan kritik.

#### **5.4 Agenda Penelitian yang akan datang**

Untuk melengkapi tesis ini, maka perlu dilakukan studi mengenai :

1. “Efektifitas Perjuangan Pengurus PGRI Jawa Tengah terhadap tingkat Kesejahteraan Guru”, hal ini disebabkan masih adanya beberapa anggapan bahwa perjuangan PGRI masih dirasa mandul terhadap keputusan-keputusan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru.
2. PGRI berpengalaman dalam pengelolaan manajemen pendidikan, anggotanya banyak, tingkat partisipasi anggotanya juga aktif namun sayang keberadaan sekolah-sekolah PGRI dibawah naungan yayasan PGRI Jawa Tengah baik dari SD, SMP , SMA dan SMK sulit berkembang untuk menjadi sekolah yang ideal. Untuk itu perlunya diadakan penelitian

“Sejauhmana Peran PGRI Jawa Tengah terhadap Pengelolaan Manajemen Sekolah dibawah Yayasan PGRI”.

3. Mungkin juga perlunya penelitian tentang: Pengaruh Manajemen Kepemimpinan terhadap tingkat Partisipasi anggota PGRI Jawa Tengah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Sumber dari Buku :**



1. **Buku teks yang diterbitkan.**

Duverger, Maurice, *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan*. Jakarta:Bina Aksara. 1984.

Gabriel A. Almond,1978. *Comparative Politic*.dalam Mohtar Mas' oed, *Perbandingan- an system politik*, Yogyakarta : Gajah Mada University pres, 2006.

PB. PGRI Pusat, *Kumpulan Peraturan Organisasi PGRI*. Pengurus Besar PGRI Jakarta, 2008

Muhamad Suryo, *Percikan perjuangan guru(Guru demo ;apa yang kau cari?* Semarang : PT.Aneka Ilmu.2003,

-----, *Percikan Perjuangan Guru ( Guru ; Dalam Kenyataan )*, Semarang: CV.Aneka Ilmu, 2003.

Mohtar Mas' oed, *Perbandingan system politik*, Yogyakarta :Gajah Mada Univer sity pres, 2006.

M.Rusli Yunus, dkk. *Perjalanan PGRI (1945-2003)*. Jakarta : PB PGRI ,2003.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008,

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya. 2000.

Dep.Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,Surat. Ar-Ra'du* (13): 11, Badan penerbitan Depag Jakarta; 2004.

Rusadi Kantaprawira, *Sistem politik Indonesia*, dalam Dep. Pend. Nasional, *Materi PKn SMP*, Jakarta: 2005.

Ramlan Surbakti, *Memahami ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana, 1992.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, :Penebit Alfabeta Bandung,2006..

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta Bandung, 2005.

Sukarna, *Sistem Politik* , Bandung ; PT Citra Aditya Bakti, 1990.

Dep.Kominfo.RI, *Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008,tentang Partai Politik*. Jakarta ; diperbanyak oleh Pt. Gramedia Pustaka.2008.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka,1982.

William A.Welsh.1973, *Studying Politics* dalam Ramlan Surbakti, *Memahami ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana, 1992

## **2. Buku teks yang tidak diterbitkan :**

Muhdi,dkk, *IKIP PGRI Semarang Dalam Media*, Semarang : IKIP PGRI Semarang Press 2008.

Sulistyo, *Risalah dan Keputusan Konferensi Kerja PGRI 2007*, Semarang; PB PGRI Jawa Tengah.2007.

## **B. Sumber dari Internet.**

HM.Rusli Yunus, *AD/ART PGRI*, Pengurus besar PGRI, Jakarta : [info@pgri.co.id](mailto:info@pgri.co.id), 2009.

-----, *PGRI sebagai serikat pekerja (Dulu-kini-yang akan datang)*, Jakarta [info@pgri.co.id](mailto:info@pgri.co.id). 2009.

Tri Hayat Aribowo, “PGRI di Tahun Baru”, Jakarta: [aryasadewa yahoo.com](http://aryasadewa.yahoo.com). 2009



PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

2009

---

HASIL WAWANCARA

**PERANAN PGRI SEBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN (*INTEREST GROUPS*) DALAM MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN GURU**

**(Studi Kasus Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2004 s/d 2009)**

**I. IDENTIFIKASI DATA**

1. Nama : Bp Sudarto, M.A.
2. Alamat : Jl. Lontar No 1 (Sidodadi Timur) Semarang
3. Jabatan : Ketua umum PGRI Propinsi Jawa Tengah.

**II. Pertanyaan :**

Selamat siang pak, saya Budiarto, mahasiswa MIP UNDIP perkenankan pada kesempatan ini mohon penjelasan mengenai: Peranan PGRI sebagai kelompok kepentingan dalam memperjuangkan kesejahteraan guru .

1. Bagaimana struktur organisasi PGRI dari bawah sampai pusat?

Jawab:

Menurut AD/ART PGRI

Kalau kita melihat anggaran dasar PGRI dalam Bab XI pasal 14 s/d pasal 20 perangkat kelengkapan dan susunan organisasi PGRI memiliki tata urutan organisasi dengan susunan: Kepengurusan tingkat nasional, Propinsi, Kabupaten / Kota, Cabang Khusus dan Tingkat ranting. Jenjang kepengurusan PGRI tersebut terdiri atas :

- a. Pengurus Besar, untuk tingkat pusat, berkedudukan di Jakarta dan pengurusnya berjumlah 26 orang.
- b. Pengurus Daerah tingkat I, berkedudukan di Ibukota Propinsi, jumlah pengurus masing-masing 20 orang.
- c. Pengurus daerah tingkat II, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, sebanyak 350 buah, masing-masing 17 anggota pengurus
- d. Pengurus Cabang, berkedudukan di Ibukota kecamatan atau Unit kerja, masing-masing beranggotakan 15 orang.
- e. Pengurus ranting, berkedudukan di unit kerja / desa, masing-masing beranggotakan 5 orang pengurus.

2. Bidang apa saja yang ditangani PGRI?

Jawab:

Bidang-bidang yang menjadi fokus perhatian PGRI Propinsi Jawa Tengah meliputi; Organisasi dan Kaderisasi, Kesejahteraan, Ketenagakerjaan, Pengembangan Karir & Profesi, Pendidikan, Kerohanian, Advokasi & Perlindungan Hukum, Pemberdayaan Perempuan, Pembinaan Kesenian & Olah Raga, Informasi dan Komunikasi.

Dibentuk pula anak lembaga PGRI dan badan khusus meliputi Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan (YPLP) Dikdasmen PGRI Jawa Tengah, Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan (YPLP) Perguruan Tinggi PGRI, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI cabang Jawa Tengah, Koperasi PGRI Jawa Tengah, Badan Khusus PGRI Jawa Tengah, meliputi : Yayasan Dana Setia Kawan Pensiun PGRI Jawa Tengah, Forum Komunikasi Pengembangan Profesi Guru (FKPPG) PGRI Jawa Tengah dan Badan penerbitan PGRI Jawa Tengah.

1. Siapa saja pengurus PGRI Jawa Tengah? Dan berapa karyawan di dalam lembaga PGRI Jateng?

Jawab: Susunan kepengurusan PGRI Jawa Tengah masa bhakti XIX (2004-2009) adalah sebagai berikut :<sup>47</sup>

Ketua	: Drs. Sudharto, M.A.
Wakil Ketua	: Drs.H. Soebagyo Brotosejati, M.Pd.
Wakil Ketua	: Taruna, S.H.
Wakil Ketua	: H.N. Sakdani Darmopamudjo

---

<sup>47</sup> Pengurus Daerah PGRI Jateng 2004-2009

Sekretaris : Drs. Sulisty, M.Pd.  
 Wakil sekretaris : Dra. Sri Suciati, M.Hum  
 Bendahara : Amir Ambyah  
 Wakil Bendahara : H.Sakbani

Sekretariat Bidang meliputi :

Sek.Bid. Organisasi dan Kaderisasi : Drs.H.S.Hadi Sanyoto  
 Sek.Bid. Organisasi Kesejahteraan : Dra.Hj.Tatik Suryo,MM  
 Sek.Bid. Ketenagakerjaan : H.Widadi, S.H.  
 Sek.Bid. Pengembangan Karir & Profesi :Drs.Sardju Maheri,M.Pd.  
 Sek.Bid. Pendidikan : Drs. Rustopo, S.H.,M.H.  
 Sek.Bid. Kerohanian : Dr.H. S. Hadi Sanyoto  
 Sek.Bid. Advokasi & Perlindungan Hukum : Muhdi, S.H., M.Hum.  
 Sek,Bid. Pemberdayaan Perempuan : Sulyem, Ama.Pd.  
 Sek.Bid. Pembinaan Kesenian & Olah Raga : Drs. Slamet Rahardjo  
 Sek.Bid. Infokom : Drs. Maryanto, M.Si.

Untuk memperlancar tugas dan tanggung jawab kepengurusan, PGRI Jawa Tengah mempunyai 28 staf karyawan baik yang sifatnya pegawai tetap, maupun honorer.

Daftar nama-nama karyawan PGRI Propinsi Jawa Tengah antara lain.

No	Nama	No	Nama
1	Agus Wismanto,B.Sc.,S.Pd.	15	Sahidin
2	Arien Sri Lestari,S.E.	16	Shodik
3	Bayu aji Nugroho,S.Kom.	17	Sintha Indrayani,S.E.
4	Haryoto	18	Sri Mustika Rini H, S.E.
5	Lies Seniwati	19	Suci Sukiptiyah

6	M.Rahmad Subagyo	20	Sunarti
7	Makno	21	Suwartoyo
8	Mulyono	22	Suyadi
9	Muntofik	23	Tuti Indah S
10	Nining Tri Winarti	24	Ulis Widjoretno,S.H.
11	Puji Rahayu Ningsih	25	Umi S
12	Purwanto,S.Pd	26	Widhi Utomo HP,S.H.
13	Riyanti	27	Witono,A.M.d.
14	S.Triwijayati	28	Yuniarto Budhi S.,S.Pd

2. Apa saja program kerja yang akan diperjuangkan PGRI untuk masa bhakti 2004-2009

Jawab: Program kerjanya dapat anda lihat dalam kantor TU, pinjam saja nanti. misalnya

Program kerja tahun 2006 hasilnya dicapai di tahun 2007

Program penataan interen Organisasi

No	Program	Bentuk kegiatan	Waktu pelaksanaan	Ket
A	Penataan Intern Or ganisasi meliputi; penataan kantor, sistem administra si, keuangan dan pembagian kerja Job discription	Renovasi gedung, pembagian tugas piket, penataan management keuang an,pembagian tugas kerja	Januari s/d Juli 2006	
1	Konsolidasi organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konkerprov PGRI Jateng di Banyu mas</li> <li>b. Rapat pengurus pleno: Membahas rencana sosialisasi UUGD&amp;tindak lanjut konkerkov.</li> <li>c. Konpus PGRI III di Jakarta,Jateng men- girim lima orang sebagai utusan.</li> <li>d. Rapat pengurus harian &amp; korwil PGRI se- Jateng dengan agenda: Asuransi Avanza, Bencana alam &amp; Pembangunan monumen</li> <li>e. Rapat pengurus harian PGRI Propinsi dengan agenda: Bencana alam, Kalender, Piket penguirus.</li> <li>f. Rapat pleno pengurus PGRI Propinsi dengan agenda: Persiapan HUT PGRI ke- 61dan kegiatan Ramadhan.</li> <li>g. Rapat pleno pengurus PGRI Propinsi dengan agenda: Persiapan konker prov &amp; Persiapan Pilkada Jateng.</li> <li>h. Rakor PGRI Kab/Kota dengan YPLP Dikdasmen PGRI se-Jateng.</li> <li>i. Rakorwil PGRI Karisidenan Semarang di Demak</li> </ul>		
2	Konsolidasi organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Rakorwil PGRI Karisidenan Semarang di Grobogan</li> <li>k. Rakorwil PGRI Karisidenan Sema rang di Salatiga</li> <li>l. Konsolidasi organisasi di kab. Karanganyar&amp; Kota Surakarta.</li> <li>m. Rakorwil PGRI karisidenan Semarang.</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>n. Apel akbar HUT PGRI 2006 tingkat kabupaten</li> <li>o. Rakor dengan Sek.bid Pemberdayaan perempuan PGRI Kab/Kota se-Jateng</li> <li>p. Sebagai narasumber pelatihan ke uangan organisasi</li> <li>q. Sebagai narasumber pelatihan Bim bingan teknis Kaderisasi organisasi di Kab.Batang</li> <li>r. Peserta <i>Evaluating and Planing Meeting</i> PGRI-EL.</li> </ul>		
3	Kemitraan dengan organisasi lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertemuan konsolidasi <i>Forum group Discussion</i> rencana kerja pembangunan daerah 2007</li> <li>b. Koordinasi program KB bagi institusi pengelola program tingkat propinsi</li> <li>c. Pertemuan persiapan porseni tripartite Jateng 2006</li> <li>d. Pertemuan sosialisasi renstra KSPI penolakan revisi UU Ketenagakerjaan</li> <li>e. Apel akbar dan penyampaian sikap forum Guru Bantu Indonesia Jawa Tengah di Semarang</li> <li>f. Sosialisasi liberalisasi sector jasa pendidikan dalam rangka WTO</li> <li>g. Orientasi KBN untuk pengu rus PGRI diikuti karesidenan Semarang, Pati, Surakarta.</li> <li>h. Orientasi KBN untuk pengu rus PGRI diikuti karesidenan pekalongan,Banyumas, Kedu, Klaten di Banyumas</li> <li>i. Rapat koordinasi pelaksanaan Ujian Nasional th 2005/2006</li> <li>j. Apel akbar &amp; deklarasi guru karyawan swasta Indonesia (PKGSI) Jawa Tengah</li> <li>k. Peserta EI Conference woman's seminar di hotel Borobudur Jakarta</li> <li>l. Peserta conference EI Asia Pacifik di Jakarta</li> <li>m. Persiapan rakor Wajar 9<sup>th</sup> propinsi Jawa Tengah</li> <li>n. Pelaksanaan Rakor Dikdas 9 th</li> </ul>		



		o. Mengikuti workshop EI trade Union Right Project di Kuala Lumpur Malaysia.		
4	Sosialisasi UUGD	a. Sosialisasi UUGD di kota Semarang b. Sosialisasi UUGD di kab.Cilacap c. Sosialisasi di kab. Banyumas. d. Sosialisasi di kab.Purbalingga e. Sosialisasi di kab.Banjarnegara f. Sosialisasi di kab. Klaten dan Kota Surakarta g. Sosialisasi Kab.Karanganyar dan Kab. Sragen h. Sosialisasi di Kab.Boyolali i. Sosialisasi di Kab.Semarang j. Sosialisasi di Kab. Demak k. Sosialisasi di Kab.Kendal l. Sosialisasi di Kota Pekalongan m. Sosialisasi di Kab.Pemalang n. Sosialisasi di Kab.Tegal o. Sosialisasi UUGD di Kab.Kudus p. Sosialisasi UUGD di Kab.Pati q. Sosialisasi UUGD di Kab.Blora r. Sosialisasi di Kab.Temanggung dan Kab.Wonosobo s. Sosialisasi di Kab.Magelang dan Kota Magelang t. Sosialisasi di kab.Purworejo dan Kebumen u. Sosialisasi UUGD di SMP Kristen I Kab.Blora v. Sosialisasi di kab.Sukoharjo w. Sosialisasi di kota Salatiga x. Sosialisasi UUGD cabang khusus kandepag kota Semarang y. Sosialisasi di cabang khusus Depag kab.Tegal		

No	Program	Bentuk kegiatan	Waktu pelaksanaan	Keterangan
C	Perjuangan Organisasi			

1	CPNS	a. Aspirasi seleksi	Surat no 13/U/Prov/XIX/06 tgl 21 Oktober 2006	Tujuan: Menpan RI Presiden RI Ketua DPR Ketua DPD
			Surat no 120/U/Prov/XIX/06 tgl 13 April 2006	Di tujukan kepada DPRD Jawa Tengah
			Surat no 160/U/Prov/XIX/06 tgl 23 Mei 2006	Di tujukan kepada bupati Pati
		11. Dialog guru bantu dengan Bupati Grobogan	27 Agustus 2006	GOR Simpanlima Purwodadi
2	Memperjuangkan guru bantu/wiyata bhakti/serikat pekerja	a. Menghadiri apel akbar	12 maret 2006	Diselenggarakan FGBI Jateng
			20 Mei 2006	Deklarasi PGKS Jateng
			17 Desember 2006	Deklarasi GTT Jateng
		b. Dana BOS&SK Wiyata Bakti guru Taman Kanak- kanak swasta	Surat: No.90/U/Prov/XIX/2006 tgl 15 Juni 2006	Kepada Bupati Boyolali
		c. Kegiatan ilmiah	13 Mei 2006	Seminar GTT
			29 Juli 2006	Nara sumber GTT
			12 Januari 2007	Nara sumber dialog”Masihkah ada harapan guru Swasta”
		d. Serikat Pekerja	15 Mei 2006	Koordinasi SP/SB
			17 Januari 2007	Mengikuti upacara hari keselamatan kerja
				Mengikuti aksi damai damai KSPI tentang rencana revisi UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

No	Program	Bentuk kegiatan	Waktu pelaksanaan	Keterangan
----	---------	-----------------	----------------------	------------

3	Memperjuangkan hak guru dan pendidikan	a. Aksi damai "Guru mengawat"	Februari 2006	Mengirimkan aspirasi ke instansi terkait baik eksekutif/legislatif
		b. Sertifikasi guru	Surat no. 154/U/Prov/XI X/2006 tgl 17	Ditujukan ke Bupati/Wali kota se-Jawa Tengah
		c. Meneruskan aspirasi anggota	Surat no. 180/U/Prov/XI X/2006 tgl 12	Di tujukan ke Bupati Magelang
		d. Diskusi Pendidikan	2 Desember 2006	PGRI Kota Semarang
		e. Audensi, advokasi dan penyampaian aspirasi	1 Sept 2006	Ke Bupati tentang pemberlakuan periodisasi oleh Bupati Kendal
			Sept-Des 2006	Pemberlakuan periodisasi oleh Bupati Rembang
			18-1-2007	Dengan ketua MPR bersama PB PGRI
			23-1-2007	Dengan komisi XI DPR
			30-1-2007	DPD RI
			31-1-2007	Ceramah "Percepatan mutu pendidikan"
			18-1-2007	Dialog publik diselenggarakan bersama KNPI
			16-12-2006	Dengar pendapat dengan komisi XI DPR
4	Memperjuangkan kebijakan Ujian nasional	4) Anggaran	6 Februari 2006	Mengikuti aksi damai tuntutan anggaran pendidikan 20 %
		5) Pertemuan ilmiah	26 Juni 2006 1 juli 2006	Narasumber Talkshow "Dengan UAN sudah berkualitaskah Pendidikan" Nara sumber "Kontroversi UAN"
5	Bencana alam	6) Pengumpulan & penyaluran bantuan	Mei-Des 2006	Korban gempa di Jateng
6	Perjuangan realisasi anggaran 20 % dari APBN atau APBD dan realisasi UUGD	3) Anggaran pendidikan	6 Februari 2006	Mengikuti aksi damai
			5 Februari 2006	Pembicara seminar pendidikan
		4) Pertemuan ilmiah	11 Februari 2006	Seminar UUGD di Cilacap
			3 Mei 2006	Seminar UUGD di Brebes
			6 Mei 2006	Pembicara pend di UNNES
			13 Juni 2006	Nara sumber Dewan Pendidikan Jateng
			7 Nop 2006	Narasumber diskusi Guru di radio Smart FM
			13 Januari 2007	Seminar "Lahirnya UUGD

	Peningkatan profesional guru	Pertemuan ilmiah	3 Januari 2006	Nara sumber clinic teaching seni vokal di Doplang, Blora
			11-12 Januari 2006	Nara sumber clinic teaching seni vokal di Menden, Blora
			17-18 Januari 2006	Diklat KBK 2004 IGTKI PGRI Kota Surakarta
			5 Februari 2006	Pembicara seminar pendidikan oleh BEM IKIP PGRI Semarang
			5 Februari 2006	Pembicara seminar Bahasa Jawa oleh Yayasan Kantil
			20-21 Februari	Nara sumber klinik Teaching Blora
			4 Maret 2006	Nara sumber klinik Teaching Blora
			6 Mei 2006	Seminar”Kompetensi Guru” oleh dewan pendidikan Tegal
			17-18 Mei 2006	Workshop pemantapan hasil studi mendalam tentang kekerasan terhadap anak oleh <u>BAPPEDAL Jateng</u>
		Profesi	3-4 Agustus 2006	Pelatihan&pembelajaran IPA guru SD &pelatihan kemajuan dasar menyanyi guru Tkdi Batang
			8 Agustus 2006	Munas ALPTKSI di hotel melinium Jakarta
			4-5 Desember 2006	Nara sumber pelatihan seni musik guru TK se-kab.Sragen oleh Dinas P&K Kab.Sragen.
			16 Desember 2006	Nara sumber bimbingan teknis menggambar bagi guru SD se-kab.Batang
			23 Desember 2006	Nara sumber Profesional guru&prospek pendidikan Indonesia oleh PGRI kota Magelang
			9-11 Maret 2006	Lokakarya’ Kode etik guru,Majelis kehormatan, organisasi

No	Program kerja tahun 2009	No	Bidang kerja yang akan ditangani
----	--------------------------	----	----------------------------------

A	Administrasi umum	1	Melanjutkan dan meneruskan program yang sedang berjalan dan yang belum selesai.
		2	Melakukan penataan administrasi dan perangkat pendukung penyelenggaraan aktivitas organisasi
		3	Mengadakan pertemuan rutin pengurus harian, pleno dan koordinasi kedaerah-daerah serta instansi terkait
		4	Mengupayakan focus utama kegiatan pada komunikasi dan partisipasi guna mencegah diintegrasikan di tubuh PGRI, konsisten mempertahankan keamiran dan persatuan
		5	Memberi kesempatan, mendorong dan memberikan peluang tumbuhnya gerakan donasi untuk PGRI dari pejabat.
B	Organisasi dan kaderisasi	1	Memfokuskan pada program rekrutmen anggota baru dengan sasaran guru CPNS yang baru saja diangkat, guru swasta, guru tidak tetap (GTT) dan guru Bantu
		2	Memperjuangkan status guru tidak tetap yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) sehingga persyaratan, rekrutmen, jenjang karier, penghasilan dan system penilaiannya jelas.
C	Sek.bid Kesejahteraan		Memperjuangkan system khusus bagi guru dan tenaga kependidikan PNS yang meliputi system penggajian guru, peningkatan tunjangan fungsional, jaminan hari tua, perlindungan social dan kesejahteraan serta perhitungan gaji guru sesuai UU No 14 tahun 2005.
D	Sek.bid Ketenagakerjaan	1	Memperjuangkan dan membantu guru dalam memperoleh hak kepegawaian/tenaga kependidikan kenaikan pangkat, pembayaran gaji, pensiun yang tepat waktu , pengaturan system mutasi yang merupakan bagian integral dalam pembinaan pegawai.
		2	Memperjuangkan solusi kemudahan dalam upaya kenaikan pangkat dari golongan IVa ke IVb yang banyak berhenti karena sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi bagi guru.
E	Sek.bid Pengembangan karier dan Profesi		Upaya peningkatan profesi pendidik melalui pelatihan berkenaan dengan tugas-tugas guru sebagai pendidik profesional, memberikan layanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan dalam penulisan karya ilmiah/ penelitian tindakan kelas (PTK) sebagai wahana pengembangan profesi guru.
F	Sek.bid Pendidikan	1	Melaksanakan kebijakan organisasi dalam mengawal UUGD.
		2	Pemantauan untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan di setiap jenjang pendidikan pada sekolah PGRI.
G	Sek.bid Kerokhanian	1	Melaksanakan peringatan hari besar keagamaan (PHBI)

		2	Penyusunan artikel keagamaan melalui media komunikasi PGRI Jawa Tengah.
--	--	---	---

No	Program kerja	No	Bidang kerja yang akan ditangani
H	Sek.bid Advokasi dan perlindungan hukum	1	Memfokuskan pada pelayanan advokasi dan perlindungan hukum bagi anggota PGRI
		2	Memperjuangkan disahkannya PP tentang Guru dan Dosen sebagai implementasi UUGD
I	Sek.bid.Pemberdayaan perempuan	1	Meningkatkan hubungan kekeluargaan melalui pertemuan rutin pengurus dengan mantan pengurus
		2	Pengisian rubric perempuan di Majalah Derap Guru Jawa Tengah
J	Sek.bid Kesenian dan Olah raga		Mengadakan pelatihan dan peningkatan mutu pembelajaran seni musik di sekolah untuk 12 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
K	Sek.bid Informasi dan Komunikasi		Menjadikan majalah “Derap guru Jawa tengah” sebagai media informasi utama bagi anggota PGRI
L	Keuangan		Penertiban iuran anggota
2	Program umum anak lembaga dan Badan khusus PGRI Jawa Tengah		
	Anak lembaga PGRI		
A	YPLP Dikdasmen PGRI Jawa Tengah		Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dasar dan menengah yayasan PGRI di seluruh Jawa Tengah.
B	YPLP PT PGRI Semarang	1	Mengembangkan kampus dengan melanjutkan pembangunan gedung tujuh lantai di jalan Sidodadi timur Semarang
		2	Pengadaan mebel, Telepon, AC dan sarana lain untuk mengisi gedung baru dalam rangka kegiatan akademik
		3	Menyusun kembali rencana operasi (Renstra), rencana operasional (Renop) berdasar statute baru IKIP PGRI Semarang
C	LKBH PGRI Jawa Tengah		Memfokuskan pada pelayanan advokasi dan perlindungan hukum bagi anggota PGRI
			Memperjuangkan disahkannya PP tentang Guru dan Dosen sebagai implementasi UUGD
D	Koperasi PGRI		Melanjutkan kegiatan yang sudah ada
			Menciptakan peluang usaha baru yang menguntungkan koperasi
3	Badan khusus PGRI Semarang		
A	Yayasan Dana Setia kawan Guru Jawa		

B	Tengah	1	
	Badan penerbitan		
C	Forum komunikasi Pengembangan Profesi Guru (FKPPG)	1	

3. Sejauhmana hasil-hasil yang telah dicapai PGRI Jateng?

Jawab :

Hasil yang di capai pada periode ini banyak sekali, lebih jelas dan terperinci bisa pinjam di kantor TU, hubungi saja mbak Ulis Wijayanti.  
( Jawaban dalam lampiran )

4. Bagaimana tolak ukur /Standar mengukur keberhasilan program kerja PGRI?

Jawab:

Tolak ukur/standar mengukur keberhasilan program kerja dapat dilihat dari :

- Realisasi/keterlaksanaan program-program yang direncanakan/diagendakan dalam masa kerja kepengurusan.
- Kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dapat diterima/dirasakan oleh anggota PGRI
- Hasil-hasil yang telah dicapai/dilaksanakan PGRI dan bermanfaat langsung kepada para anggota PGRI.

7. Instansi mana sajakah yang terlibat dalam melaksanakan program kerja PGRI?

Jawab:

PGRI sangat menyadari dalam memperjuangkan kesejahteraan dan kebijakan pendidikan yang pro dengan kepentingan guru tidak bisa dilakukan sendiri. PGRI memandang perlu mencari strategi dan patner kerjasama dengan instansi-instansi lain,tentunya instansi yang berhubungan dalam pengambilan kebijakan. Dalam hal ini tidak lain lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif dan Yudikatif), Pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Untuk menjalankan fungsinya sebagai alat penyaluran aspirasi dan kepentingan guru

PGRI juga perlu kerjasama dengan Partai Politik. Kami menjalin dengan anggota dewannya.

Ketika PGRI memperjuangkan sebuah kebijakan tentang kepentingan guru, PGRI sangat intensif menjalin komunikasi politik dengan anggota dewan. Jadi bagi PGRI Partai politik dan ilmu politik bukan harus dihindari namun politik merupakan sebuah strategi yang harus kita pakai.

1. Bagaimana dengan pendanaan organisasi? Adakah subsidi dari pemerintah? Berapa?

Jawab :

PGRI Jawa Tengah merupakan lembaga yang independen, tidak terikat oleh organisasi manapun, maka konsekwensinya membiayai sendiri dalam hal operasional kegiatannya. Dana dari pemerintah juga ada tetapi nominalnya sedikit dan sifatnya temporer.

Menurut AD/ART Bab XXVII pasal 93 tentang keuangan organisasi disebutkan bahwa keuangan organisasi bersumber dari iuran anggota yangmana setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan iuran.

Ketentuan membayar iuran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Uang pangkal sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluhribu rupiah) bagi anggota baru dan diserahkan ke pengurus PGRI Kabupaten/kota.
- b. Iuran anggota ditetapkan oleh konferensi PGRI Propinsi, minimal Rp.2000,00 (Duaribu rupiah) setiap bulan, dengan rincian pendistribusian untuk :
  1. Pengurus besar PGRI sebesar Rp. 200,00
  2. Pengurus PGRI Propinsi Rp. 400,00
  3. Pengurus Kabupaten/Kota Rp. 600,00
  4. Cabang dan ranting Rp. 800,00

1. Bagaimana partisipasi anggota PGRI terhadap program-program kerja PGRI?

Jawab :

Partisipasi anggota PGRI terhadap program-program kerja terlihat sangat loyal terbukti dengan lancarnya iuran dari para anggota, dukungan moral maupun material terhadap keberadaan lembaga PGRI dan banyaknya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang menyangkut kesejahteraan guru



telah diperjuangkan oleh PGRI. Partisipasi anggota juga meningkat dapat dilihat dari jumlah anggota yang setiap tahunnya makin bertambah, ini menandakan keberadaan PGRI semakin dipercaya oleh para guru, masyarakat pendidikan dan pemerintah.

2. Sampai saat ini berapa jumlah anggota PGRI di Jateng ?

Jawab:

Anggota PGRI seluruh Jawa Tengah diperkirakan berjumlah 235.000 orang yang terdiri dari Guru dan tenaga kependidikan dan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Perincian jumlah di setiap kabupaten dan kota kami tidak hafal, mestinya jumlahnya bisa diketahui namun untuk kepentingan ini kami belum bisa terbuka.

3. Bagaimana mekanisme dalam memperjuangkan kesejahteraan guru kepada pemerintah?

Jawab:

PGRI dalam memperjuangkan kesejahteraan dan kebijakan pendidikan bagi anggotanya perlu mencari strategi dan patner kerjasama dengan instansi-instansi lain. Instansi yang dihubungi tentu instansi yang dekat dan lekat dengan pengambilan kebijakan. Dalam hal ini lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif dan Yudikatif), Pemerintah daerah dan pemerintah pusat. PGRI dalam menyalurkan aspirasi guru dengan mengusulkan langsung ke pemerintah, baik pusat atau daerah. Tentunya pemerintah akan membicarakan nya dengan DPR dan DPD. PGRI juga biasa menyalurkan aspirasinya langsung ke DPR atau ke DPD selanjutnya akan diusulkan kepada pemerintah.

4. Sebenarnya hak-hak apa sajakah yang diperoleh guru ketika menjadi anggota PGRI?

Jawab:

PGRI akan selalu memperjuangkan aspirasi kepentingannya yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemajuan di bidang pendidikan. Contoh; sertifikasi guru, UUGD, PP No.74 tahun 2008 tentang Guru, Profesionalitas guru, Kemampuan pedagogik dan peningkatan kualitas SDM, Advokasi hukum dan sebagainya.

Kita sebagai guru sudah sepantasnya tergabung dalam sebuah organisasi profesi yang dapat melindungi hak-hak guru dan ikut berkiprah secara aktif untuk kemajuan guru. Dengan bergabung menjadi anggota PGRI kita bisa bergaul dengan guru-guru lain dari SD sampai SMA baik dari daerah tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. Kita akan mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) PGRI bila kita mendapatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum baik berkaitan dengan tugasnya maupun kasus pribadi dengan tanpa dipungut biaya.

Kecuali itu ketika pensiun kita akan mendapatkan dana pensiun dari Yayasan Dana Setia Kawan Pensiun PGRI yang besarnya disesuaikan dengan lamanya menjadi anggota PGRI. Kita akan mendapatkan kartu anggota PGRI dan SK Pengurus PGRI (bagi yang menjadi pengurus) yang dapat dipakai sebagai menambah angka kredit guru atau untuk portofolio sertifikasi guru. Dengan menjadi anggota PGRI, kita memiliki banyak kesempatan untuk ikut berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PGRI baik di tingkat kecamatan hingga tingkat pusat yang akan menambah wawasan dan pengalaman tersendiri.

5. Kewajiban apa sajakah yang harus dilakukan guru ketika menjadi anggota PGRI?

Jawab:

Sebagai anggota PGRI kita sudah mendapatkan hak-hak normatif yang telah diperjuangkan oleh PGRI untuk itu sudah sewajarnya kita juga harus memenuhi kewajiban kita sebagai anggota PGRI, antara lain: membayar iuran, menjaga nama baik lembaga PGRI. Kewajiban lain bisa kita lihat di dalam AD/ART. Yang tidak boleh kita tinggalkan adalah memberikan kritikan dan saran yang membangun guna kemajuan organisasi, kalau perlu kita harus terlibat di dalamnya dalam arti menjadi subyek dan ikut mewarnai kebijakan-kebijakan organisasi dan bersifat aktif. Contoh sederhana mau bila ditunjuk menjadi pengurus PGRI. Pengalaman menunjukkan biasanya banyak guru-guru yang ditunjuk menjadi pengurus PGRI selalu menghindar dengan berbagai alasan. Ya... memang menjadi pengurus PGRI itu merupakan suatu panggilan profesi jadi harus ikhlas dan tidak banyak berharap akan imbalannya.

6. Bagaimana dengan guru-guru yang tidak menjadi anggota PGRI?

Jawab:

Bagi kami tidak apa-apa karena untuk menjadi anggota PGRI sifatnya sukarela. Kemungkinan mereka belum mengetahui manfaat organisasi PGRI bagi guru. Suatu saat pasti mereka akan bergabung, apalagi nanti dalam proses sertifikasi guru salah satu syaratnya harus tergabung dalam organisasi profesional guru entah itu PGRI atau yang lain.

7. Ada organisasi guru diluar PGRI seperti PGRI, Agupena, Klub Guru, Persatuan guru swasta Indonesia kemudian ada lagi persatuan guru tidak tetap dan sebagainya bagaimana tanggapan Bapak ?

Jawab :

Organisasi profesi guru selain PGRI juga ada. Bagi kami organisasi guru selain PGRI bisa merupakan **mitra kerja** dalam memperjuangkan kesejahteraan guru dan bisa menjadikan **motifasi** kami untuk memberikan pelayanan kepada anggota yang lebih baik serta dapat berkembang dengan lebih baik. Bagi kita tidak ada rivalitas, tidak ada permasahan asal kita bekerja sesuai dengan aturan dasar AD/ART masing-masing. Sehingga kita tidak saling mempermasalahkan dengan yang lain. Sampai saat ini PGRI masih merupakan sebuah organisasi yang merupakan representasi bagi anggota PGRI dan sangat diperhitungkan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan strategis di bidang pendidikan. Bahkan PGRI sering diundang pemerintah dalam kapasitasnya untuk membahas suatu kebijakan perundang-undangan. Ya.. karena kita tahu bagaimana proses perjuangan, Bagaimana kita untuk membawa aspirasi memperjuangkan mereka. Saya percaya semua guru tahu akan keberadaan PGRI sudah teruji sejak tahun 1945 dalam memperjuangkan kepentingan guru. Mengenai organisasi lain selain PGRI sejauh ini saya tidak begitu tahu, saya kira hanya PGRI yang komit memperjuangkan kepentingan guru. Sedangkan keberadaan organisasi yang lain menurut saya tidak dalam kapasitas menilai ya..karena organisasi merupakan hak seseorang untuk berpendapat sehingga saya tidak pas itu kalau disuruh menilai, biar orang lainlah.

8. Sebenarnya PGRI kelompok kepentingan ataukah kelompok penekan dalam memperjuangkan kepentingan guru kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan yang berpihak pada guru.

Jawab:

Oh.. ya PGRI merupakan kelompok kepentingan bagi guru dalam rangka

menuntut berbagai kebijakan pendidikan dan perjuangan kesejahteraan guru PGRI suatu saat bisa menjadi kekuatan kelompok penekan ketika pada kebijakan tertentu misalkan pemerintah tidak memenuhi tuntutan harapan guru/persyaratan tertentu untuk dilaksanakan dan suatu saat bisa berperan sebagai kelompok kepentingan manakala berperan menyampaikan pokok-pokok kebijakan guru untuk disampaikan kepada pemerintah

9. Dalam memperjuangkan suatu kebijakan kepada pemerintah adakah keterlibatan Parpol, contohnya.....dan partai apa saja yang bisa diajak kerjasama?

Jawab:

Dalam menyampaikan aspirasi kepentingan guru, PGRI bisa langsung kepada pemerintah baik pusat maupun daerah. Bisa juga melalui DPR, DPD. PGRI tidak langsung minta bantuan kepada partai politik secara kelembagaan namun lebih kepada fraksi-fraksi di DPR. Walaupun secara jujur DPR merupakan perwujudan dari lembaga partai politik di Indonesia.

10. Ada sebagian kalangan menilai bahwa PGRI selalu berafiliasi dengan partai-partai yang berkuasa di pemerintahan, benarkah demikian bu ?

Jawab:

PGRI tidak beraviliasi dengan partai politik manapun. Namun demikian PGRI tetap bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa, karena bagaimanapun anggota DPR/DPD juga berasal dari partai politik. Jadi secara kelembagaan PGRI menghindari keterlibatan politik praktis namun juga tidak menghindari pola-pola berpolitik. Pada hakekatnya tanpa berpolitik maka misi perjuangan kami tidak akan pernah sampai.

1. Bagaimana pendapat bapak terhadap peran media massa bagi pengembangan organisasi PGRI?

Jawab:

Di alam keterbukaan seperti ini kita harus mengakui bahwa peran media sangat penting dan strategis. Kita harus pandai memanfaatkan demi kemajuan organisasi dan yang lebih penting kita harus selektif mana itu berita yang bersifat kebenaran dan mana yang hanya sekedar propaganda. Saya yakin bahwa berita yang tidak benar akan terlikuidasi dengan sendirinya. Bila kita sebagai obyek pemberitaan manakala kita berbuat yang sesuai aturan dan

bersifat obyektif pasti akan disampaikan dengan obyektif pula. Dan yang lebih penting bagi kita tidak harus percaya begitu saja terhadap pemberitaan media yang masih bersifat bias. Tapi saya yakin masyarakat sekarang sudah pandai memilih mana berita-berita yang baik dan benar dan mana berita-berita yang tidak benar. Bagaimana pandangan bapak terhadap kebijakan pemerintah yang menyangkut kesejahteraan guru selama ini bila dikaitkan dengan misi-visi PGRI?

11. Bagaimana dengan PP No. 74 th 2008 tentang guru/ Apa isinya ? dan bagaimana implementasinya?

Jawab :

Itu mengatur tentang jabatan guru, pengangkatan guru, karir guru, kompetensi yang harus dimiliki guru, sertifikasi guru, Bagaimana kualitas guru, Disana juga diatur tentang proses sertifikasi untuk guru yang tidak punya ijazah S.1 tetapi usianya mendekati masa pensiun. Atau sudah bergolongan IVa minimal dan masa kerja 20 tahun yang bersangkutan bisa mengikuti proses sertifikasi

12. Dalam melaksanakan PP 74 pasal 40 dimana Guru berhak mendapatkan perlindungan, jaminan keselamatan, kesejahteraan dari pemda, satuan pendidikan, Organisasi profesi guru dsb, pada kenyataannya dengan adanya otonomi daerah, masing-masing daerah punya kebijakan sendiri, bagaimana dengan fenomena ini adakah keseragaman dalam pencapaian tujuan perjuangan kesejahteraan?

Jawab :

Menurut saya dengan kebijakan otonomi daerah justru akan memberikan kontribusi yang baik bagi peningkatan kesejahteraan guru, bisa lebih melindungi guru. Pemerintah daerah justru diberi kesempatan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan kompetensi profesional guru, mengembangkan sumberdaya yang dimiliki guru. Masalah kesenjangan kesejahteraan yang diterima guru untuk masing-masing daerah otonomi saya kira tidak ada karena gaji guru sudah sesuai dengan standar dari pusat. Mengenai penghasilan tambahan yang diterima guru dari pemerintah daerah itu diserahkan kepada daerah masing-masing. Saya kira kebijakan itu disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

13. Pasal 41 ayat 3 UU guru dan dosen diantaranya : Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi dalam hal ini tentu PGRI, tetapi sisi lain ;untuk menjadi anggota PGRI sifatnya sukarela, independent dsb..disini terlihat ada ambifalensi, bagaimana menurut ibu? Kemudian apa konsekwensinya terhadap guru yang tidak menjadi anggota PGRI?

Jawab.

Tidak.. jadi ini tidak menunjukkan suatu ambivalensi tetapi ini menunjukkan begini, di satu sisi karena pemerintah memandang bahwa organisasi profesi itu sangat penting di dalam peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan serta kualitas guru dan kesejahteraan guru maka dengan berlatar belakang itu pemerintah akhirnya menetapkan bahwa guru wajib mengikuti organisasi profesi. Kewajiban itu bukan sertamerta kemudian PGRI lalu memaksakan setiap guru lalu dipaksakan harus masuk itu, tidak, tetapi proses masuknya guru kedalam organisasi profesi itu, kami sebenarnya lebih demokratis karena di dalam AD/ART dinyatakan bersifat stelsel aktif artinya guru secara sukarela harus mendaftarkan sendiri untuk menjadi anggota PGRI/guru tidak otomatis menjadi anggota. PGRI justru itu menjadi bentuk demokratis bagi anggota PGRI.

Mungkin ini dulu pak... lain kali masih berharap mohon penjelasannya kembali



PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

2009

---

HASIL WAWANCARA

## **PERANAN PGRI SEBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN (*INTEREST GROUPS*) DALAM MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN GURU**

**(Studi Kasus Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2004 s/d 2009)**

### **I. IDENTIFIKASI DATA**

1. Nama : Bu. Dra Suciati, M. Hum
2. Alamat : Jl. Lontar No 1 (Sidodadi Timur) Semarang
3. Jabatan : Sekretaris PGRI Provinsi Jawa Tengah

### **II. Pertanyaan :**

Selamat pagi bu.. perkenalkan saya Budiarto, mahasiswa MIP UNDIP. Mohon ijin untuk menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan PGRI.

#### **1. Sejak kapan Ibu menjadi pengurus PGRI?**

Jawab :

Saya menjadi pengurus PGRI sejak th 2004 masa bakti 1992, kedudukan saya bukan menggantikan Pak Sulisty, Beliau tetap menjadi sekretaris umum PGRI Jateng walaupun saat ini beliau terpilih menjadi ketua PGRI pusat dan sebentar lagi dilantik menjadi anggota BPD mewakili Jateng. Saat ini saya tetap berstatus sebagai wakil sekretaris PGRI Jateng.

#### **2. Meliputi bidang apa saja yang ditangani oleh ibu?**

Jawab:

Semua bidang, karena sekretaris itu intinya memberikan fasilitasi untuk terlaksananya semua program kerja yang telah disusun oleh PGRI

Berarti saya tidak salah bertemu ibu ini ya bu... lalu

#### **3. Apa sebutan yang tepat untuk masing-masing satuan kepengurusan dalam PGRI?**

Jawab:

Di Jawa Tengah sebutannya adalah PGRI propinsi Jawa Tengah , di Kab/kota kita mempunyai PGRI kab/kota .Di bawah kab/kota kita memiliki PGRI cabang. Cabang itu tingkatannya berada di wilayah kecamatan. Di bawah kecamatan kita memiliki PGRI ranting. Ranting itu keberadaannya di tingkat desa bisa juga pada tingkat satuan kegiatan pendidikan, misalnya ranting SMP....., Ranting SMU.....

4. Bagaimana susunan kepengurusannya ?meliputi bidang apa saja?

Jawab :

Pengurusnya mulai ketua, wakil ketua 3 orang , sekretaris umum, 2 wakil sekretaris dan ada 2 bendahara. Ini semua dinamakan pengurus harian. Lalu di bawah itu ada sekretaris bidang meliputi: Sek.bid advokasi, pendidikan, organisasi dan kaderisasi, infokom, pemberdayaan perempuan, kerokhanian, kesenian dan olah raga.

5. Apa ada persamaan istilah sek.bid untuk masing-masing tingkatan organisasi?

Jawab :

Istilah sama, hanya saja kadang-kadang menyesuaikan kondisi daerah

6. Meliputi apa saja yang diperjuangkan PGRI ?

Jawab :

Yang diperjuangkan PGRI, sesuai dengan jati dirinya ,PGRI itu kan organisasi perjuangan, profesi dan organisasi serikat dan ketenagakerjaan. Yang diperjuangkan dalam Profesi tentunya adalah yang menyangkut profesionalisme guru dan meningkatnya kualitas guru kita. Untuk kualitas guru/profesionalisme guru melalui perjuangan kenaikan anggaran pendidikan, karena kalau anggarannya naik diharapkan mutu pendidikan juga akan naik, profesionalisme guru juga akan menjadi lebih baik. Kemudian juga perjuangan UUGD itu kan dalam rangka profesionalisme guru tetapi sekaligus juga kesejahteraan guru, karena disitu juga diatur bagaimana guru akan mendapatkan kesejahteraan.

7. Apakah karyawan PGRI apakah termasuk jajaran pengurus PGRI?

Jawab:Karyawan PGRI bukan termasuk jajaran pengurus, jumlahnya ada banyak, 4, 5, 6 sekitar 50an.

8. Program apa saja yang diperjuangkan masa bhakti ini ?

Jawab :

Setiap tahun kami memiliki program kerja yang bermacam-macam, tetapi biasanya ada program yang sangat menonjol, diantaranya :

- a. perjuangan untuk direalisasikannya / disahkannya UUGD. Bidang itu PGRI peranannya sangat tinggi karena sejak mulai merumuskan, mengkritisi ya... dalam penggodokannya itu sampai pengesahannya terus kita kawal sampai kemudian direalisasikan oleh pemerintah sampai sekarang.



b. Sertifikasi , kita ikut memperjuangkan karena setelah disahkannya UUGD itu kan tidak langsung berlaku.untuk menyangkut kesejahteraan guru, bagaimana untuk bisa melaksanakan sertifikasi itu kan aturan dalam UU tidak langsung bisa dilaksanakan maka perlu kita perjuangkan pula, maka muncullah Permendiknas (PP) yang mengatur sertifikasi melalui fortopolio. Setelah itupun masih banyak persoalan karena banyak guru-guru yang belum Strata satu (S.1) tetapi telah mengabdikan selama 20 tahun / hampir pensiun tidak bisa sertifikasi akhirnya minta diperjuangkan apa yang dinamakan PP 74/2009 tentang Guru yang sekarang juga sudah keluar.

9. Sejauhmana realisasi perjuangan PGRI tersebut, apakah sudah terwujud?

Jawab :

Kalau PP 74 sudah terwujud, UUGD sudah terwujud lalu realisasi anggaran 20 % terwujud juga. Bahkan sampai kita membawanya ke MK ( Yudisial Reviu sampai 3 kali PGRI memenangkannya)

10. Sejauhmana tolak ukur keberhasilan program perjuangan PGRI ?

Jawab :

Tolak ukurnya betul-betul UUGD sudah disahkan oleh presiden sejak tahun 2004, kemudian PP 74 juga sudah keluar, Permendiknas juga sudah keluar juga. Termasuk PGRI telah memperjuangkan guru Bantu, guru tidak tetap, guru swasta dalam kaitannya penerimaan CPNS. Waktu itu kan diatur bahwa guru wiyata bhakti, guru swasta yang mengabdikan di sekolah swasta, pengabdianannya tidak diakui tetapi kemudian PGRI memperjuangkannya karena bagaimanapun yang namanya penyelenggara pendidikan itu tidak mungkin hanya dikelola pemerintah saja maka kemudian pengabdian di sekolah swastapun sekarang ini diakui.

11. Dalam memperjuangkan kepentingan guru, instansi mana saja yang terlibat?

Jawab :

Instansi terkait meliputi Pemerintah daerah/pemerintah kota, Dinas Pendidikan, DPD, Pemerintah pusat, DPR, MK dan sebagainya.

12. Dalam memperjuangkan kepentingan guru melalui mekanisme apa?

Jawab :

Melalui lobi-lobi jalur birokrasi dan kita mencoba melalui lembaga DPD ini, karena kita berfikir kalau ada anggota pengurus PGRI yang duduk di DPD itu artinya bisa membawa aspirasi guru.

13. Mungkin dalam memperjuangkan kepentingan guru apakah melalui lobi ke partai politik , karena fungsi parpol juga memperjuangkan aspirasi masyarakat?

Jawab:

Tidak, kita tidak berhubungan dengan parpol. Selama ini memang kita tidak menggunakan jalur itu, misalnya dulu kita merumuskan dan merivisi rancangan UUGD itu istilahnya bukan melibatkan parpol tetapi kita mengundang anggota DPR dari ketua komisi E misalnya, diundang untuk bersama-sama membicarakan rancangan UUGD di IKIP PGRI Semarang waktu itu.

14. Menurut Ibu partai tidak terlibat dalam kerjasama dalam sebuah perjuangan kepentingan, tetapi dalam DPR ada unsur Parpol, kira-kira apakah mempengaruhi kinerja PGRI?

Jawab :

Tidak, yah.. karena kita juga tidak pernah mempertimbangkan partai politik karena PGRI sesuai dengan AD/ART PGRI merupakan organisasi yang independent dan tidak beraviliasi dengan partai apapun.

15. Dalam memperjuangkan kepentingannya pernah dilakukan dengan demo/aksi, apakah PGRI bisa dinamakan kelompok penekan dan kelompok kepentingan?

Jawab:

Kelompok penekan ya.. kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan karena merasa berkepentingan dengan misi-misinya yaitu memajukan pendidikan.

16. Apakah selama ini ada partai tertentu yang mendekat ke PGRI ?

Jawab:

Kalaupun ada, karena PGRI tidak beraviliasi maka ya tetap netral. Jadi Parpol tidak berperan dalam memperjuangkan kepentingan PGRI , karena memang PGRI tidak beraviliasi dengan parpol.

17. Kalau tidak berkepentingan dengan Parpol ,Bagaimana kalau memperjuangkan kebijakan ke pemerintah ?

Jawab:

Yang penting kita berjuang dan yang kita dekati tidak hanya DPR tetapi juga ke Presiden, Menkeu , ke DPD dan juga ke anggota DPR lepas dari partai apa dia berasal. Jadi perjuangannya bisa melalui birokrasi, DPD.

18. Bagaimana kalau anggota DPD tidak berasal dari PGRI?

Jawab:

Ya kita tetap akan konsisten saja, bukankah DPD itu mewakili daerah sudah sepantasnya membawa aspirasi dari PGRI yang notabenenya juga aspirasi berasal dari daerah.

19. Bagaimana perjuangan kesejahteraan yang dilakukan PGRI selama ini apakah sudah tercapai?

Jawab :

Kesejahteraan guru saat ini sudah lumayan, lumayan dalam arti untuk yang berstatus PNS, tetapi untuk guru-guru yang masih berstatus tidak tetap masih perlu perjuangan untuk peningkatannya. Terlebih sampai saat ini masih ada sejumlah guru-guru terutama pada TK masih ada guru yang bergaji Rp 100.000 perbulan. Kesimpilannya untuk perjuangan kesejahteraan guru masih perlu ditingkatkan. Yang kami perjuangkan tidak hanya PNS tetapi guru-guru lain juga karena anggota PGRI tidak hanya guru negeri saja.

20. Kami pernah mendengar ada sebagian kelompok guru yang merasa belum diperjuangkan oleh PGRI, tetapi kenyataannya PGRI telah melahirkan perjuangan-perjuangan yang berupa hasil kebijakan-kebijakan strategis untuk kesejahteraan guru, sebenarnya keuntungan apa saja yang diperoleh guru bila menjadi anggota PGRI?

Jawab:

Anggota PGRI akan memperoleh perlindungan /pengayoman, karena setiap anggota PGRI itu berhak mendapatkan perlindungan/pengayoman/advokasi dari organisasi guru. Kalau dia anggota PGRI dan sedang menghadapi kasus hukum maka biro hukum PGRI siap mendampingi untuk mengadakan upaya pembelaan dengan tidak dipungut biaya sama sekali. Karena kami mempunyai tim advokasi dan tim pengacara yang sudah handal dan selama ini sudah banyak sekali menangani kasus-kasus.

21. Bagaimana dengan program dana setia kawan pensiun PGRI?

Jawab:

Jadi tidak setiap anggota PGRI itu otomatis menjadi anggota dana setiakawan pensiun Jawa Tengah. Jaman dahulu namanya itu, sekarang bernama “Dana setiakawan guru Jawa tengah” setelah ada UU tentang yayasan yang baru. Karena tidak semuanya yah hanya anggota PGRI yang telah mendaftar menjadi anggota di tercatat sebagai peserta.

22. Apakah anggota PGRI secara otomatis menjadi anggota dana setiakawan guru Jawa Tengah?

Jawab:

Setiap guru yang menjadi anggota PGRI belum tentu menjadi anggota dana setiakawan guru Jawa tengah sebab sifatnya sukarela untuk program dana setiakawan guru. Guru yang ikut program dana setiakawan juga memiliki kartu peserta keikutsertaan.

23. Dalam melaksanakan PP 74 pasal 40 dimana Guru berhak mendapatkan perlindungan, jaminan keselamatan, kesejahteraan dari pemda, satuan pendidikan, Organisasi profesi guru dsb, pada kenyataannya dengan adanya otonomi daerah, masing-masing daerah punya kebijakan sendiri, bagaimana dengan fenomena ini bu..adakah keseragaman dalam pencapaian tujuan perjuangan kesejahteraan?

Jawab :

Jadi selama ini memang ada semacam ketidak ini ya .. ketidaksamaan antara kabupaten/kota yang satu dengan kab/kota yang lain tergantung dari PADnya sehingga kalau kita lihat ada sebagian guru di kabupaten/kota tertentu mendapat tunjangan penghasilan lebih tinggi daripada daerah lain ini sekarang merupakan hal yang biasa kemudian yang menjadi agak susah adalah guru yang ingin mutasi, karena otonomi ini guru yang akan mutasi akan menjadi susah ini yang mungkin bisa dikatakan menjadi hal yang menyulitkan. tetapi otonomi daerah juga ada plus minusnya. Ada daerah yang PADnya tinggi bisa memberikan kesejahteraan yang tinggi pada guru daerah itu tapi sebaliknya bagi daerah yang PADnya rendah juga menyesuaikan. Dulu memang pernah ada wacana untuk pengelolaan guru dikembalikan ke pemerintah pusat, tetapi dalam kondisi pemerintahan seperti saat ini apa mungkin?

24. Lalu bagaimana sikap PGRI terhadap wacana seperti itu?

Jawab:

Ya.. karena kami sebagai lembaga yang menampung aspirasi guru maka kami serap aspirasi mereka lalu kita bicarakan di tingkat propinsi, lalu menjadi bahan usulan kebijakan kepada pemerintah

25. Pasal 41 ayat 3 UU guru dan dosen diantaranya : Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi dalam hal ini tentu PGRI, tetapi sisi lain ;untuk menjadi anggota PGRI sifatnya sukarela, independent dsb..disini terlihat ada ambifalensi, bagaimana menurut ibu? Kemudian apa konsekwensinya terhadap guru yang tidak menjadi anggota PGRI?

Jawab:

Yang namanya organisasi profesi guru itu sebenarnya bukan hanya PGRI saja .Ada organisasi profesi guru yang lain seperti (Agupena, Klub Guru, Persatuan Guru bantu Indonesia dan sebagainya )yang mewakili guru juga harus kita akui. Organisasi profesi guru yang sudah diakui dan terbesar memang PGRI. Kesimpulannya organisasi PGRI bukan satu-satunya organisasi profesi guru di Indonesia ini oleh karena itu PGRI memberikan rambu-rambu bersifat stelsel aktif kalau ingin menjadi anggota PGRI tetap harus mendaftar. Selanjutnya munculnya UUGD ini kan belakangan, setelah kita punya AD/ART dan lainnya justru guru diwajibkan masuk anggota organisasi profesi oleh karena itu pemerintah juga yang harus menindaklanjuti dari UU ini. Pemerintah bisa menunjukkan organisasi profesi manasaja yang bisa diikuti oleh guru. Apa harus PGRI saja tentu tidak.

26. Kalau tidak salah dengar tadi ibu menyebutkan ada organisasi profesi guru yang lain selain PGRI, Bagaimana keberadaannya, apakah diakui pemerintah ataukah merupa kan batu sandungan bagi organisasi PGRI ?

Jawab:

Oh tidak..Di alam demokrasi seperti sekarang memang kita diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan organisasi yang diikuti dan banyak didirikan organisasi tertentu maka kita tidak boleh memaksanya untuk bergabung dalam PGRI tetapi memberikan kebebasan. Mengenai organisasi profesi yang lain diakui/tidak oleh pemerintah menurut saya sepanjang tidak bertentangan dengan azaz-azaz Negara kita tentu boleh-boleh saja.

27. Di dalam UU ketenagakerjaan disebutkan seorang PNS diwajibkan memilih salah satu anggota organisasi serikat buruh yang ada (PGRI atau Korpri) tetapi kenyataannya ikut kedua-duanya bagaimana menurut ibu ?

Jawab:

Korpri memang merupakan serikat pekerja tetapi pada kenyataannya tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana organisasi serikat pekerja. Lain halnya dengan PGRI selain organisasi profesi juga merupakan organisasi serikat pekerja yang betul-betul konsisten dengan perjuangannya. Oleh karena itu sebenarnya guru tinggal memilih masuk anggota korpri atau PGRI atau masuk kedua-duanya.

28. Apakah ada induk organisasi guru tingkat internasional yang menjalin hubungan dengan PGRI?

Jawab:

PGRI menjadi salah satu anggota organisasi guru tingkat dunia bernama Education International (EI).

Terima kasih bu..atas penjelasannya, lain kali saya masih minta bantuan dari ibu



PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
2009

---

## HASIL WAWANCARA

### **PERANAN PGRI SEBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN (*INTEREST GROUPS*) DALAM MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN GURU**

**(Studi Kasus Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2004 s/d 2009)**

#### d. IDENTIFIKASI DATA

4. Nama : Sdr. Drs. Ngasbun Egar, S.Pd.,M.Pd
5. Alamat : Jl. Lontar No 1 (Sidodadi Timur) Semarang
6. Jabatan : Sekretaris PGRI Kota Semarang merangkap membantu bendahara PGRI Propinsi Jawa Tengah.

#### II. Pertanyaan :

1. Apa jabatan bapak dalam kepengurusan PGRI Jawa Tengah?

Jawab:

Saya selama ini dipercaya oleh lembaga PGRI kota Semarang sebagai sekretaris umum. Ketuanya Drs. Suratin.

2. Berkaitan dengan jabatan bapak bidang apa saja yang bapak tangani?

Jawab:

Bidang yang saya tangani mengenai kesekretariatan organisasi. Menentukan kebijakan organisasi bersama ketua. Kesekretariatan merupakan posisi kunci selain ketua karena kepengurusan di PGRI bersifat kolektif dan kolegial artinya keputusan organisasi biasanya diputuskan bersama tidak diputuskan sendiri oleh ketua seperti direktur perusahaan.

3. Bagaimana struktur kepengurusan organisasi PGRI menurut bapak?

Jawab:

Jadi begini.. PGRI itu disemua tingkatan. PGRI kan ada di tingkat nasional namanya pengurus besar, ada di tingkat propinsi namanya pengurus PGRI propinsi, dan ada ditingkat kab/kota namanya pengurus PGRI Kabupaten/Kota. Kemudian ada di tingkat cabang, cabang itu ada cabang teritorial berarti di tingkat kecamatan, ada cabang khusus ada di perguruan tinggi. Di samping itu kepengurusan PGRI juga ada di tingkat ranting artinya kepengurusan PGRI di setiap unit satuan pendidikan, semisal SMP, SMA.

4. Apa tugas bapak berkaitan kepengurusan di PGRI?

Jawab:

Tugas kami di semua tingkatan itu ada dua sisi sebenarnya yaitu:

- a. Sisi Profesional. Artinya PGRI memperjuangkan profesionalitas guru dari sisi akademis berarti kita ikut bertanggungjawab meningkatkan kualitas guru untuk mendukung kualitas pendidikan
- b. Sisi kesejahteraan/sisi kepentingan guru nah.. maka kesejahteraan guru, nasib guru kita perhatikan. Jadi satu sisi PGRI itu menuntut guru untuk profesional, menjalankan tugas sebaik-baiknya meningkatkan profesionalitas dengan sebaik-baiknya tetapi disisi lain PGRI memperjuangkan nasib mereka, memperjuangkan meningkatkan kesejahteraan mereka.

5. Dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari pendanaan, darimanakah sumber dana PGRI?

Jawab:

Sumber dana diperoleh dari iuran anggota, dari sumbangan sukarela, donatur dari pemetrintah tetapi sifatnya insidental.

6. Apakah PGRI termasuk NGO?

Jawab:

Tidak.. PGRI bukan NGO, PGRI merupakan organisasi profesi dan organisasi ketenagakerjaan, pada sisi ketenagakerjaan sama halnya dengan serikat pekerja tetapi punya Visi lain karena juga sebagai tenaga profesional tentunya juga menangani hal-hal yang bersifat profesional tadi.

1. Bagaimana struktur organisasi PGRI Propinsi Jawa Tengah?

Jawab:

”PGRI di semua tingkatan memiliki tata urutan organisasi sebagai berikut; Pengurus Besar (PB), Pengurus Propinsi (PD I), Pengurus Kabupaten/Kota (PD II), Pengurus Cabang ditingkat kecamatan dan Pengurus Cabang Khusus di tingkat Perguruan Tinggi atau satuan unit kerja tertentu yang agak luas, Pengurus Ranting meliputi wilayah desa, kelurahan atau unit kerja pada satuan pendidikan sekolah. Sedangkan perangkat kelengkapan organisasi PGRI tingkat Propinsi itu meliputi; Pengurus PGRI Propinsi, Anak lembaga dan Badan Khusus, Himpunan atau asosiasi profesi, Forum Organisasi berupa konferensi PGRI Propinsi, Badan penasehat dan Dewan kehormatan organisasi serta Kode Etik Guru Indonesia”

2. Instansi mana sajakah yang terlibat dalam melaksanakan program kerja PGRI?

Jawab:

PGRI sangat mementingkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak maupun lembaga lain. Kami sangat menyadari bahwa dalam perjuangan tidak mungkin berjalan sendiri dan kami tidak mengharapkan prinsip oposisi dengan pihak-pihak tertentu, kami justru lebih menekankan pada prinsip kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik kepada pemerintah, institusi lain termasuk NGO dan kerja sama kami tidak terbatas hanya pada



level kota, kabupaten, propinsi, nasional tetapi juga sampai internasional. Lembaga Internasional itu diantaranya:

a. *Educational International* (EI)

*Educational International* (EI) adalah sebuah organisasi guru internasional. EI merupakan induk organisasi PGRI. PGRI juga punya kegiatan yang dibiayai oleh EI bahkan ada pula kegiatan PGRI yang dibiayai oleh konsorsium proyek yang terdiri dari lima(5) negara yaitu: Organisasi guru dari Jepang, Australia, Amerika, Swedia dan Norwegia.

b. *Kerjasama dengan ILO dalam hal memperjuangkan guru sebagai serikat pekerja (ketenaga kerjaan), Unesco dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan, Unicef dalam hal kesejahteraan anak-anak.*

c. *Beberapa contoh organisasi lain yang pernah bekerjasama dengan PGRI Jawa Tengah.*

3	Kemitraan dengan organisasi lain	<p>a. Pertemuan konsolidasi <i>Forum group Discusion</i> rencana kerja pembangunan daerah 2007</p> <p>b. Koordinasi program KB bagi institusi pengelola program tingkat propinsi</p> <p>c. Pertemuan persiapan porseni tripartite Jateng 2006</p> <p>d. Pertemuan sosialisasi renstra KSPI penolakan revisi UU Ketenagakerjaan</p> <p>e. Apel akbar dan penyampaian sikap forum Guru Bantu Indonesia Jawa Tengah di Semarang</p> <p>f. Sosialisasi liberalisasi sector jasa pendidikan dalam rangka WTO</p> <p>g. Orientasi KBN untuk pengu rus PGRI diikuti karesidenan Semarang, Pati, Surakarta.</p> <p>h. Orientasi KBN untuk pengu rus PGRI diikuti karesidenan pekalongan, Banyumas, Kedu, Klaten di Banyumas</p> <p>i. Rapat koordinasi pelaksanaan Ujian Nasional th 2005/2006</p> <p>j. Apel akbar &amp; deklarasi guru karyawan swasta Indonesia (PKGSI) Jawa Tengah</p> <p>k. Peserta EI Conference woman's seminar di hotel Borobudur Jakarta</p> <p>l. Peserta conference EI Asia Pacifik di Jakarta</p> <p>m. Persiapan rakor Wajar 9<sup>th</sup> propinsi Jawa Tengah</p> <p>n. Pelaksanaan Rakor Dikdas 9 th</p> <p>o. Mengikuti workshop EI trade Union Right Project di Kuala Lumpur Malaysia.</p> <p>p. Mengikuti evaluation &amp; Planing meeting PGRI-EI di hotel Milenium Jakarta.</p>
---	----------------------------------	---

3. Adakah kebijakan dari pemerintah yang menghambat program kerja PGRI?

Jawab:

Sejauh ini sebenarnya tidak ada kebijakan pemerintah yang menghambat program kerja PGRI, hanya kadang kebijakan pemerintah tidak selalu seperti yang dicita-citakan oleh PGRI, oleh karena itulah misalnya anggaran pendidikan 20% dari APBN/ABPD, ini kan sudah sangat lama diusulkan oleh PGRI namun pemerintah sangat lamban untuk merespon. Bahkan ketika sudah dinyatakan dalam UUD masih dilanggar maka harus kita protes, kita tuntutan lewat pengadilan lewat MK. Bahkan ketika MK sudah memenangkan tuntutan PGRI sebanyak 2 kali belum juga dilaksanakan dan dipenuhi oleh pemerintah. Memang ada kebijakan pemerintah tertentu yang harus akhirnya kita perjuangkan. Hanya melalui perjuangan baru diberikan termasuk misalnya UUGD.

4. Apakah parpol merupakan mitra PGRI dalam memperjuangkan kebijakan kepada pemerintah?

Jawab:

PGRI sangat menyadari dalam memperjuangkan pendidikan dan kesejahteraan guru tidak bisa jalan sendiri maka PGRI memandang kemitraan ini sangat penting. nah.. termasuk partai politik adalah termasuk mitra yang baik bagi PGRI, kami menjalinnya melalui anggota dewan, dimana ketika PGRI memperjuangkan kebijakan tertentu PGRI sangat intensif menjalin komunikasi politik dengan anggota dewan. Jadi bagi PGRI politik bukan sesuatu yang harus dihindari namun politik merupakan sebuah strategi yang harus kita pakai.

5. Apakah PGRI beraviliasi dengan partai politik tertentu?

Jawab:

PGRI tidak beraviliasi dengan partai politik manapun. Betapapun misalnya pemenang pemilu dari partai tertentu dan yang menjadi presiden adalah dari partai pemilu tertentu. PGRI tetap menjalin kerjasama dengan berbagai komponen partai politik termasuk mereka anggota dewan yang bukan berasal partai politik yang kebetulan sedang memimpin. Jadi kami punya prinsip bahwa dalam bekerja sama kita harus menggunakan kerja sama dengan siapa saja (dengan semua komponen).

6. PGRI kelihatan sangat antusias sekali memperjuangkan kadernya untuk duduk di DPD, Apa sebenarnya yang akan di cari?

Jawab:

Ya tentu kami berharap berhasil mendudukkan kadernya di DPD dengan harapan dapat mewarnai setiap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena tanpa punya wakil di dewan kadang-kadang perjuangan PGRI tidak

ditanggapi sepenuhnya dan sebagian diabaikan. Oleh karena itu ketika kita di dalam system harapannya dapat memperjuangkan secara intensif.

7. Menurut bapak dari sekian banyak partai politik, apakah ada kecenderungan kedekatan antara PGRI dengan partai tertentu?

Jawab:

Saya kira begini ya...dalam suatu perjuangan untuk menjalin kerjasama dengan parpol sangat situasional artinya ada partai-partai tertentu ketika kita memperjuangkan di sisi apa kemudian partai itu cenderung sangat mendukung tetapi ketika kita memperjuangkan sesuatu di sisi lain mungkin karena sedang berkonsentrasi di kepentingan yang lain juga. Jadi selama ini kita tidak bisa memang secara tegas menyatakan bahwa partai ini selalu mendukung PGRI, partai yang ini selalu tidak mendukung PGRI, kita tidak bisa begitu. Kenyataannya memang kebanyakan menurut atau bergantung pada situasi masing-masing.

8. Apakah ada upaya pendekatan dari pihak parpol kepada PGRI untuk menambah dukungan kekuatan bagi parpol tersebut ?

Jawab:

Harus secara jujur saya katakan bahwa banyak yang menawarkan baik secara perseorangan(caleg tertentu) maupun secara kelembagaan partai. Jadi cukup banyak partai dan juga perseorangan yang ingin maju pada posisi tertentu yang kemudian berharap mendapatkan dukungan dari kami(PGRI), itu cukup banyak lah.

9. Bagaimana sikap PGRI terhadap keinginan dukungan dari parpol tertentu?

Jawab:

Tentunya kami di dalam memberikan dukungan sangat selektif dan tidak gegabah karena kami ingin bahwa Negara ini betul-betul dituntun oleh orang-orang yang betul-betul punya kompetensi, punya komitmen yang bagus.

10. Bagaimana mekanisme pengambilan kebijakan di PGRI?

Jawab:

Mekanisme pembuatan keputusan di PGRI ada beberapa standard baku yang digariskan pada AD/ART. Jadi kalau secara nasional mekanisme itu kita sebut kongres. PGRI punya kongres yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kemudian ditingkat propinsi ada komperensi, di tingkat kabupaten/kota ada komperensi juga, di cabang juga komperensi. Jadi rupanya komperensi itu merupakan musyawarah tertinggi/ kedaulatan tertinggi bagi PGRI di bawahnya ada komperensi kerja yang dilaksanakan tahunan. Ada juga rapat-rapat yang bersifat rutin. Jadi rapat rutin itu ada

yang di desain rapat pleno, ada juga rapat rutin untuk pengurus inti dan mekanisme yang lain. Jadi ada kalanya betapapun tidak terjadwal ketika menghadapi situasi khusus maka kita segera mengumpulkan pengurus untuk melakukan rapat koordinasi. Peran dari anggota yang paling banyak ketika komperensi-komperensi kerja.

11. Dalam menyampaikan/memperjuangkan aspirasi kepada pemerintah bagaimana mekanismenya?

Jawab:

Ini tergantung pada persoalan bisa jadi ada masalah tertentu yang dihadapi oleh guru/ usulan tertentu. Ketika PGRI mau mengusulkan, usulan bisa berasal dari individu anggota tertentu, kemudian individu menkomunikasikan kepada pengurus, pengurus dalam hal ini bisa di tingkat ranting/ bisa langsung ke pengurus kota misalnya tetapi kemudian akan berkonsultasi dengan cabangnya. Setelah ini pengurus membahas dan selanjutnya lalu mekanisme mau dilanjutkan kemana tergantung pada apa yang di harapkan. Kalau usulan itu berkaitan dengan langsung ke wali kota maka akan kami teruskan ke wali kota. Bisa juga lewat dewan atau Kepala dinas pendidikan.

1. Sebenarnya PGRI kelompok kepentingan ataukah kelompok penekan dalam memperjuangkan kepentingan guru kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan yang berpihak pada guru.

Jawab:

PGRI suatu saat bisa menjadi kekuatan kelompok penekan ketika pada kebijakan tertentu misalkan pemerintah tidak melaksanakan maka kita tekan untuk dilaksanakan dan suatu saat bisa berperan sebagai kelompok kepentingan manakala berperan menyampaikan pokok-pokok kebijakan guru untuk disampaikan kepada pemerintah.

1. Pada saat PGRI melakukan demo/unjuk rasa apakah tidak bertentangan dengan kode etik guru?

Jawab:

PGRI kan mempunyai jatidiri yakni PGRI sebagai organisasi profesi dan organisasi serikat pekerja. Ketika memainkan peran sebagai serikat pekerja maka PGRI kan harus bertanggungjawab penuh terhadap nasib anggotanya. Dalam rangka menjalankan tanggung jawab tentang nasib anggotanya itu ya.. maka ketika ada kebijakan tertentu yang menyimpang ya tentu saja PGRI harus mengingatkan. Cara mengingatkannya bisa berbentuk mengeluarkan *statement* atau komentar di Koran atau di media massa yang lain, bisa juga kami menulis surat, bisa juga beraudiensi secara langsung. Ketika kami demo itu sebenarnya itukan sebagai alat terakhir ketika

cara-cara/hal-hal lain sudah tidak mungkin di tempuh. Ketika upaya-upaya yang lebih santun itu tidak di dengarkan yah..dengan usul yang lain-lain tidak didengarkan ya akhirnya terpaksa seperti itu.

20. Pasal 41 ayat 3 UU guru dan dosen diantaranya : Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi dalam hal ini tentu PGRI, tetapi sisi lain ;untuk menjadi anggota PGRI sifatnya sukarela, independent dsb..disini terlihat ada ambivalensi, bagaimana menurut Bp? Kemudian apa konsekwensinya terhadap guru yang tidak menjadi anggota PGRI?

Jawab:

Tidak.. jadi ini tidak menunjukan suatu ambivalensi tetapi ini menunjukkan begini, di satu sisi karena pemerintah memandang bahwa organisasi profesi itu sangat penting di dalam peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan serta kualitas guru dan kesejahteraan guru maka dengan berlatar belakang itu pemerintah akhirnya menetapkan bahwa guru wajib mengikuti organisasi profesi. Kewajiban itu bukan sertamerta kemudian PGRI lalu memaksakan setiap guru lalu dipaksakan harus masuk itu, tidak, tetapi proses masuknya guru kedalam organisasi profesi itu, kami sebenarnya lebih demokratis karena di dalam AD/ART dinyatakan bersifat stelsel aktif artinya guru secara sukarela harus mendaftarkan sendiri untuk menjadi anggota PGRI/guru tidak otomatis menjadi anggota. PGRI justru itu menjadi bentuk demokratis bagi anggota PGRI.

1. Bagaimana tentang PP 74?

Jawab:

Inti materinya mengatur tentang kompetensi guru yang antar lain bisa diperoleh melalui sertifikasi tetapi juga mengatur tentang sertifikasi yang dilakukan oleh calon guru/ pendidikan profesi. disitu juga diatur tentang proses sertifikasi untuk guru yang tidak S.1 tetapi sudah berusia minimal 50 tahun.Kemudian sudah bergolongan IVa minimal dan masa kerja 20 tahun maka meskipun tidak punya ijasah S.1 yang bersangkutan bisa diikutkan proses sertifikasi.

2. Dalam melaksanakan PP 74 pasal 40 dimana Guru berhak mendapatkan perlindungan, jaminan keselamatan, kesejahteraan dari pemda, satuan pendidikan, Organisasi profesi guru dsb, pada kenyataannya dengan adanya otonomi daerah, masing-masing daerah punya kebijakan sendiri, bagaimana dengan fenomena ini pak..adakah keseragaman dalam pencapaian tujuan perjuangan kesejahteraan?

Jawab:

Kami taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan lain-lain oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memenuhi hal itu..

ya.. seharusnya masing-masing pemerintah daerah memenuhi meskipun tidak ada kewajiban untuk diseragamkan/disamakan. Tapi saya memahami,karena mengapa..karena kebutuhan/biaya hidup daerah demi daerah berbeda, kemampuan daerah satu dengan daerah lain juga berbeda

3. Bagaimana pandangan bapak terhadap guru yang berpendapat bahwa PGRI belum berperan secara maksimal terhadap guru/guru belum merasa diperjuangkan padahal PGRI sudah berbuat banyak terutama yang berkaitan dengan kebijakan kesejahteraan guru?

Jawab:

Begini ya..Jadi kami semula berpedoman bahwa pada sunah nabi bahwa”Kalau berbuat baik itu jangan diceritakan kepada orang lain, kalau perlu tangan kanan kita berbuat baik tangan kiri tidak usah tahu begitu ya kira-kira” tetapi.. yang ini menyebabkan kemudian masih banyak bahkan kalangan guru itu sendiri yang tidak tahu perjuangan PGRI. Jadi mereka tidak tahu bahwa kenaikan gaji yang diterimanya setiap bulan itu buah perjuangan PGRI, nah waktu itu kami menerapkan prinsip seperti itu. Akhirnya kami menyadari hal-hal seperti itu mengakibatkan fitnah difihak tertentu. Maka akhirnya kami ya.. gencar mensosialisasikan meskipun kadang-kadang memang belum mampu menjangkau keseluruhan anggota yang paling bawah. Nah maka yang paling penting difahami oleh guru adalah ketika ada hal-hal yang kira-kira perlu ditanyakan/disampaikan kami selalu membuka komunikasi secara terbuka. Kami umumnya termasuk (saya misalnya) terbuka dengan nomer telepon kami untuk melayani anggota selama 24 jam. Di samping itu kami juga memanfaatkan media massa, kami juga menyediakan media”Derap Guru” sebagai wahana interaktif untuk mengajukan pertanyaan, untuk informasi organisasi, juga memanfaatkan koran lokal, kerjasama dengan TV, radio untuk komunikasi. Jadi kami sering tampil di TV untuk mensosialisasikan kebijakan pendidikan.yah... semua ditujukan agar para guru itu sepenuhnya nanti kembali ke jalan yang benar(dalam arti ingat perjuangan PGRI) agar kesesatan pemikiran dalam bentuk pengingkaran akan perjuangan PGRI itu di sadari.Bahwa sebenarnya telah banyak yang diperjuangkan oleh PGRI tetapi guru tidak merasa atau mungkin guru itu belum dewasa.

4. Sebenarnya apa manfaat secara langsung yang diperoleh anggota PGRI selain kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan guru?

Jawab:

Manfaat untuk guru selain berupa kebijakan, PGRI kan menyediakan berbagai sarana informasi itu. Kemudian yang terpenting adalah pembelaan (advokasi) perlindungan terhadap guru yang bermasalah dengan hukum bahkan bantuan hukum guru sampai pada tingkat pengadilan, itu begini...ini mungkin perlu diketahui PGRI

itu punya LKBH bahkan untuk PGRI kota Semarang sudah punya. LKBH PGRI itu betul-betul memberi advokasi, memberikan konsultasi bantuan hukum, juga melindungi bahkan membantu ketika ada guru terkena proses masalah hukum. Pemberian bantuan itu mulai tahap awal (pendampingan) sampai dengan nanti mendampingi dalam bentuk kuasa hukum, pengacara. Jadi kita punya pengacara-pengacara PGRI. Mereka yang mendapatkan bantuan pembelaan tidak dikenai biaya? gratis, pengacaranya nanti diberi honor dari organisasi. Sedangkan yang kena kasus hanya membiayai perkara kasusnya saja kalau dibutuhkan biaya. Jadi ini sangat meringankan anggotanya. Di kota Semarang sudah sangat sering pendampingan terhadap guru yang berperkara di pengadilan. Ada yang kasusnya berupa mengajarkan kasih sayang kepada siswanya di sekolah, ada yang kesalahfahaman antara guru dengan wali muridnya. Ada juga karena terlalu semangatnya mendidik siswa akhirnya diperlakukan hal yang berlebihan. Tadinya ingin menuangkan kasih sayang kepada siswanya tetapi berwujud pemukulan.. akhirnya tetap didampingi sampai di tingkat pengadilan. Akhirnya ada yang hukumannya diperingan bahkan ada pula yang bebas.

5. Apa harapan bapak kepada guru-guru yang belum mengetahui perjuangan PGRI

Jawab :

Saya berharap kepada teman-teman guru :

- a. Untuk menjalankan tugas profesionalitas guru dengan sebaik-baiknya artinya kedepankan kewajiban dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan harus ada upaya setiap saat untuk memperbaiki diri. Kalau sekarang sudah profesional besok harus lebih profesional lagi.
- b. Untuk bisa mengusulkan sesuatu, memperjuangkan sesuatu dengan baik memang kita harus bersatu. Jadi solidaritas harus kita gelorakan terus. Kita tidak boleh saling menjegal antara satu dengan yang lain. Guru satu dengan yang lain harus berhimpun bersatu dalam wadah PGRI ini. Yakinlah kalau kita bersama maka kekuatan tentu kita miliki. Jadi bisa dibayangkanlah kalau sapu itu hanya satu lidi maka seperti apa kekuatannya, kalau sapu itu besar tentu mampu untuk mengalahkannya. Saya kira itu dan teman-teman guru kami berharap juga bila ada kelemahan-kelemahan didalam organisasi mari kita benahi bersama- sama karena bagaimanapun juga PGRI milik kita bersama. Jadi jangan kemudian ketika ada kelemahan tertentu maka ingin mendirikan organisasi guru yang lain. Saya kira itu dulu saja yah...































